BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang Responsif Gender;
b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan Gender

dan keadilan Gender; dan

c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG.

BAB II
RAD PUG

Pasal 4

(1) RAD PUG Tahun 2025-2029 meliputi:
   a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
   b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
   c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
   d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.

(2) RAD-PUG 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian PUG pada Tahun 2025-2029 oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RAD PUG Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I PENDAHULUAN;
   b. BAB II GAMBARAN UMUM;
   c. BAB III KEDUDUKAN PUG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH;
   d. BAB IV ANALISIS SITUASI PUG DI DAERAH;
   e. BAB V PENYELENGGARAAN PUG DI DAERAH;
   f. BAB VI TUJUAN DAN SASARAN SERTA RAD PUG TAHUN 2025-2029;
   g. BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN PUG TAHUN 2025-2029; dan
   h. BAB VIII PENUTUP.

(2) Dokumen RAD PUG Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2025-2029.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD PUG Tahun 2025-2029 bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2029

URAIAN SECARA RINCI
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2029

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Dokumen ini disusun sebagai respons terhadap kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengarusutamaan gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Muatan Utama dalam dokumen RAD PUG Kabupaten Batang tahun 2025-2029 adalah:

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum:
   a) RAD PUG disusun untuk mengadaptasi kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender, dengan dasar hukum utama seperti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008.
   b) Tujuannya adalah memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan memperhatikan perspektif gender, dengan fokus pada kesetaraan dan keadilan gender.
2. Tujuan dan Sasaran:
   a) Menjelaskan analisis kesenjangan gender dalam pembangunan.
   b) Merumuskan target, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan konkret untuk mencapai kesetaraan gender.
   c) Memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
3. Ruang Lingkup dan Metode Pelaksanaan:
   a) Melakukan evaluasi kondisi penerapan pengarusutamaan gender.
   b) Merumuskan masalah krusial pembangunan gender di berbagai sektor.
   c) Menyusun dokumen RAD PUG dan melaksanakan diskusi serta konsultasi publik.
4. Analisis Situasi Gender:
   a) Membahas kemajuan pembangunan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, perlindungan perempuan dan anak, infrastruktur, dan kependudukan.
   b) Mengidentifikasi permasalahan gender yang masih dihadapi, seperti kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
5. Strategi dan Rencana Aksi:
   a) Menyusun strategi dan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan gender, termasuk peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi perempuan.
   b) Memastikan integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
6. Monitoring dan Evaluasi:
   a) Menyusun rencana monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi RAD PUG berjalan efektif.

b) Menggunakan indikator kinerja yang responsif gender untuk mengevaluasi keberhasilan program.

7. Kelembagaan dan Sumber Daya:
   a) Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Focal Point PUG di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
   b) Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan data yang mendukung pelaksanaan RAD PUG.

RAD PUG Kabupaten Batang 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Dengan fokus pada kesetaraan dan keadilan gender, dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Batang.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengadaptasi kebijakan nasional terkait Pengarusutamaan Gender (PUG), Kabupaten Batang memandang penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjadi dasar utama dalam upaya ini, yang menegaskan perlunya strategi yang rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui pengakuan terhadap pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan baik perempuan maupun laki-laki, Kabupaten Batang bertekad untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan memperhatikan perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan instrumen perencanaan lainnya, Kabupaten Batang berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dengan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang lebih inklusif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang terintegrasi dalam berbagai dokumen perencanaan dan dilakukan melalui analisis gender.

Sejalan dengan komitmen ini, Kabupaten Batang menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih fokus, efektif, sistematik, terukur, dan berkelanjutan. RAD PUG akan memberikan arahan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan di

Kabupaten Batang dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2025 – 2029 adalah

1. UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. UU No. 20 Tahun 1999 Pengesahan ILO Konvensi No. 138 - Usia Minimum untuk Bekerja
3. UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (sebagai diubah UU No. 17 Tahun 2016)
4. UU No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6. UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
7. UU No. 20 Tahun 1999 Pengesahan ILO Konvensi No. 138 - Usia Minimum untuk Bekerja
8. UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (sebagai diubah UU No. 17 Tahun 2016)
9. UU No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
10. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
11. UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
12. UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (sebagai diubah UU No. 9 Tahun 2015)
13. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 RPJMN 2020-2024

16. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Daerah
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 4 Tahun 2014 Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Responsif Gender
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Penerapan SPM
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 Pengarusutamaan Gender

C. Maksud dan Tujuan

RAD PUG Kabupaten Batang 2025 – 2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kepada instansi daerah dan pihak terkait dalam menerapkan prinsip pengarusutamaan gender serta merencanakan program dan kegiatan yang responsif terhadap isu gender. Tujuan penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan analisis mengenai kesenjangan gender dalam proses pembangunan.
2. Merumuskan target, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang konkret sebagai langkah konkret untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dengan lebih terarah, dengan tujuan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi,

kontrol, serta manfaat yang adil dari pembangunan, serta berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup tugas yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini mencakup::

1. Melakukan evaluasi kondisi penerapan pengarusutamaan gender;
2. Merumuskan masalah-masalah krusial pembangunan gender dalam berbagai sektor pembangunan;
3. Merumuskan tujuan, target, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang mengedepankan pengarusutamaan gender serta pembangunan yang responsif terhadap isu gender;
4. Menyiapkan Dokumen Pendahuluan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029;
5. Menyiapkan Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029;
6. Mengadakan 1 (satu) kali diskusi tentang Dokumen Pendahuluan, 1 (satu) kali diskusi tentang Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Batang Tahun 2024 – 2029, dan 1 (satu) kali Focus Group Discussion (FGD) / Konsultasi Publik;
7. Memberikan pendampingan dan pengetahuan terkait pelaksanaan pekerjaan kepada pejabat/staf di lingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen.

E. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kajian Teori dan Pendekatan

a) Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pada "Fourth World Conference on Women" tahun 1995 di Beijing, konsep baru yang dikenal sebagai pengarusutamaan gender diperkenalkan (UNDP, 2001). Pengarusutamaan gender diakui sebagai pendekatan penting

untuk mencapai kesetaraan gender, dengan penekanan pada tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Nugroho, 2008). Prinsip-prinsip dasar pengarusutamaan gender mencakup kemitraan, pemberdayaan, intervensi, dan pencapaian kesetaraan gender. Tantangan utama dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender adalah mencapai kesetaraan gender dengan memperhatikan kebutuhan dan memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan, karena pengarusutamaan gender bukan hanya sebuah proses tetapi juga sebuah tujuan yang harus dicapai (Waal, 2006; Hubert & Stratigaki, 2016). Selain memperhatikan peran dan manfaat yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, pengarusutamaan gender juga mendorong perubahan dalam hubungan gender, terutama dalam hal akses dan kendali terhadap sumber daya (Rao & Kelleher, 2005). Untuk mencapai tujuan pengarusutamaan gender, tidak hanya pemberdayaan ekonomi yang penting, tetapi juga perlunya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan ketimpangan gender (Padovani, 2016).

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat daerah merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua regulasi tersebut menetapkan bahwa: Pertama, integrasi isu gender dalam semua tahapan pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kedua, perlunya pembentukan lembaga pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun), dan pendek (1 tahun). Dengan demikian, diharapkan semua sektor penyelenggara negara dapat mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karena itu,

pengarusutamaan gender menjadi isu lintas sektor di daerah yang perlu direspons dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengaruh Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam hukum dan regulasi daerah berkaitan dengan struktur kelembagaan PUG, proses perencanaan dan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, serta berbagai aturan yang mengatur implementasi pengarusutamaan gender. Struktur kelembagaan PUG bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui beragam badan yang aktif di tingkat daerah, seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis POKJA PUG, dan Focal Point PUG. Hal ini menciptakan sistem yang memungkinkan koordinasi dan implementasi kebijakan gender secara efektif di semua tingkatan pemerintahan daerah, memastikan bahwa isu-isu gender dipertimbangkan dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap isu gender, yang harus tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Kerja OPD. Proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap isu gender harus melibatkan analisis gender.

Pasal 14 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 menegaskan langkah-langkah untuk mempercepat pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota. Untuk tujuan ini, dibentuklah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di setiap kabupaten/kota. Anggota Pokja PUG meliputi seluruh kepala/pimpinan OPD. Bupati/walikota menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala OPD yang bertanggung

jawab atas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota.Pasal 15 Permendagri 67 Tahun 2011 Tugas Pokja PUG kabupaten/kota antara lain :

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing OPD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.

Selain pendirian Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG), diperlukan pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (Tim Teknis PUG) yang terdiri dari staf yang memiliki pemahaman mendalam dalam analisis anggaran yang responsif terhadap isu gender. Untuk mempercepat proses pelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dibentuk juga Focal Point Pengarusutamaan Gender (Focal Point PUG). Pembentukan Focal Point ini diatur melalui Surat

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala OPD. Tugas-tugas dari Focal Point PUG meliputi:

1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
4. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing- masing OPD;

b) Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Posisi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Dalam tahap perencanaan pembangunan daerah, PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tiga aspek, yakni perencanaan yang secara khusus menangani kesenjangan gender, perencanaan yang secara positif mengatasi masalah kesenjangan gender, dan perencanaan yang secara umum memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Batang merupakan kewajiban Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut diharmonisasikan, disinkronkan, dan dikonsolidasikan oleh

instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD merangkum visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran utama pembangunan Daerah dalam periode panjang hingga 20 tahun, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional dan tata ruang wilayah. RPJMD merinci visi, misi, dan program kepala daerah, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pembangunan, keuangan daerah, serta program dari berbagai instansi dan lintas sektor, dengan kerangka pendanaan perkiraan untuk 5 tahun ke depan, mengikuti pedoman dari RPJPD dan RPJMN. Sementara RKPD merinci implementasi RPJMD dengan merencanakan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan rencana kerja serta sumber pendanaannya untuk satu tahun, dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Pasal 263 UU No 23 Tahun 2014 terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah. RPJPD adalah gambaran detail dari visi, misi, kebijakan, dan tujuan utama pembangunan Daerah dalam periode panjang, biasanya 20 tahun, yang mengacu pada RPJPN dan tata ruang wilayah. RPJMD adalah penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang mencakup tujuan, strategi, kebijakan pembangunan, dan keuangan daerah untuk periode 5 tahun, dengan acuan dari RPJPD dan RPJMN. RKPD, sementara itu, merinci implementasi dari RPJMD dengan merencanakan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta

rencana kerja dan sumber pendanaannya untuk satu tahun, mengikuti pedoman dari Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2011, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk menyatukan dimensi gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Di tingkat daerah, implementasi pengarusutamaan gender dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah-langkah tersebut meliputi analisis gender serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap isu gender, yang tercermin dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan responsif gender ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, serta solusi bagi perempuan dan laki-laki. Integrasi PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yang melibatkan penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang kemudian diuraikan dalam rincian APBD.

Analisis gender digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan manfaat dari kegiatan atau program terhadap masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki (Prasetyo, Astini, Fillaili, & Widjanarko, 2019). Hanya memiliki pemahaman akan tujuan pengarusutamaan gender saja tidaklah cukup; pengetahuan tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut melalui analisis gender juga diperlukan (March, Smyth, & Ukhopadhyay, 1999).

Analisis gender bukan hanya menjadi sarana untuk mendorong pengetahuan dan inovasi, terutama dalam pengembangan kebijakan publik (Tannenbaum, Ellis, & Eyssel, 2019), tetapi juga membahas tentang peran, aktivitas, kebutuhan, peluang, dan hak-hak gender (March, Smyth, & Ukhopadhyay, 1999). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis gender merupakan instrumen yang penting dalam mencapai tujuan pengarusutamaan gender dengan memperhatikan perbedaan peran, aktivitas, kebutuhan, peluang, dan hak-hak gender. Hasil dari analisis gender ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan publik yang lebih inklusif. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender. Ada beberapa pilihan alat analisis gender yang dapat digunakan antara lain :

1) Gender Analisys Pathway (GAP);

   GAP digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan dan program pembangunan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Kerangka kerja ini dapat digunakan sebagai alat analisis kegiatan/ proyek/ program pembangunan di segala sektor. Analisis GAP yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan suatu alat analisis gender yang berguna bagi para perencana dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, atau kegiatan pembangunan. GAP merupakan metode evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi sudah memperhatikan aspek gender atau tidak.

2) Problem Based Approach (PROBA);

   Analisis Problem Based Approach (PROBA) merupakan sebuah metode yang telah dikembangkan melalui kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-

Bangsa (UNFPA) di berbagai tingkatan, baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Berbeda dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP), PROBA menekankan pada pendekatan pemecahan masalah yang aktif dan partisipatif. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pengidentifikasian masalah gender yang konkret dalam berbagai konteks dan mencari solusi yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesetaraan gender. Dengan mendorong peran aktif dari semua sektor untuk terlibat secara langsung dalam mengatasi masalah-masalah gender yang dihadapi dalam masyarakat, PROBA berperan sebagai alat yang kuat dalam mempromosikan kesadaran gender dan mempercepat perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

3) Model Harvard:

   Harvard Framework Gender Analysis (HFGA) merupakan alat yang dirancang untuk memetakan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang menyebabkannya, dengan tujuan mencapai keadilan gender secara efisien. Alat ini dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama dengan Kantor Women In Development (WID)-USAID. Model Harvard ini berbasis pada pendekatan efisiensi Women In Development (WID), yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Penggunaan analisis gender model Harvard bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat investasi ekonomi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara rasional, membantu perencana merancang proyek yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas kerja secara menyeluruh, mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai efisiensi yang optimal dalam mencapai keadilan gender, serta memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.

4) Model Moser;

Kerangka Moser, dikembangkan oleh Caroline Moser, seorang peneliti senior dalam perencanaan gender, adalah suatu alat analisis yang berbasis pada pendekatan Pembangunan dan Gender (Gender and Development/GAD) yang dibangun dari pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (Women in Development/WID). Kerangka ini merupakan bentuk analisis yang menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan, termasuk kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, serta penguatan atau pemberdayaan. Kerangka ini juga mengidentifikasi peran majemuk perempuan dalam produksi, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan, serta mengenali kebutuhan gender secara praktis dan strategis. Model ini juga dikenal sebagai "Model Tiga Peran (Triple Roles Models)". Tujuan penggunaan analisis gender model Moser adalah untuk mempengaruhi kemampuan perempuan dalam berpartisipasi dalam intervensi yang telah direncanakan, membantu pemahaman perencanaan bahwa kebutuhan perempuan seringkali berbeda dengan kebutuhan laki-laki, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis perempuan, memeriksa dinamika akses dan kontrol terhadap sumber daya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya, mengintegrasikan gender dalam semua kegiatan perencanaan dan prosedur, serta membantu mengklarifikasi batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan.

5) Model SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat);

   Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau rencana bisnis. Kekuatan (strengths) merujuk pada faktor internal yang positif yang ada dalam organisasi atau rencana bisnis. Kelemahan (weaknesses) mengacu pada faktor internal yang negatif. Peluang (opportunities) adalah kondisi eksternal yang dapat

dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi, sementara ancaman (threats) adalah faktor eksternal yang dapat mengganggu kelangsungan organisasi.

Dalam konteks pengarusutamaan gender, implementasi kegiatan pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender. Kegiatan pembangunan harus memperhatikan akses, kontrol, partisipasi, dan peran antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam menangani kesenjangan gender. Koordinasi antara Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) dan Bappeda sebagai koordinator harus dipertahankan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Batang.

Selain itu, dalam tahap evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengarusutamaan gender juga harus menjadi fokus utama. Evaluasi kinerja OPD dan dokumen perencanaan harus mempertimbangkan apakah aspek kesetaraan gender telah diperhatikan atau belum. Standar evaluasi harus didasarkan pada dokumen perencanaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender. POKJA PUG bersama tim teknis dan Focal point memiliki peran penting dalam mengawal implementasi pengarusutamaan gender dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam setiap tahap pembangunan.

2. Kerangka Pikir

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Batang dimulai dengan mengidentifikasi potensi dan tantangan yang meliputi sembilan area, seperti Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Ekonomi, Sosial, Politik dan Pengambilan Keputusan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Infrastruktur Dasar, dan Kependudukan. Melalui proses identifikasi ini, dilakukan analisis terhadap situasi dan kondisi pengarusutamaan gender dalam masing-masing bidang tersebut. Hasil dari analisis tersebut menjadi landasan untuk merumuskan permasalahan yang ada di setiap area. Dari permasalahan yang teridentifikasi, kemudian dirumuskan strategi, kebijakan, dan rencana tindakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Kerangka Pikir penyusunan RAD PUG adalah sebagai berikut:

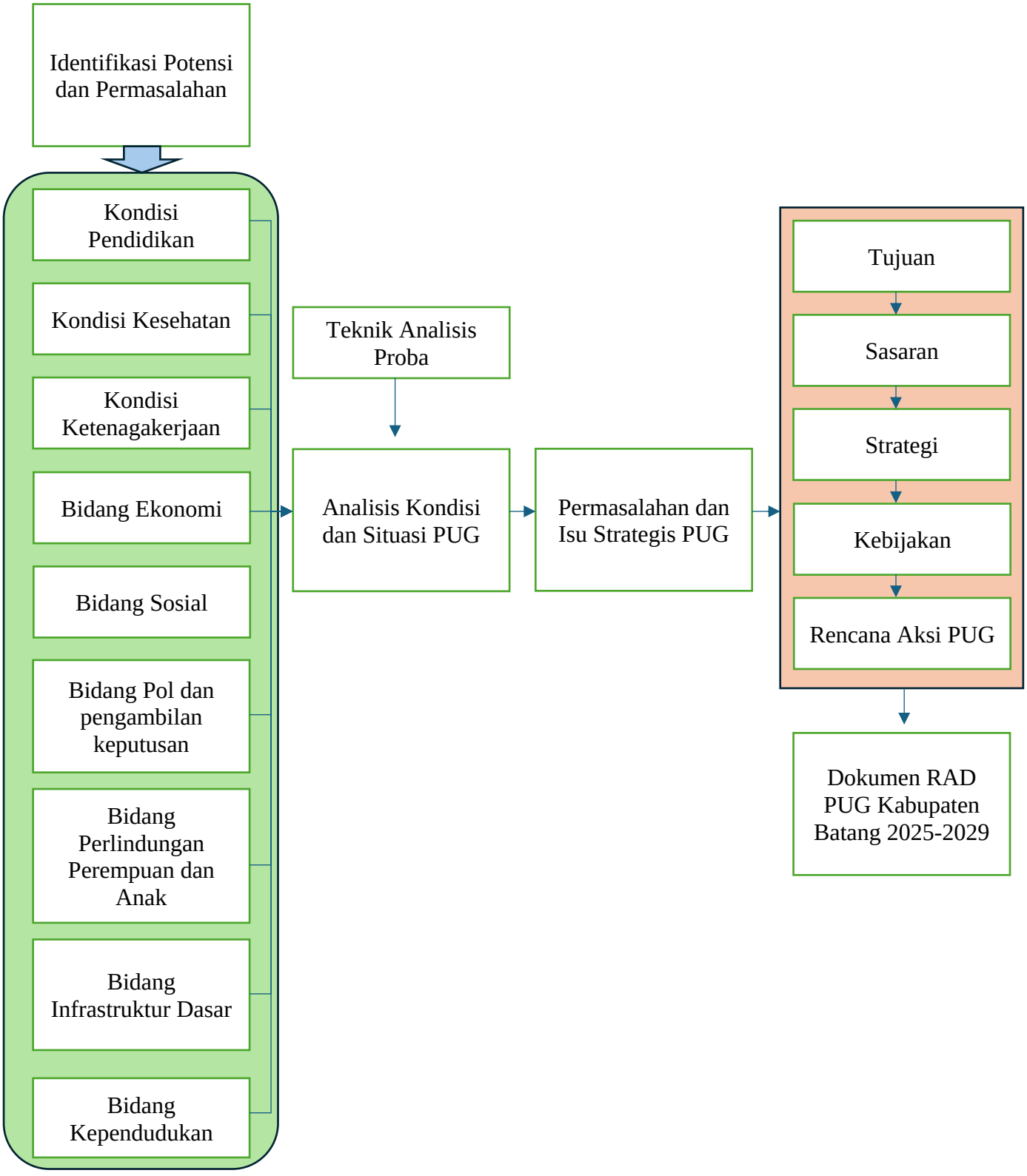

Gambar 1. 1 Gambar Kerangka Pikir Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang

3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a) Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan Pekerjaan ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2025-2029

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
Tahap Persiapan	Pelaksanaan rapat internal tenaga ahli dan supporting staff untuk menyamakan persepsi tentang Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029.	Persepsi antar tenaga ahli tentang Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang sama
Penyusunan Laporan Pendahuluan	Mencakup kegiatan kajian pustaka; penyusunan research design yang mencakup ruang lingkup, metode, instrumen pengumpulan data, dan penentuan responden/ narasumber.	Laporan pendahuluan siap dibahas.
Pembahasan Laporan Pendahuluan	Pembahasan laporan pendahuluan dan rencana detail pelaksanaan kajian oleh tim teknis untuk memperoleh masukan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyusunan RAD PUG, dan memperoleh data/informasi lain yang terkait.	Masukan perbaikan terhadap Laporan pendahuluan dan instrumen.
Tahap Penyusunan dan Finalisasi Instrument Pengumpulan Data	Penyusunan Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Instrumen tersebut Form kebutuhan data	Instrumen siap digunakan untuk pengumpulan data

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
	Sekunder. Instrumen dibahas dengan tim ahli dan disempurnakan	
Tahap Pengumpulan data	Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi dan data primer (dengan alat bantu daftar isian untuk pencatatan data).	Data primer dan data sekunder terkumpul.
Tahap Pengolahan Data	Data yang telah diperoleh dikompilasi dan diolah agar mudah dibaca dan dianalisis.	Data diolah.
Analisis Data	Data yang sudah terkumpul dan telah terkompilasi dianalisis sesuai yang dikemukakan dalam metode analisis data	Data telah dianalisis dan siap disajikan
Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029.	Tim ahli melakukan analisis kajian Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029.	Hasil analisis RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029.
Menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil kajian	Tim Ahli merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029.	Rekomendasi RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029.
Penyusunan Draft Laporan Akhir	Tim Ahli melakukan penyempurnaan laporan interim menjadi draft Laporan Akhir Penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2024-2029 sesuai dengan sistematika yang telah disepakati	Draf Laporan Akhir

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
Pembahasan Laporan Akhir	Pada tahap ini dilakukan pembahasan laporan akhir untuk memperoleh masukan dari tim teknis terhadap laporan akhir yang telah berhasil disusun oleh konsultan.	Masukan penyempurnaan laporan akhir
Revisi draf Laporan Akhir	Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan laporan laporan akhir berdasarkan hasil pembahasandan masukan dari tim teknis, sehingga menghasilkan laporan akhir final.	Laporan akhir siap digandakan
Penyerahan Laporan Akhir	Penyerahan Laporan Akhir	Penyerahan Laporan Akhir

b) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan RAD PUG Kabupaten Batang 2024 – 2029 terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Focused Group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, data statistik, serta laporan-laporan baik yang diterbitkan maupun tidak. Teknik pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung dengan informan, sementara data sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mencari informasi dari instansi atau lembaga terkait dan mengumpulkannya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

c) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data menggunakan teknik analisis Problem Based Approach (PROBA). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu gender yang menjadi dasar penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Rencana Aksi dalam RAD PUG Kabupaten Batang 2024 – 2029. Hasil analisis tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan tahapan RAD PUG Kabupaten Batang hingga tahun 2029.

d) Keluaran (Output) Pekerjaan

Keluaran hasil pekerjaan RAD PUG ini adalah Draft Laporan Pendahuluan, Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir, Executive Summary RAD PUG Kabupaten Bateng Tahun 2024 - 2029, serta semua file dokumen Laporan (hard copy dan soft copy).

e) Sistematika Laporan Akhir

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RAD PUG, maksud dan tujuan penyusunan RAD PUG, ruang

lingkup, keluaran, kerangka pikir dan metode pelaksanaan pekerjaan penyusunan RAD PUG dan sistematika laporan.

Bab II Gambaran Umum Kabupaten Batang, pada bab ini berisi gambaran kondisi, gerografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, kondisi pengarusutamaan gender dan kesejahteraan masyarakat.

Bab III Kedudukan Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Siklus Pembangunan Daerah, pada bab ini berisi kedudukan RAD PUG dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Bab IV Analisis Situasi Pengarustamaan Gender Di Kabupaten Batang, pada bab ini berisi gambaran potensi dan permasalahan pelaksanaan pengarusutamaan gender saat ini pada masing masing bidang.

Bab V Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender Kabupaten Batang, pada bab ini berisi deskripsi tentang penyelenggaraan PUG di Kabupaten Batang yang mencakup komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Data, Sistem Informasi Dan Bahan Informasi, metode dan tool serta partisipasi masyarakat.

Bab VI Strategi, Kebijakan, Rencana Aksi Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Batang, pada bab ini berisi deskripsi tentang strategi, arah kebijakan dan rencana aksi PUG Kabupaten Batang.

Bab VII Rencana Monitoring Dan Evaluasi Pengarustamaan Gender Kabupaten Batang, pada bab ini berisi deskripsi tentang rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Batang.

Bab VIII Penutup, pada bab ini berisi arahan kaidah pelaksanaan PUG di Kabupaten Batang

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

1) Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Batang terletak di pantai utara Jawa Tengah, strategis di antara 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur, membentang sepanjang jalur utama yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Dengan luas wilayah mencapai 78.864,16 hektar, batas-batasnya mencakup Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di timur, sementara Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di selatan, serta Kota dan Kabupaten Pekalongan di barat. Keberadaannya di jalur ekonomi utama pulau Jawa bagian utara menempatkan Kabupaten Batang dalam posisi yang menguntungkan. Dengan arus transportasi yang padat di jalur pantura, wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor jasa transit dan transportasi.

Wilayah Kabupaten Batang memiliki keunikan karena merupakan gabungan antara daerah pantai yang indah, dataran rendah yang subur, dan pegunungan yang menawan. Kombinasi kondisi geografis ini memberikan Kabupaten Batang potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor agroindustri, agrowisata, dan agrobisnis. Dengan pantai yang memikat, lahan yang subur, serta keindahan alam pegunungan, Kabupaten Batang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat aktivitas agribisnis yang beragam dan berkelanjutan.

Kabupaten Batang memiliki posisi yang strategis dengan jarak yang relatif dekat ke berbagai daerah penting di Jawa Tengah dan sekitarnya. Terletak hanya 9 kilometer dari Pekalongan, 43 kilometer dari Pemalang, dan 72 kilometer dari Tegal, Kabupaten Batang juga memiliki akses yang cukup baik ke daerah lain seperti Kendal dengan jarak sekitar 64 kilometer dan Semarang sekitar 93 kilometer. Selain itu, Kabupaten Batang juga terhubung dengan kota-

kota penting di luar Jawa Tengah seperti Jakarta dengan jarak sekitar 392 kilometer dan Surabaya dengan jarak sekitar 480 kilometer. Jarak yang cukup dekat ini memungkinkan Kabupaten Batang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis yang beragam serta memfasilitasi mobilitas penduduk dan barang yang efisien.

Wilayah Kabupaten Batang memiliki topografi yang beragam, terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pantai, dataran rendah, dan wilayah pegunungan. Dengan lima gunung yang memiliki ketinggian rata-rata di atas 2000 meter, seperti Gunung Prau, Gunung Sipandu, Gunung Gajah Mungkur, Gunung Alak, dan Gunung Butak, Kabupaten Batang menawarkan potensi alam yang luar biasa. Kombinasi kondisi geografis ini menciptakan peluang besar untuk pengembangan pembangunan daerah yang berfokus pada sektor agroindustri, agrowisata, dan agrobisnis. Wilayah pegunungan di bagian selatan Kabupaten Batang, khususnya, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas agroindustri dan agrowisata. Potensi ini terutama terkait dengan hasil tanaman perkebunan seperti teh, kopi, coklat, dan sayuran. Selain itu, wilayah ini juga menawarkan potensi wisata alam yang menarik untuk dieksplorasi dan dikembangkan di masa mendatang.

Wilayah Kabupaten Batang, yang sebagian besar terdiri dari pegunungan, memiliki komposisi tanah yang beragam, dengan latosol mencapai 69,66%, andosol 13,23%, alluvial 11,47%, dan podsolik 5,64%. Komposisi ini secara signifikan memengaruhi penggunaan lahan, yang mayoritas difokuskan pada budidaya hutan, perkebunan, dan pertanian. Kebanyakan lahan hutan dan perkebunan dikelola oleh pemerintah, sementara pertanian, baik kering maupun basah dengan sistem irigasi sederhana dan teknis, dilakukan oleh masyarakat lokal.

Meskipun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi yang penting, perubahan dalam penggunaan lahan cenderung stagnan. Sekitar 60% lahan dimanfaatkan untuk hutan, perkebunan, dan pertanian, menghasilkan komoditas seperti kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu, dan

berbagai hasil pertanian lainnya. Meskipun demikian, terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi dalam penggunaan lahan, yang dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan pertumbuhan di wilayah tersebut.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Batang

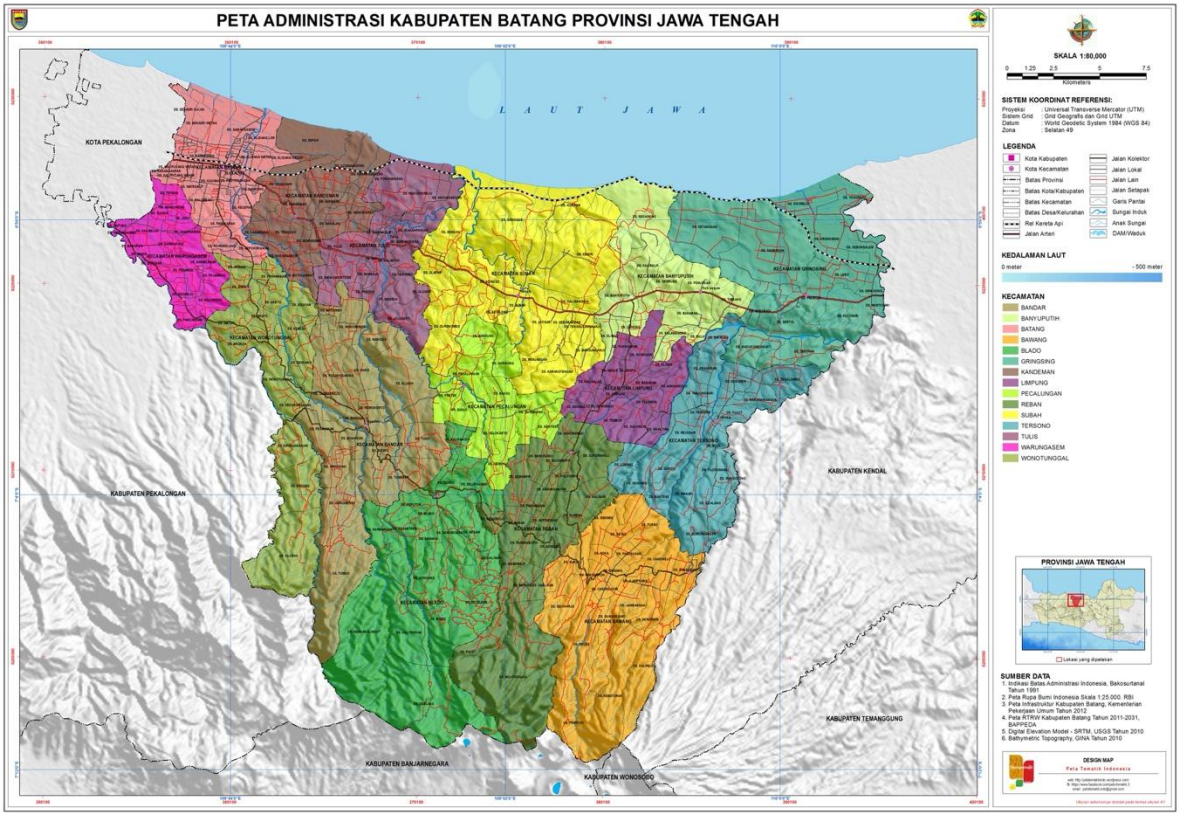

Sumber: Peta Tematik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, terjadi peningkatan jumlah kecamatan dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Langkah pemekaran wilayah ini diambil oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai respon terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Pemekaran

wilayah tersebut bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting. Pertama, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan memperluas cakupan wilayah administratif. Kedua, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat. Ketiga, mempercepat dan meningkatkan pemerataan pembangunan dengan memberikan perhatian yang lebih intensif pada setiap wilayah yang baru terbentuk. Melalui langkah ini, diharapkan Kabupaten Batang dapat merespons dinamika serta kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan inklusif dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

2) Klimatologi

Kabupaten Batang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki iklim tropis basah dan kering (Aw) sesuai dengan klasifikasi iklim Köppen. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang mengalami dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Mei hingga September, sementara musim hujan berlangsung antara bulan Oktober hingga April. Selama musim kemarau, Kabupaten Batang biasanya mengalami cuaca kering dan panas, dengan curah hujan yang minim. Suhu udara cenderung tinggi, sering kali mencapai di atas 30°C, dengan kelembaban yang relatif rendah. Pada saat ini, daerah tersebut dapat mengalami kekeringan dan kekurangan air, yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

Sementara itu, selama musim hujan, curah hujan yang tinggi sering terjadi, sering disertai dengan hujan lebat dan angin kencang. Suhu udara cenderung lebih sejuk, tetapi kelembaban udara meningkat. Musim hujan ini sangat penting bagi pertanian dan sektor lainnya, karena menyediakan air yang cukup untuk tanaman dan keperluan lainnya. Namun demikian, iklim di Kabupaten Batang dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya. Bagian-bagian yang berada di dataran rendah cenderung memiliki suhu yang

lebih tinggi dan curah hujan yang lebih rendah, sementara daerah pegunungan mungkin memiliki suhu yang lebih sejuk dan curah hujan yang lebih tinggi.

Tabel 2. 1 Curah Hujan Maksimal Harian menurut Stasiun Kecamatan dan Bulan di Kabupaten Batang (mm) Tahun 2023

No	Bulan	Rata-Rata Bulanan
1	Januari	111.6
2	Februari	115.13
3	Maret	98.4
4	April	58.13
5	Mei	45.27
6	Juni	24.67
7	Juli	21.08
8	Agustus	64
9	September	4.5
10	Oktober	6.68
11	November	54
12	Desember	53.47
	Jumlah	**653**

Sumber: Sitika Kabupaten Batang, 2024

Berdasarkan data rata-rata bulanan curah hujan di Kabupaten Batang, dapat dilihat bahwa bulan-bulan dengan curah hujan tinggi, yaitu bulan basah, terjadi pada awal hingga pertengahan tahun, sementara bulan-bulan dengan curah hujan rendah, yaitu bulan kering, terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi atau "bulan basah" terutama terjadi antara bulan November hingga Maret. Bulan-bulan ini mencakup bulan-bulan November dengan rata-rata curah hujan sebesar 54 mm, Desember dengan 53.47 mm, Februari dengan 115.13 mm, serta Januari dengan 111.6 mm. Secara umum, bulan-bulan ini menunjukkan curah hujan yang relatif tinggi. Di sisi lain, bulan-bulan dengan curah hujan yang rendah atau "bulan kering" terjadi antara bulan April hingga Oktober. Bulan-bulan ini mencakup bulan-bulan April dengan rata-rata curah hujan sebesar 58.13 mm, Juni dengan 24.67 mm, Juli dengan 21.08 mm, Agustus dengan 64 mm, September dengan 4.5 mm, Oktober dengan 6.68 mm, dan Mei dengan 45.27 mm. Bulan-

bulan ini cenderung memiliki curah hujan yang lebih rendah atau bahkan cenderung kering.

3) Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah di Kabupaten Batang dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah di Kabupaten Batang digunakan secara luas untuk bercocok tanam padi dan tanaman pangan lainnya. Luas tanah sawah di Kabupaten Batang merupakan aset penting dalam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal. Sebaliknya, tanah kering digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perkebunan, perumahan, industri, dan kegiatan lainnya. Tanah kering juga sering kali menjadi lokasi bagi usaha pertanian non-padi, seperti perkebunan kopi, coklat, karet, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Pemanfaatan tanah kering ini memperkaya keragaman hasil pertanian di Kabupaten Batang dan menyediakan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.

Tabel 2. 2 Luas Penggunaan Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Irigasi dan Kecamatan di Kabupaten Batang (ha) Tahun 2023

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Jumlah Sawah	Tegal/Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat/Negara	Lainnya	Bukan Pertanian	Jumlah Bukan Sawah	Total Luas Lahan
1	Wonotunggal	1528.6	197.8	1726.4	954.4	1.4	1684.5	1.5	867	3508.8	5235.2
2	Bandar	1.485	182	1.667	2046.3	1060.5	0	5.2	2553.8	5665.8	7332.8
3	Blado	924	80	1.004	2.009	690	2.710	3	1422.92	6834.92	7838.92
4	Reban	1.106	46.6	1152.6	2097.3	3.9	675.8	1.6	702.18	3480.78	4633.38
5	Bawang	1426.8	264.6	1691.4	1012.6	231	2396.6	835	1217.91	5693.11	7384.51
6	Tersono	1.190	552	1.742	1569.5	196	619.5	295	510.98	3190.98	4932.98
7	Gringsing	1.830	400	2.230	1.500	1.820	897.6	65	764	5046.6	7276.6
8	Limpung	1489.7	312.1	1801.8	1.254	54	-	163	70.5	1541.5	3343.3
9	Banyuputih	484.6	85	569.6	1582.3	1184.5	425.7	159.9	520.5	3872.9	4442.5
10	Subah	887.4	51.8	939.2	2173.8	1.664	1.894	31	1650.2	7.413	8352.2
11	Pecalungan	976.3	55.3	1031.6	1384.5	-	49.7	143.6	1009.5	2587.3	3618.9
12	Tulis	1.135	33	1.168	1.409	175	190	131.9	1434.88	3340.78	4508.78
13	Kandeman	1.032	67.5	1099.5	1337.2	-	-	19	1719.97	3076.17	4175.67
14	Batang	1099.4	256.5	1355.9	301.4	-	13	12.2	1752.4	2.079	3434.9
15	Warungasem	995.2	30	1025.2	874	-	-	344.8	109.37	1328.17	2353.37
	Jumlah	**17.586**	**2.610**	**20.199**	**21.501**	**7.078**	**11.552**	**2.207**	**16.298**	**58.652**	**78.855**

Sumber: Sitika Kabupaten Batang, 2024

Data yang disajikan mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Batang memberikan gambaran yang komprehensif tentang alokasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Dari total luas lahan 78.855 hektar, sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian, baik dengan irigasi maupun tadah hujan.

Lahan irigasi seluas 17.586 hektar menunjukkan pentingnya sistem penyediaan air bagi pertanian di wilayah ini. Selain itu, luas tadah hujan yang mencapai 2.610 hektar menyoroti pemanfaatan sumber air dari hujan sebagai tambahan bagi pertanian. Sektor pertanian juga didukung oleh luas sawah yang mencapai 20.199 hektar, menunjukkan fokus utama pada pertanian padi. Dalam upaya diversifikasi pertanian, terdapat juga luas lahan tegal/huma sebesar 21.501 hektar, serta perkebunan seluas 7.078 hektar, menunjukkan potensi pengembangan sektor perkebunan di wilayah ini. Sementara itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengelolaan sumber daya alam dengan luas lahan hutan rakyat/negara sebesar 11.552 hektar. Selain itu, luas lahan bukan pertanian mencapai 16.298 hektar, yang mencakup penggunaan lahan untuk perumahan, industri, dan kegiatan non-pertanian lainnya. Keseluruhan data tersebut menggambarkan keragaman penggunaan lahan di Kabupaten Batang, yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah tersebut.

B. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Sitika Kabupaten Batang, jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2024 mencapai 55.577 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 28.780 penduduk laki-laki dan 26.797 penduduk perempuan. Dengan pembagian ini, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih rendah daripada jumlah penduduk laki-laki. Sex ratio di Kabupaten Batang sekitar 107,48. Ini berarti terdapat sekitar 107,48 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di wilayah ini. Secara umum, terdapat sedikit kelebihan jumlah laki-laki dibandingkan perempuan di Kabupaten Batang.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Wonotunggal	20.400	20.112	40.512
2	Bandar	38.792	37.863	76.655
3	Blado	24.706	23.742	48.448
4	Reban	21.115	20.949	42.064
5	Bawang	29.882	28.667	58.549
6	Tersono	21.398	21.104	42.502
7	Gringsing	33.189	33.089	66.278
8	Limpung	22.833	22.932	45.765
9	Subah	27.947	27.598	55.545
10	Tulis	20.568	20.557	41.125
11	Batang	68.780	68.050	136.830
12	Warungasem	28.172	27.405	55.577
13	Kandeman	29.360	28.770	58.130
14	Pecalungan	17.435	17.308	34.743
15	Banyuputih	19.255	19.026	38.281
Jumlah		**423.832**	**417.172**	**841.004**

Sumber: Sitika Kabupaten Batang, 2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain mencakup indikator jumlah penduduk, data ini juga memuat informasi mengenai penerima manfaat program-program kesejahteraan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Jaminan Kesehatan Nasional (PBI), serta Bantuan Sosial (Bansos) lainnya. Kehadiran program-program ini tidak hanya mencerminkan aspek demografis seperti jumlah penduduk, tetapi juga menggambarkan tingkat kesejahteraan dan keterlibatan masyarakat dalam jaringan perlindungan sosial. Melalui data ini, dapat dipahami sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seberapa luasnya jangkauan program-program kesejahteraan sosial, serta adanya potensi kesenjangan sosial atau ketidaksetaraan akses terhadap layanan-layanan tersebut.

Tabel 2. 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023

No	Kecamatan	Program Keluarga Harapan/PKH (Rumah Tangga)	KIS/PBI/BPJS yang di tanggung oleh PemerintahPusat (APBN) (Jiwa)	BANSOS Bantuan Pangan Non Tunai (Rumah Tangga)	BANSOS Bantuan Pangan Non Tunai-PPKM (Rumah Tangga)	Jumlah
1	Wonotunggal	1.304	17.094	2.970	0	21.368
2	Bandar	3.675	38.787	7.941	0	50.403
3	Blado	3.424	30.932	6.572	0	40.928
4	Reban	2.576	25.019	5.657	0	33.252
5	Bawang	2.932	29.735	5.576	0	38.243
6	Tersono	2.006	18.805	4.750	0	25.561
7	Gringsing	1.932	19.481	4.348	0	25.761
8	Limpung	1.547	19.751	2.969	0	24.267
9	Banyuputih	1.217	13.305	2.043	0	16.565
10	Subah	2.105	21.987	4.595	0	28.687
11	Pecalungan	1.441	15.983	2.573	0	19.997
12	Tulis	1.684	20.467	4.234	0	26.385
13	Kandeman	2.301	24.120	3.759	0	30.180
14	Batang	2.453	40.543	3.275	0	46.271
15	Warungasem	1.232	22.104	1.528	0	24.864
	Jumlah	**31.829**	**358.113**	**62.790**	**0**	**452.732**

Sumber: Sitika Kabupaten Batang, 2024

Data yang disajikan menggambarkan sejumlah program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di Kabupaten Batang. Menurut data tersebut, tercatat bahwa terdapat 31.829 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan/PKH, yang merupakan program bantuan sosial dari pemerintah untuk mendukung keluarga-keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Selain itu, ada juga 358.113 jiwa yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Jaminan Kesehatan Nasional (PBI), dan BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Program-program ini memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, terdapat 62.790 rumah tangga penerima Bantuan Sosial (BANSOS) berupa Bantuan Pangan Non Tunai,

yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan penerima program kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang mencapai 452.732, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Batang (Jiwa), 2021-2023

Wilayah	Jumlah Penduduk		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	801.718	807.005	813.791

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2024

Jumlah penduduk suatu daerah adalah salah satu parameter utama yang memberikan gambaran tentang ukuran populasi dan potensi pembangunan di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang mencatat pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Batang tercatat sebesar 801.718 jiwa. Angka ini menunjukkan ukuran populasi yang signifikan di wilayah tersebut. Kemudian, terjadi peningkatan yang bertahap pada tahun 2022, dengan jumlah penduduk mencapai 807.005 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah penduduk Kabupaten Batang meningkat menjadi 813.791 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi di Kabupaten Batang, serta menuntut perencanaan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga. Dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk yang stabil, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang tepat guna untuk

meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi seluruh penduduk Kabupaten Batang.

C. Kondisi Perekonomian

1) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang telah mencatat pencapaian yang membanggakan dalam pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 yang terus meningkat. Pada tahun 2021, Kabupaten Batang mencatat laju pertumbuhan PDRB sebesar 4,88%, menunjukkan sebuah fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Kemudian, pada tahun 2022, pertumbuhan ini mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 5,97%, menandai sebuah momentum yang kuat dalam pembangunan ekonomi daerah. Meskipun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023, dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,53%, namun angka ini tetap mengesankan dan menunjukkan ketahanan ekonomi Kabupaten Batang di tengah dinamika global dan nasional yang tidak pasti.

Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Batang (Persen), 2021-2023

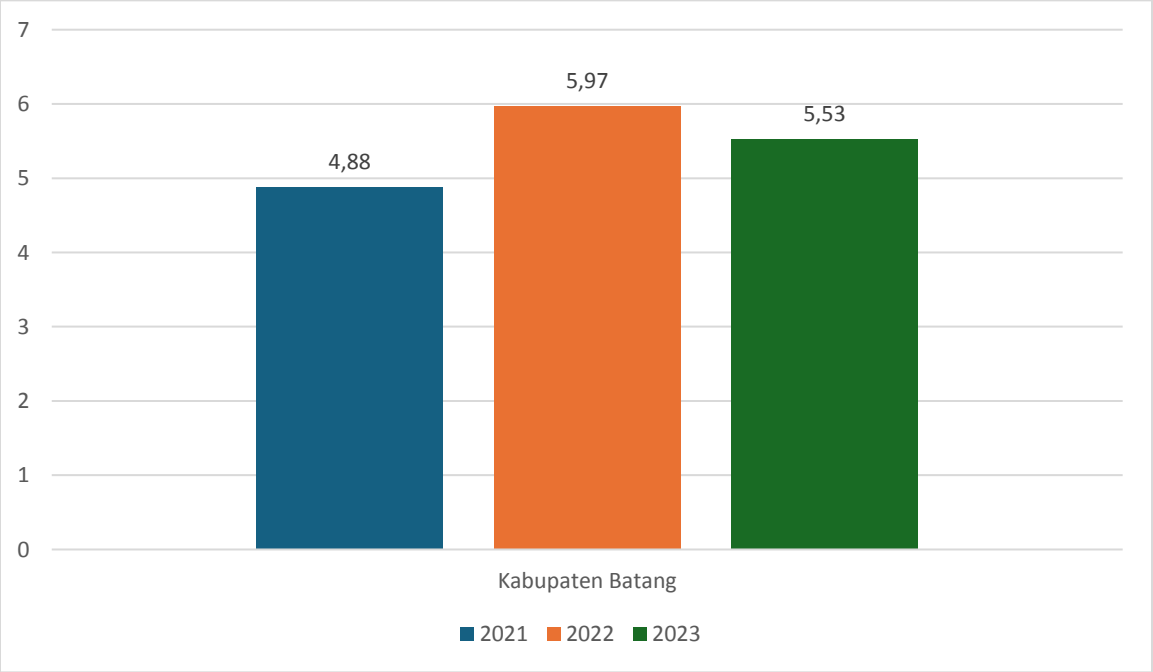

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Tidak hanya laju pertumbuhan yang menggembirakan, tetapi nilai absolut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Batang juga terus meningkat secara konsisten selama periode tersebut. Pada tahun 2021, PDRB mencapai angka 15.764.265.540 Rupiah, yang mengalami kenaikan signifikan menjadi 16.704.986.750 Rupiah pada tahun 2022. Dan pada puncaknya, pada tahun 2023, PDRB meningkat menjadi 17.629.389.280 Rupiah. Peningkatan nilai absolut ini menandakan bahwa Kabupaten Batang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang substansial dalam periode tiga tahun tersebut.

2) Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Batang tidak bergeser dari lapangan usaha konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum dan real estate yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Batang selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2023 adalah pada lapangan usaha

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni 14,31%, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi 13,01; dan Jasa Lainnya sejumlah 9,27%. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan PDRB 2021-2023

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,47	1,75	-0,29
B. Pertambangan dan Penggalian	5,83	-0,76	3,19
C. Industri Pengolahan	4,38	5,95	5,28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,89	5,42	3,41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,22	2,33	8,49
F. Konstruksi	35,78	4,36	13,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,95	3,65	6,26
H. Transportasi dan Pergudangan	1,68	77,42	8,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,31	16,29	14,31
J. Informasi dan Komunikasi	4,54	3,02	7,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,35	0,56	3,17
L. Real Estate	1,33	4,67	9,23
M,N. Jasa Perusahaan	2,65	6,56	5,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	1,79	-0,01
P. Jasa Pendidikan	0,07	2,13	6,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	2,94	3,82	7,59
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,96	12,68	9,27
Produk Domestik Regional Bruto	4,88	5,97	5,53
Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan			

Sumber: BPS, 2023

Pada periode tahun 2021 hingga 2023, PDRB Kabupaten Batang mengalami peningkatan secara keseluruhan, dengan sektor konstruksi menjadi yang paling signifikan dalam pertumbuhan yang mencolok, menunjukkan potensi pembangunan fisik yang kuat dalam wilayah tersebut. Meskipun terdapat fluktuasi pada sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian yang menunjukkan variasi dalam kontribusi ekonomi mereka, tren umum PDRB menunjukkan kenaikan yang

stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Batang. Selain sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta sektor jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan signifikan selama periode tersebut, menyokong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang menjanjikan dan cenderung positif untuk masa depannya.

3) Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Batang. Pada periode tahun 2017-2022, laju inflasi di Kabupaten Batang cenderung fluktiatif dari kisaran 1.7% hingga 5.64%. Nilai inflasi Kabupaten Batang pada tahun 2023 merupakan nilai tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai inflasi Kabupaten Batang cenderung sama dengan nilai inflasi Provinsi dan Nasional, kecuali di tahun 2018 dengan nilai inflasi 2.37% lebih rendah dari nilai inflasi provinsi sebesar 2,82% dan nasional sebesar 3.13%.

Gambar 2. 3 Laju Inflasi Kabupaten Batang 2017-2022

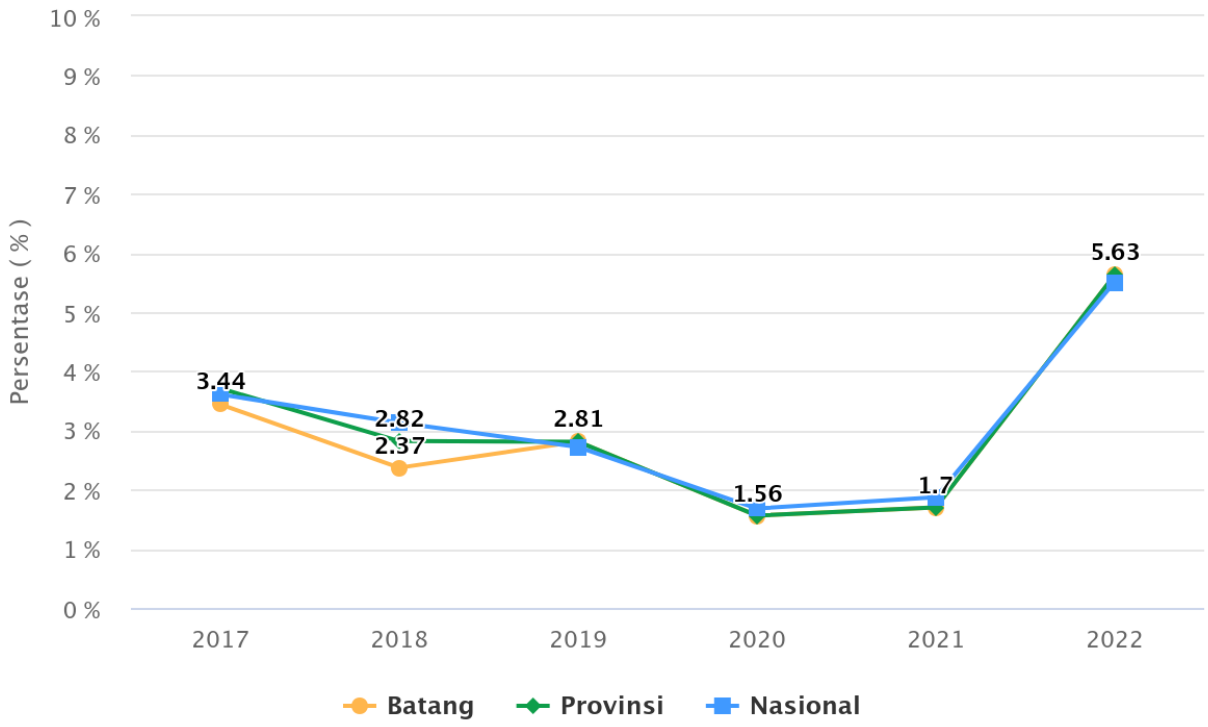

Sumber: Sidasa, 2023

4) PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan merupakan salah satu indikator penting yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam rentang tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang mencatat

pertumbuhan yang signifikan dalam hal PDRB Per Kapita. Pada tahun 2021, PDRB Per Kapita Kabupaten Batang mencapai 19,48 juta Rupiah. Angka ini menunjukkan tingkat pendapatan per individu di Kabupaten Batang pada tahun tersebut. Kemudian, terjadi peningkatan yang cukup substansial pada tahun 2022, di mana PDRB Per Kapita naik menjadi 20,39 juta Rupiah. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan dalam taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Tidak berhenti di situ, Kabupaten Batang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan PDRB Per Kapita mencapai 21,27 juta Rupiah pada tahun 2023.

Tabel 2. 7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang (Juta Rupiah), 2021-2023

Wilayah	PDRB Per Kapita Atas Dasar harga Konstan (Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	19,48	20,39	21,27

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

5) Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah metrik umum yang mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, menunjukkan sejauh mana kesetaraan pendapatan atau kekayaan terdistribusi di antara individu-individu. Rentang nilai Indeks Gini adalah dari 0 hingga 1. Ketika nilai mendekati 0, distribusi dianggap sangat merata dengan setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama. Sebaliknya, nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang ekstrem di mana satu individu memiliki segalanya sementara yang lainnya tidak memiliki apa pun.

Tabel 2. 8 Rasio Gini 2021-2023

Wilayah	Rasio Gini		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	0,303	0,293	0,333

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

Indeks Gini Kabupaten Batang mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks tersebut tercatat sebesar 0,303, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2022, angka tersebut sedikit menurun menjadi 0,293, menandakan sedikit peningkatan dalam kesetaraan distribusi kekayaan atau pendapatan. Tahun 2023 mencatat kenaikan yang signifikan dengan indeks Gini mencapai 0,333, mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan dalam distribusi kekayaan atau pendapatan di Kabupaten Batang.

D. Gambaran Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor penyebab dan dampak yang saling terkait. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan materi, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang. Pemerintah seringkali memperhatikan masalah ini karena kemiskinan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan memahami akar permasalahan kemiskinan secara menyeluruh, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang menyertainya, sehingga masyarakat dapat meraih kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

1) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran atau ambang batas yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Garis kemiskinan biasanya ditetapkan sebagai nilai pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, ukuran keluarga, dan standar hidup yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

Tabel 2. 9 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) 2021-2023

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	318 330	341 252	378 858

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

Data menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Batang mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai garis kemiskinan sebesar 318.330 rupiah naik menjadi 341.252 rupiah pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 378.858 rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mencapai kehidupan yang layak, dengan kemungkinan adanya tekanan ekonomi yang meningkat. Kenaikan garis kemiskinan dari 2021 ke 2022 sebesar 7.21%, sementara dari 2022 ke 2023 sebesar 11.02%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut, baik melalui program-program pemerintah maupun inisiatif masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik.

2) Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan dalam suatu populasi. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendapatan. Penduduk dengan pendapatan rendah cenderung memiliki kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, serta ketimpangan ekonomi yang besar. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti

pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan perawatan kesehatan yang terjangkau juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Tabel 2. 10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang 2021-2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	9,68	8,98	8,92

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Tingkat persentase penduduk miskin merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam periode tiga tahun berturut-turut, dari 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang telah mencatat penurunan yang signifikan dalam tingkat persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 9,68%, menunjukkan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Namun demikian, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai stakeholder terkait telah membuahkan hasil yang positif. Hal ini terbukti dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2022, di mana tingkat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,98%. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023, di mana tingkat kemiskinan mencapai angka 8,92%. Penurunan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi di antara masyarakat Kabupaten Batang. Meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi, penurunan yang konsisten dalam tingkat kemiskinan menunjukkan arah yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Batang.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Data menunjukkan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai P1 adalah 1,76%, kemudian turun menjadi 1,26% pada tahun 2022, dan naik

kembali menjadi 1,85% pada tahun 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran kedalaman kemiskinan, yang mengukur rata-rata jarak antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan, dengan asumsi bahwa penduduk miskin hidup di bawah garis kemiskinan pada tingkat yang didefinisikan secara rinci. Penurunan nilai P1 dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan adanya peningkatan relatif dalam distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, yang dapat diartikan bahwa pendapatan miskin lebih mendekati garis kemiskinan. Namun, lonjakan nilai P1 pada tahun 2023 menunjukkan kemungkinan adanya perubahan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, di mana penduduk miskin menjadi lebih terjebak dalam kondisi kemiskinan yang lebih dalam.

Tabel 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Persen), 2021-2023

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	318 330	341 252	378 858

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

4) Indeks Keparahan Kemiskinan

Data menunjukkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai P2 adalah 0,48%, yang kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 0,29% pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 0,60% pada tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan dengan mempertimbangkan kedalaman kemiskinan serta distribusi pendapatan di bawah garis kemiskinan. Penurunan drastis dalam nilai P2 dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam redistribusi pendapatan di antara penduduk miskin, di mana kemiskinan menjadi lebih ringan secara keseluruhan. Namun, lonjakan nilai P2 pada tahun 2023 menunjukkan kemungkinan adanya perubahan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, di mana beberapa kelompok mungkin mengalami peningkatan tingkat kemiskinan yang lebih parah.

Tabel 2. 12 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Persen), 2021-2023

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Persen)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	0,48	0,29	0,60

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

E. Gambaran Ketenagakerjaan

Data menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, TPAK mencapai 71,40%, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 74,90% pada tahun 2022, dan naik lagi menjadi 76,62% pada tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur proporsi dari angkatan kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan, dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja. Peningkatan yang konsisten dalam TPAK dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan dalam partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Batang. Ini bisa menjadi indikasi dari meningkatnya kesempatan kerja, perbaikan kondisi ekonomi, atau adanya kebijakan dan program pemerintah yang mendorong partisipasi tenaga kerja. Peningkatan TPAK ini juga dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2. 13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen), 2021-2023

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	71,40	74,90	76,62

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

F. Gambaran Kualitas Sumberdaya Manusia

1) Indeks Pembangunan Manusia

Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Batang telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan komponen-komponen utamanya. Angka Harapan Hidup, yang

menjadi indikator kesehatan, menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari 74,74 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,85 tahun pada tahun 2023. Begitu juga dengan Rata-Rata Lama Sekolah, sebuah indikator pendidikan, yang mengalami peningkatan dari 6,88 tahun pada tahun 2021 menjadi 7,07 tahun pada tahun 2023. Harapan Lama Sekolah, yang mencerminkan masa pendidikan yang diharapkan, tetap relatif stabil sekitar 12,13 hingga 12,15 tahun selama periode yang sama. Sementara itu, Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan, sebagai indikator ekonomi, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 9524,00 ribu rupiah pada tahun 2021 menjadi 10.470,00 ribu rupiah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, perkembangan positif ini tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 68,92 pada tahun 2021 menjadi 70,20 pada tahun 2023.

Tabel 2. 14 IPM Berdasarkan Komponen 2021-2023

Komponen IPM	IPM Berdasarkan Komponen		
	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	74,74	74,79	74,85
Rata-Rata Lama Sekolah	6,88	6,90	7,07
Harapan Lama Sekolah	12,13	12,14	12,15
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribu RP)	9 524,00	9 972,00	10 470,00
Indeks Pembangunan Manusia	68,92	69,45	70,20

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

2) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan gender dalam suatu populasi, khususnya dalam konteks pembangunan manusia. IPG memperhitungkan beberapa indikator penting seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, partisipasi angkatan kerja, dan pendapatan per kapita yang disesuaikan, namun dengan memperhatikan perbedaan gender. Dengan kata lain, IPG memperlihatkan seberapa jauh kesetaraan gender telah tercapai dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang pembangunan, serta seberapa jauh perbedaan gender tersebut mempengaruhi hasil pembangunan manusia

secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai IPG, semakin tinggi tingkat kesetaraan gender dalam suatu populasi. Peningkatan kesetaraan gender, seperti kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja yang sama antara pria dan wanita, merupakan tujuan penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Gambar 2. 4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

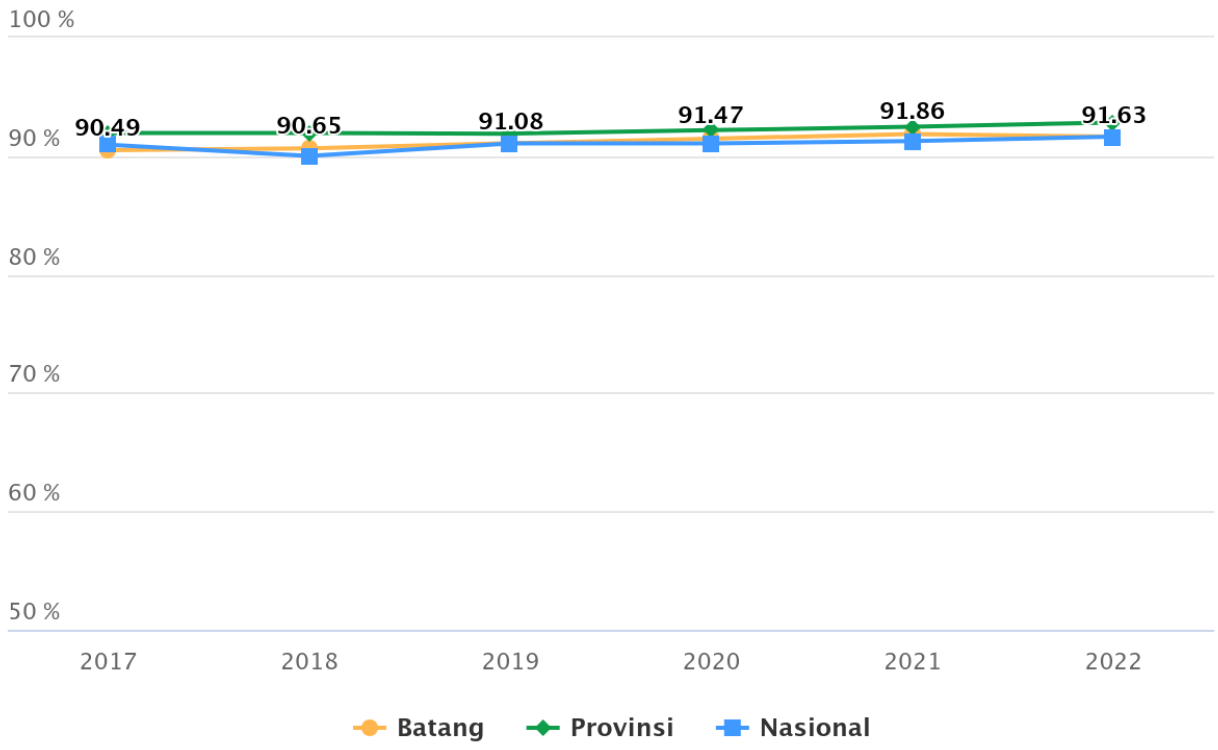

Sumber: Sidasa, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Batang dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan angka yang stabil dengan nilai berturut-turut 90,49; 90,65; 91,08; 91,47; 91,86; dan 91,63. Angka-angka ini mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang pembangunan di wilayah tersebut selama periode tersebut. Menariknya, nilai-nilai IPG ini kurang lebih sejalan dengan IPG di tingkat provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa Kabupaten Batang memiliki tingkat kesetaraan gender yang sebanding dengan wilayah lainnya di tingkat yang lebih luas. Hal ini dapat

diartikan bahwa Kabupaten Batang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa baik pria maupun wanita memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang pembangunan lainnya.

3) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemberdayaan gender dalam suatu populasi atau wilayah. IPG mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Indeks ini biasanya terdiri dari beberapa indikator, seperti partisipasi politik, keputusan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap pekerjaan dan sumber daya lainnya. Tingkat IPG yang tinggi menunjukkan adanya kesetaraan gender yang lebih besar dalam hal pemberdayaan dan kesempatan di masyarakat, sementara tingkat IPG yang rendah menandakan adanya ketimpangan gender yang signifikan. Dengan demikian, IPG menjadi alat penting dalam memantau kemajuan menuju kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area di mana upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender secara keseluruhan.

Gambar 2. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

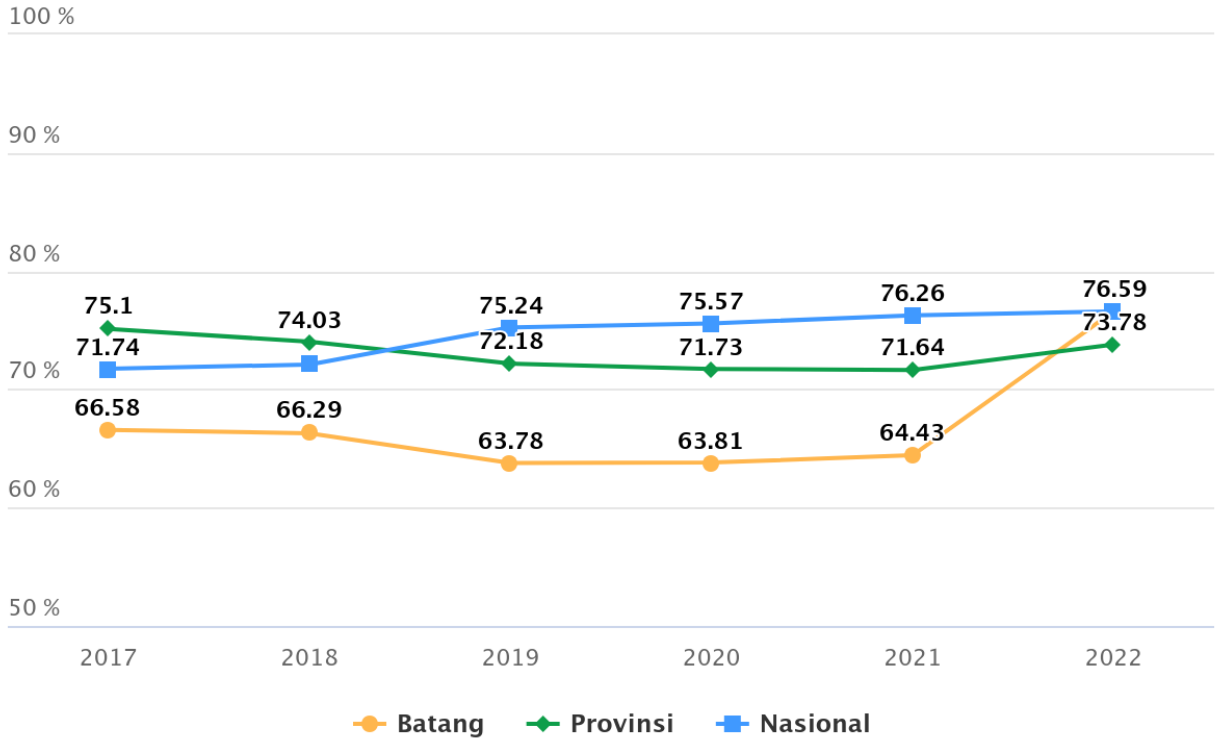

Sumber: Sidasa, 2023

Data menunjukkan perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Batang dengan IPG di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional dari tahun 2017 hingga 2022. Pada periode tersebut, IPG di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi yang signifikan, dimulai dari 66,58 pada tahun 2017, kemudian menurun secara drastis menjadi 63,78 pada tahun 2019, sebelum kembali meningkat menjadi 76,59 pada tahun 2022. Sementara itu, IPG di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan IPG Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 71,64 hingga 75,1 dan IPG nasional berkisar antara 71,74 hingga 76,59 selama periode yang sama. Meskipun IPG Kabupaten Batang pada tahun 2022 mencapai angka yang lebih tinggi dari IPG nasional, fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya variasi yang besar dalam tingkat pemberdayaan gender

di wilayah tersebut. Perbandingan ini menyoroti perlunya pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi tersebut, serta perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Batang agar sejalan dengan tingkat pemberdayaan di tingkat provinsi dan nasional.

BAB III
KEDUDUKAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di daerah mengacu pada dua pedoman utama, yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan ini menekankan pentingnya integrasi isu gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, peraturan-peraturan ini mendorong untuk melembagakan pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun), dan pendek (1 tahun), sebagai upaya untuk memastikan bahwa aspek gender menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap aspek pembangunan di tingkat daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diharapkan seluruh bagian penyelenggara negara akan melaksanakan pengarusutamaan gender dalam beragam sektor pembangunan. Dengan demikian, isu pengarusutamaan gender menjadi hal yang menyeluruh di daerah yang harus ditangani dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah melibatkan kelembagaan khusus untuk pengarusutamaan gender, perencanaan, anggaran pembangunan daerah, dan berbagai peraturan mengenai pengarusutamaan gender. Kelembagaan pengarusutamaan gender ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga di daerah, seperti Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG), Tim Teknis POKJA PUG, dan Focal Point Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap isu gender. Hal ini harus tercermin dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD). Proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap isu gender tersebut harus dilakukan dengan menggunakan analisis gender.

Pasal 14 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 menegaskan perlunya langkah-langkah yang cepat dalam menetapkan institusi untuk mempromosikan pengarusutamaan gender di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, dibentuklah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di setiap kabupaten/kota. Keanggotaan dalam Pokja PUG terdiri dari kepala atau pimpinan dari setiap OPD yang ada. Bupati atau Walikota menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota, sementara Kepala OPD yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan diangkat sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota diatur melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota.

Pasal 15 Permendagri 67 Tahun 2011 Tugas Pokja PUG kabupaten/kota, antara lain :

1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing OPD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan
   lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusunRencanaAksiDaerah(RANDA)PUGdikabupaten/kota;dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

Sistem pengarusutamaan gender (PUG) yang didirikan tidak terbatas hanya pada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) secara teknis, tetapi juga memerlukan pembentukan Tim Teknis PUG yang terdiri dari staf yang memiliki pemahaman tentang Analisis Anggaran Responsif Gender (ARG). Sebagai langkah percepatan dalam menetapkan lembaga pengarusutamaan gender di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dibentuklah Focal Point PUG. Pembentukan Focal Point ini ditetapkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Perlu diperjelas bahwa Tim Teknis PUG memiliki peran khusus dalam memastikan analisis anggaran yang responsif terhadap gender, sementara Focal Point PUG bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki beragam tugas yang meliputi beberapa aspek penting. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk mempromosikan pengarusutamaan gender di setiap unit kerja dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, Focal Point PUG juga memiliki peran dalam memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran yang responsif terhadap gender di setiap OPD. Mereka juga aktif dalam melaksanakan pelatihan, sosialisasi, serta advokasi mengenai

pengarusutamaan gender kepada semua pejabat dan staf di OPD tersebut. Tugas lainnya termasuk melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan OPD, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di setiap unit kerja, serta memfasilitasi penyusunan data gender di masing-masing OPD. Dengan demikian, Focal Point PUG memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa aspek-aspek gender menjadi bagian integral dari setiap kegiatan dan kebijakan di tingkat OPD.

B. Kedudukan PUG dalam Siklus Perencanaan Pembangunan di Daerah

Peran Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan pembangunan daerah, PUG diperankan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dibagi menjadi tiga aspek utama. Pertama, perencanaan yang secara khusus menangani isu kesenjangan gender, kedua, perencanaan yang bersifat afirmatif dalam menyelesaikan masalah kesenjangan gender, dan ketiga, perencanaan yang secara menyeluruh (mengarusutamaan) dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Dengan cara ini, PUG menjadi bagian integral dalam setiap tahapan pembangunan daerah, menjamin bahwa perspektif gender dipertimbangkan secara holistik dalam setiap kegiatan pembangunan.

Pasal 260 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Batang dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah ini disusun dalam satu kesatuan yang diselaraskan, disinkronkan, dan disesuaikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian,

koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait diperlukan untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang.

Menurut Pasal 263 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD merupakan elaborasi dari visi, misi, kebijakan arah, dan sasaran inti pembangunan Daerah dalam jangka panjang, yang ditetapkan untuk periode 20 tahun, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD adalah penguraian dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk lima tahun, merujuk pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara RKPD adalah perincian dari RPJMD yang mencakup rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun, didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, ketiga dokumen ini membentuk kerangka penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, menggambarkan arah dan prioritas pembangunan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pengarusutamaan Gender (PUG) dianggap sebagai strategi yang dirancang untuk menyatukan dimensi gender menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap tahapan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan nasional. Implementasi pengarusutamaan gender di tingkat daerah dimulai sejak tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Proses

pengarusutamaan gender ini memanfaatkan langkah-langkah seperti analisis gender serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai pengarusutamaan gender, yang ditujukan kepada instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek gender secara menyeluruh dalam setiap aspek pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 3. 1 Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

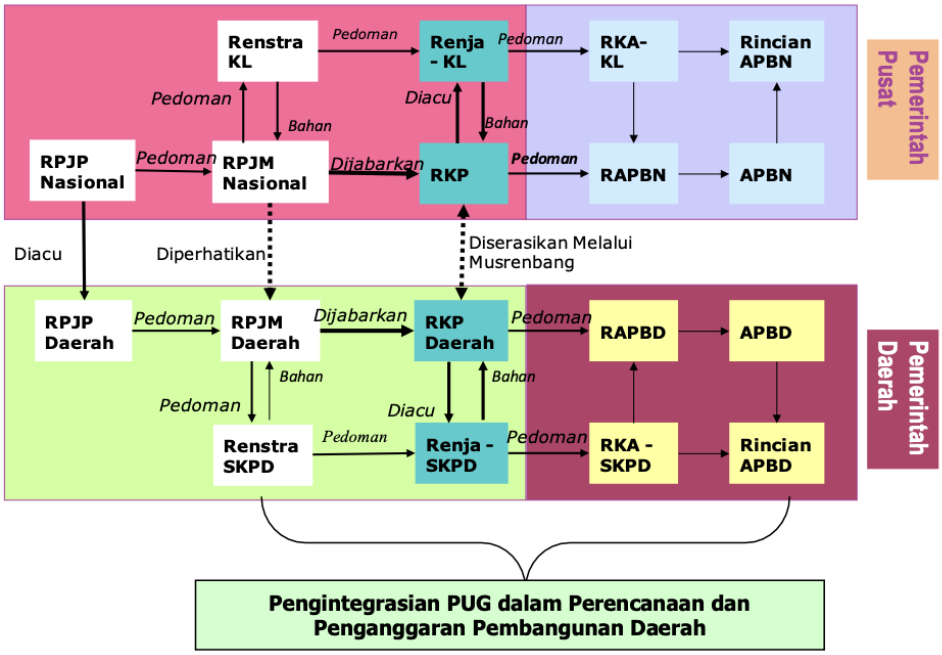

Perencanaan serta penentuan anggaran pembangunan yang mempertimbangkan gender harus disusun dengan memperhitungkan analisis gender. Terdapat berbagai pilihan metode analisis gender yang dapat digunakan, termasuk:

1. Gender Analisys Pathway (GAP): Metode untuk menganalisis dampak kebijakan dan program pembangunan pada laki-laki dan perempuan. Digunakan untuk mengevaluasi apakah program-program tersebut memperhatikan aspek gender atau tidak.

2. Problem Based Approach (PROBA): Metode yang menekankan pendekatan pemecahan masalah aktif dan partisipatif dalam mengidentifikasi serta mengatasi masalah gender secara konkret.
3. Model Harvard: Alat untuk memetakan pembagian kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai keadilan gender secara efisien.
4. Model Moser: Alat analisis yang berbasis pada pendekatan Pembangunan dan Gender (GAD), mengidentifikasi peran perempuan dalam masyarakat dan kebutuhan gender secara praktis dan strategis.
5. Model SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat): Metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau rencana bisnis, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Uraian SWOT

No.	Aspek	Uraian
1	Strengths (Kekuatan)	Kekuatan adalah aspek positif internal dari proyek atau rencana pembangunan yang memberikan keunggulan atau kelebihan komparatif. Mencakup sumber daya yang kuat, keterampilan khusus, teknologi canggih, akses ke modal, dukungan politik yang kuat, atau keunggulan lainnya yang memberikan keuntungan kompetitif.
2	Weakness (Kelemahan)	Kelemahan adalah aspek internal yang merugikan atau memiliki potensi untuk menghambat kemajuan atau keberhasilan rencana pembangunan. Mencakup kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, kekurangan

		keterampilan, birokrasi yang rumit, atau kendala internal lainnya.
3	Opportunities (Peluang)	Peluang adalah situasi atau kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan atau dampak positif rencana pembangunan. Mencakup perkembangan pasar baru, perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, atau tren sosial yang mendukung.
4	Threats (Ancaman)	Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat atau membahayakan keberhasilan rencana pembangunan. Mencakup persaingan yang intens, perubahan regulasi pemerintah, fluktuasi pasar, atau risiko lingkungan.

Berdasarkan rangka kerja keberhasilan analisis SWOT yang telah disusun, langkah-langkah pelaksanaan pembangunan PUG terintegrasi dalam kegiatan pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas urusan yang diserahkan oleh pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan interaksi manusia, penting untuk memperhatikan kontrol akses, partisipasi, dan peran baik perempuan maupun laki-laki. Terutama, kegiatan yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan gender harus efektif dalam mengurangi disparitas antara kedua jenis kelamin.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG harus menjadi inti dari setiap kegiatan yang dilakukan. Di Kabupaten Batang, POKJA PUG harus memainkan peran pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan gender. Koordinator POKJA PUG di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus secara terus-menerus memonitor agar upaya pengarusutamaan gender berjalan optimal. POKJA PUG

bersama tim teknisnya dan Focal point harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pengarusutamaan gender di Kabupaten Batang.

Pada tahap evaluasi, PUG juga harus menjadi inti dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dalam tahap pelaporan, PUG juga harus menjadi pusat dalam menyusun laporan substansi pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja OPD dan dokumen perencanaan harus mempertimbangkan apakah semua proses dan kegiatan telah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Standar evaluasi juga harus didasarkan pada dokumen perencanaan yang telah memasukkan PUG di dalamnya.

C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian integral dari proses pengarusutamaan gender di tingkat daerah, khususnya dalam tahap perencanaan. RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan rencana kerja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, RPJMD memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dan program pembangunan.

Dalam RPJMD, terdapat berbagai komponen yang harus diuraikan, termasuk pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program, perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penutup.

Integrasi gender dalam RPJMD dapat dilakukan dengan memperhatikan pola pikir yang terstruktur, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Struktur RPJMD Responsif Gender

Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
Pengolahan Informasi : Data dan dikompilasi dasarkan : 1. Aspek geografi dan demografi; 2. Aspek kesejahteraan; 3. Aspek pelayanan umum; 4. Aspek daya saing daerah Aspek-aspek tersebut digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah: Gambaran umum kondiri daerah menjelaskan antara lain: **1. Kondisi geografi dan demografi;** 2. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupa-ten/Kota, meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.	Pendahuluan : Gambaran Umum Kondisi Daerah.	• Memasukkan regulasi PUG ke dalam dasar hukum penyusunan RPJMD • Memasukkan data kesenjangan terpilah gender yang menggambarkan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing • Analisis gambaran umum dapat mengambil data dan informasi dari hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja
Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan : 1. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan	Gambaran pengelolaan keuangan daerah.	Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang memberikan kontribusi paling besar dalam PAD,

Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah; 2. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.		apakah PAD membebani perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah : Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, baik lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.	Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.	Memasukan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi : akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat dalam perumusan masalah termasuk faktor penyebabnya, menjadi isu strategis.
Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah : **1. Isu strategis merupakan salah** satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan; 2. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, ber-jangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.	Isu-Isu Strategis	Memasukan isu gender sebagai isu strategis yang ada di RPJMD
Perumusan Penjelasan Visi, Misi : Menjelaskan dan meng-uraikan visi dan misi Kepala	Visi dan Misi	Memasukan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan

Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumu-san tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.		ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan : Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Peme-rintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah : Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan memper-timbangkan faktorfaktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan	• Strategi dan arah kebijakan. • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.	1. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan responsif gender; 2. Merumuskan umum kebijakan responsive gender; 3. Menentukan program yang responsif gender.

Tahapan Penyusunan RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.		
Perumusan Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Beserta Kebutuhan Pendanaan : 1. Langkah berikutnya menyusun alokasi pagu untuk setiap program dan penetapan indicator kinerja; 2. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pem- bangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.	Indikasi Rencana Program Pembangunan Prioritas Penetapan Indikator Kinerja Daerah.	1. Memasukkan pagu indikatid program termasuk untuk program responsif gender 2. Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program sesuai hasil GAP

D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kehadiran PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi hal yang krusial dalam setiap aspek kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi inti yang mempengaruhi isi dari dokumen RKPD yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang kemudian akan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RAPBD disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan APBD ini kemudian dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) untuk OPD.

Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender untuk mengidentifikasi masalah kesenjangan gender terkait akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh oleh penduduk perempuan dan laki-laki. Hal ini diperlukan untuk menetapkan rencana tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.

Kehadiran pengarusutamaan gender dalam pembangunan tahunan sangatlah penting, dan harus dimulai sejak tahap penyusunan RKPD untuk diintegrasikan dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Titik krusial dalam proses perencanaan pembangunan yang responsif terhadap gender terletak pada saat penyusunan RKA dan DPA OPD, karena kedua dokumen anggaran tersebut secara rinci mencantumkan kelompok sasaran suatu kegiatan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sasaran pembangunan telah memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta memperhitungkan kepentingan baik laki-laki maupun perempuan serta kelompok rentan. Integrasi perencanaan yang responsif terhadap gender dalam RKPD Kabupaten Batang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

Tahapan Penyusunan RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender
• Pengolahan Daya dan Informasi: Analisis data dan informasi meliputi: aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial dan daya saing sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan permasalahan yang harus diatasi, dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan disusun. • Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang	Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu.	• Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu; • Memasukkan Kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal dan eksternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan.

Tahapan Penyusunan RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender
penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek pelayanan umum; dan (3) aspek daya saing daerah. • Evaluasi Kinerja Tahun Lalu: Evaluasi dilakukan bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/ kegiatan. • Analisis Masalah Pembangunan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan kemampuan pemerintahan memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.		

Tahapan Penyusunan RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender
• Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah : Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, dan dituangkan serta dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.	Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan	Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.
• Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan, berisi: Program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun yang direncana. Penentuan prioritas pembangunan, diawali dengan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. • Penetapan Program Prioritas dan Pagu Indikatif : Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh	Rumusan program prioritas	Memasukan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang di analisis.

Tahapan Penyusunan RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender
OPD yang merupakan program prioritas, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimum		

Penerapan kebijakan responsif terhadap gender yang mempertimbangkan target pembangunan telah memperhitungkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta kepentingan baik laki-laki maupun perempuan, termasuk kelompok rentan. Selain itu, terdapat komitmen dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dalam menjalankan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif terhadap Gender (PPRG) secara terstruktur dan berkelanjutan.

BAB IV
ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BATANG

A. Kemajuan Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah, dengan memperhitungkan aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kekuasaan politik. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menilai kesejahteraan umum penduduk, IPG secara khusus menyoroti perbedaan dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Penggunaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) berbasis pengarusutamaan gender memberikan keuntungan yang signifikan. Pertama, IPG memberikan data dan analisis yang kuat tentang kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang di tingkat lokal, yang memungkinkan identifikasi masalah dan kebutuhan yang spesifik bagi perempuan dalam komunitas tersebut. Kedua, dengan memperhitungkan indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik, IPG membantu dalam menetapkan prioritas dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memperbaiki kondisi perempuan di tingkat lokal. Gambaran perkembangan IPG Kabupaten Batang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 1 Perbandingan IPG Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022

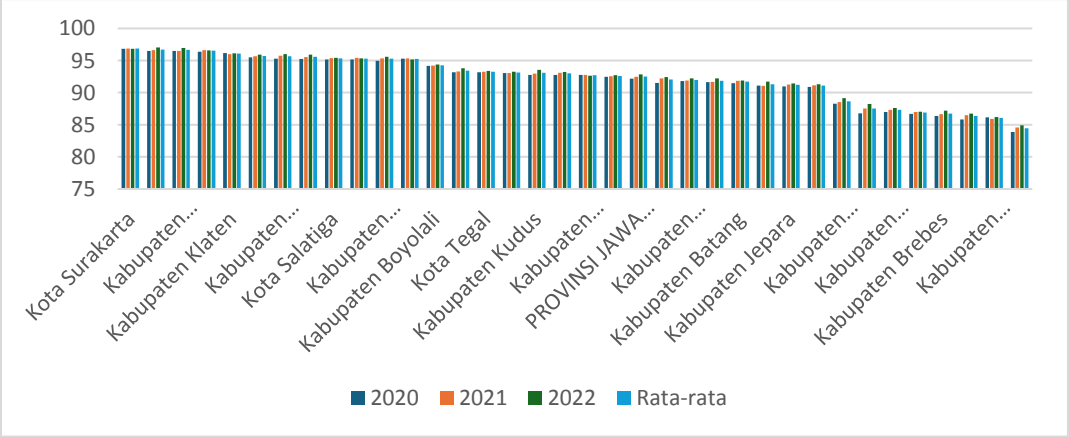

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa IPG Kabupaten Batang pada tahun 2020 adalah 91,47; pada tahun 2021 adalah 91,86; dan pada tahun 2022 adalah 91,88 dengan rata-rata IPG per tahunnya adalah 91,74. Kabupaten Batang menempati urutan ke 12 dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan angka IPG Kabupaten Batang masih di bawah rata-rata IPG Provinsi yaitu 92,18 di tahun 2020; 92,48 di tahun 2021; 92,83 di tahun 2022 dan rata-rata per tahun adalah 92,50.

Data yang disajikan menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan bertahap, naik dari 91,47 menjadi 91,88, dengan rata-rata IPG per tahun sebesar 91,74. Peningkatan yang signifikan terjadi di antara tahun 2020 dan 2021 dengan IPG sebesar 91,86 dan naik 0,2 di tahun 2022 hingga IPG Kabupaten Batang menjadi 91,88. Meskipun terjadi peningkatan, Kabupaten Batang masih berada di posisi ke-12 dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, IPG Kabupaten Batang juga masih di bawah rata-rata IPG Provinsi, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pencapaian kesetaraan gender di tingkat kabupaten dan provinsi. Meskipun demikian, peningkatan IPG dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Batang,

meskipun masih diperlukan lebih banyak upaya untuk menyamakan tingkat kesetaraan gender dengan tingkat provinsi secara keseluruhan.

Gambar 4. 2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang 2017-2022

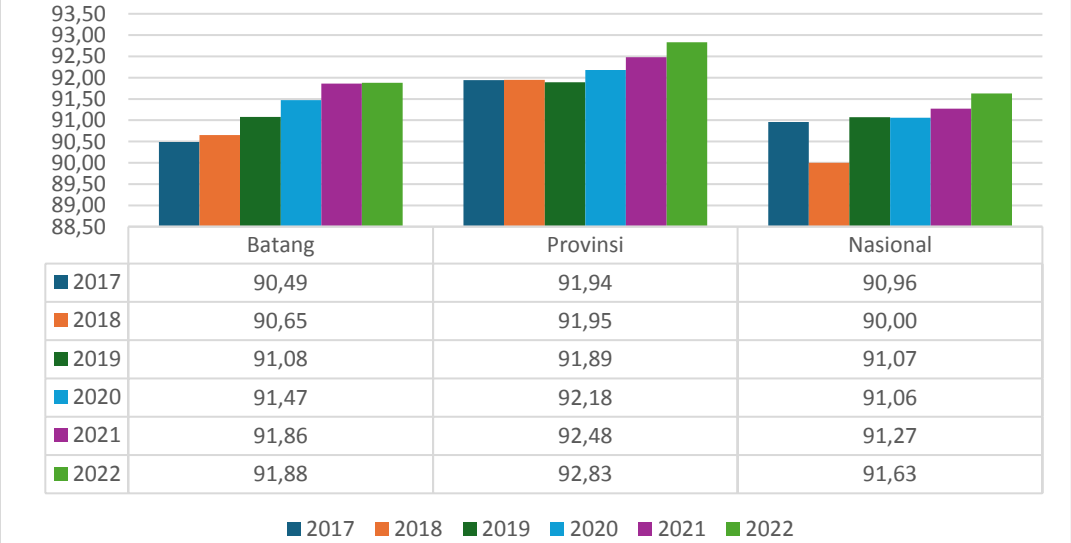

	Batang	Provinsi	Nasional
2017	90,49	91,94	90,96
2018	90,65	91,95	90,00
2019	91,08	91,89	91,07
2020	91,47	92,18	91,06
2021	91,86	92,48	91,27
2022	91,88	92,83	91,63

Sumber: Sidasa Kabupaten Batang, 2023

Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang, dalam perbandingan dengan IPG Provinsi dan Nasional, masih berada di bawah rata-rata pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2017, IPG Kabupaten Batang berada di bawah IPG Provinsi dan Nasional dengan angka 90,49. Namun, terdapat perbaikan pada tahun 2019 dimana IPG Kabupaten Batang tetap berada di bawah Provinsi, tetapi sedikit lebih tinggi 0,01 dari IPG Nasional. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga 2022, IPG Kabupaten Batang lebih tinggi dari IPG Provinsi dan Nasional, dengan angka mencapai 91,47 di tahun 2020; 91,86 di tahun 2021; dan 91,88 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Batang, meskipun masih diperlukan lebih banyak usaha untuk menyamakan atau bahkan melampaui rata-rata Provinsi dan Nasional dalam hal pembangunan gender. Dengan demikian, tren peningkatan IPG

Kabupaten Batang merupakan indikasi positif dari upaya pembangunan yang dilakukan di tingkat lokal.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan terlibat dalam kehidupan ekonomi dan politik suatu negara atau wilayah. IDG mencakup beberapa aspek kunci, termasuk partisipasi perempuan dalam aktivitas politik, partisipasi ekonomi, pengambilan keputusan, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, IDG memberikan gambaran menyeluruh tentang peran aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, dari proses pengambilan keputusan hingga penguasaan sumber daya, yang sangat penting dalam menilai tingkat pemberdayaan perempuan dan mencapai kesetaraan gender secara lebih luas.

Gambar 4. 3 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2020-2022

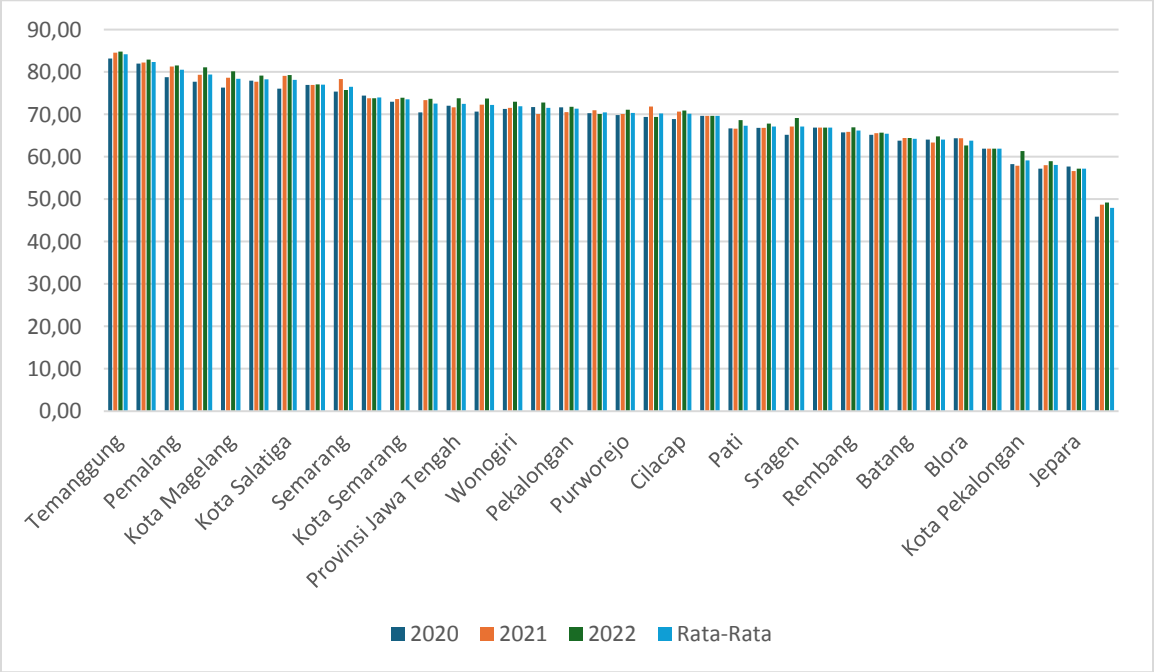

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang pada tahun 2020 adalah 63,81; pada tahun 2021

adalah 64,43; dan pada tahun 2022 adalah 64,44 dengan rata-rata IPG per tahunnya adalah 64,23. Rata-rata IDG Kabupaten Batang menempati urutan ke 14 dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan angka IDG Kabupaten Batang masih di bawah rata-rata IDG Provinsi yaitu 72,03 di tahun 2020; 71,64 di tahun 2021; 73,78 di tahun 2022 dan rata-rata per tahun adalah 72,48.

Data menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, dengan nilai berturut-turut sebesar 63,81; 64,43; dan 64,44. Meskipun terjadi peningkatan, rata-rata IDG Kabupaten Batang berada di posisi ke-14 dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, Kabupaten Batang masih tertinggal dalam hal pemberdayaan gender dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tersebut. Selain itu, IDG Kabupaten Batang juga masih di bawah rata-rata IDG Provinsi, yang menandakan bahwa ada kesenjangan yang signifikan antara pencapaian pemberdayaan gender di tingkat kabupaten dan provinsi. Meskipun demikian, peningkatan yang stabil dalam IDG menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan gender di Kabupaten Batang. Namun, diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa Kabupaten Batang dapat mendekati atau bahkan melampaui rata-rata provinsi dalam hal pemberdayaan gender, sehingga mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Gambar 4. 4 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Batang dengan Provinsi dan Nasional 2020-2022

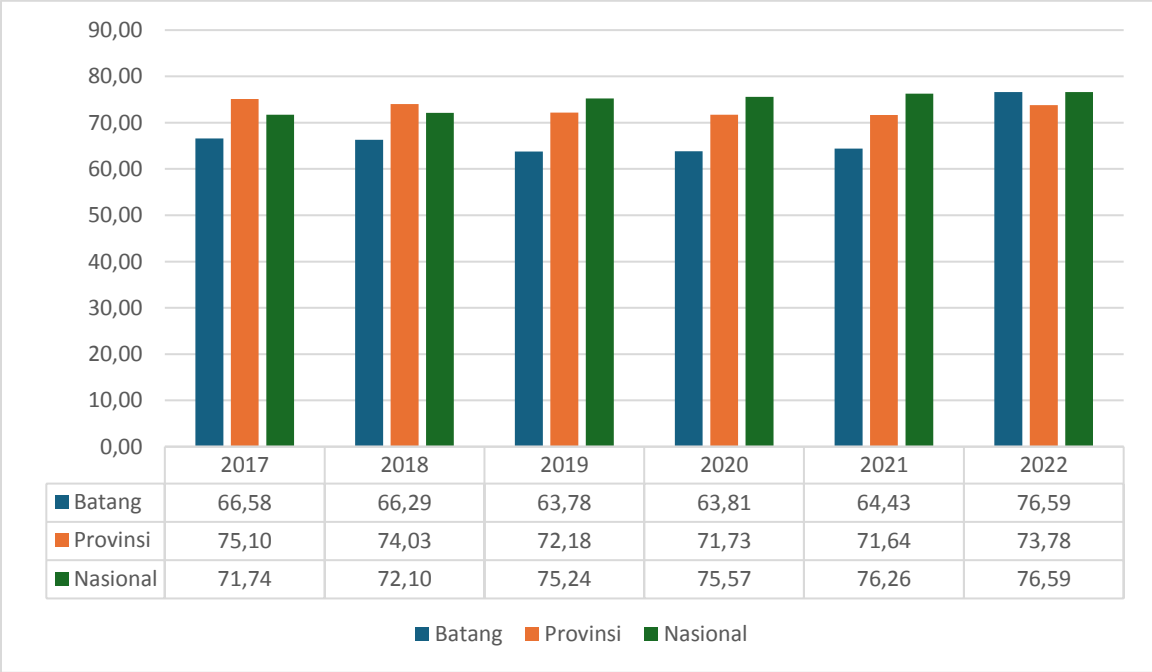

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batang	66,58	66,29	63,78	63,81	64,43	76,59
Provinsi	75,10	74,03	72,18	71,73	71,64	73,78
Nasional	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: Sidasa Kabupaten Batang, 2023

Data menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2022. Meskipun demikian, pada periode 2017-2021, IDG Kabupaten Batang masih berada di bawah rata-rata IDG Provinsi dan Nasional. Namun, pada tahun 2022, IDG Kabupaten Batang mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 76,59, yang menempatkannya di atas rata-rata IDG Provinsi dan Nasional. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemberdayaan gender di Kabupaten Batang pada tahun tersebut. Hal ini dapat menjadi tanda keberhasilan dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan bagi perempuan. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan perbaikan yang positif dalam upaya menuju kesetaraan gender di Kabupaten Batang.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah sebuah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur perbedaan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi terkait dengan akses, kesempatan, atau hasil dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau kekuasaan politik. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana terdapat kesenjangan gender dalam suatu masyarakat atau wilayah. Nilai indeks tersebut dapat berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan ketidakadaan ketimpangan gender (kesetaraan sempurna antara laki-laki dan perempuan), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender maksimum (ketidaksetaraan total antara laki-laki dan perempuan). Indeks Ketimpangan Gender sering digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi area-area di mana kesenjangan gender masih ada dan untuk merancang kebijakan atau intervensi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Berikut adalah data terkait perbandingan IKG Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional:

Gambar 4. 5 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2020-2022

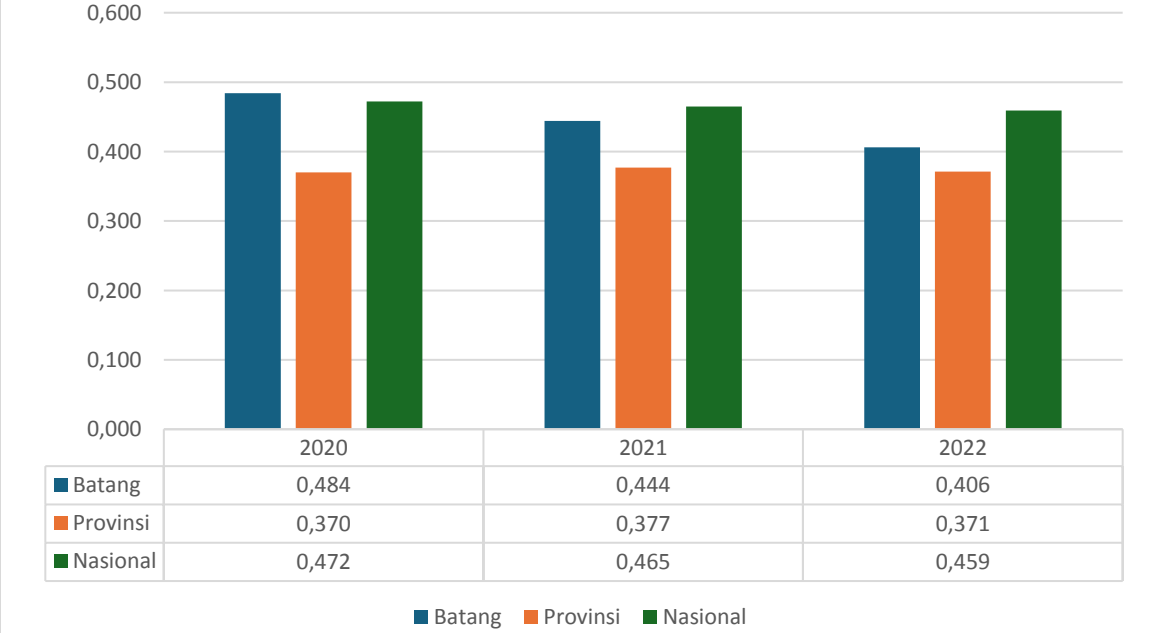

	2020	2021	2022
Batang	0,484	0,444	0,406
Provinsi	0,370	0,377	0,371
Nasional	0,472	0,465	0,459

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa setiap tahunnya angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Batang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesenjangan gender. Pada tahun 2020, IKG di Kabupaten Batang adalah 0,484, kemudian menurun menjadi 0,444 di tahun 2021, dan terus menurun menjadi 0,406 di tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan, namun jika dibandingkan dengan IKG di tingkat provinsi Jawa Tengah, angka tersebut masih menandakan adanya tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. IKG di Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah 0,370, naik sedikit menjadi 0,377 di tahun 2021, dan kemudian turun menjadi 0,371 di tahun 2022. Namun, walaupun demikian, angka IKG di Kabupaten Batang masih lebih baik jika dibandingkan dengan IKG Nasional yang berada di angka 0,472 di tahun 2020, 0,465 di tahun 2021, dan 0,459 di tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan secara bertahap, perbandingan dengan tingkat IKG di tingkat provinsi dan nasional menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam mengurangi ketimpangan gender di Kabupaten Batang. Perbaikan ini menunjukkan kemajuan yang positif, tetapi upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai tingkat kesetaraan gender yang lebih baik.

B. Kemajuan Pembangunan Gender Di Berbagai Bidang

1. Bidang Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi mereka, mencakup aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu, pengembangan pendidikan harus mencakup tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal dan informal. Oleh karena itu,

pembangunan di sektor pendidikan membutuhkan partisipasi aktif bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian pemerintah terkait pendidikan adalah meningkatkan kualitas dan memperluas akses layanan pendidikan. Upaya peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi penyediaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah, seperti peningkatan infrastruktur pendidikan, reformasi kurikulum, dan peningkatan kualitas proses pembelajaran di setiap lembaga pendidikan.

Ada banyak indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dalam pembangunan pendidikan, namun indikator dampak dari pembangunan pendidikan terutama melibatkan rata-rata tahun sekolah, harapan hidup dalam pendidikan, tingkat partisipasi sekolah, dan tingkat putus sekolah. Sedangkan, indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan mencakup rasio sekolah terhadap penduduk, persentase ruang kelas yang dalam kondisi baik, dan persentase sekolah yang memiliki perpustakaan dalam kondisi baik.

Rata-rata lamanya sekolah adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini digunakan untuk memahami perkembangan dalam pembangunan pendidikan dengan memberikan gambaran tentang kemajuan yang telah dicapai dalam hal pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lamanya sekolah penduduk Kabupaten Batang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan positif karena mengalami kenaikan waktu lama sekolah.

Gambar 4. 6 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Batang dengan Provinsi dan Nasional 2021-2023

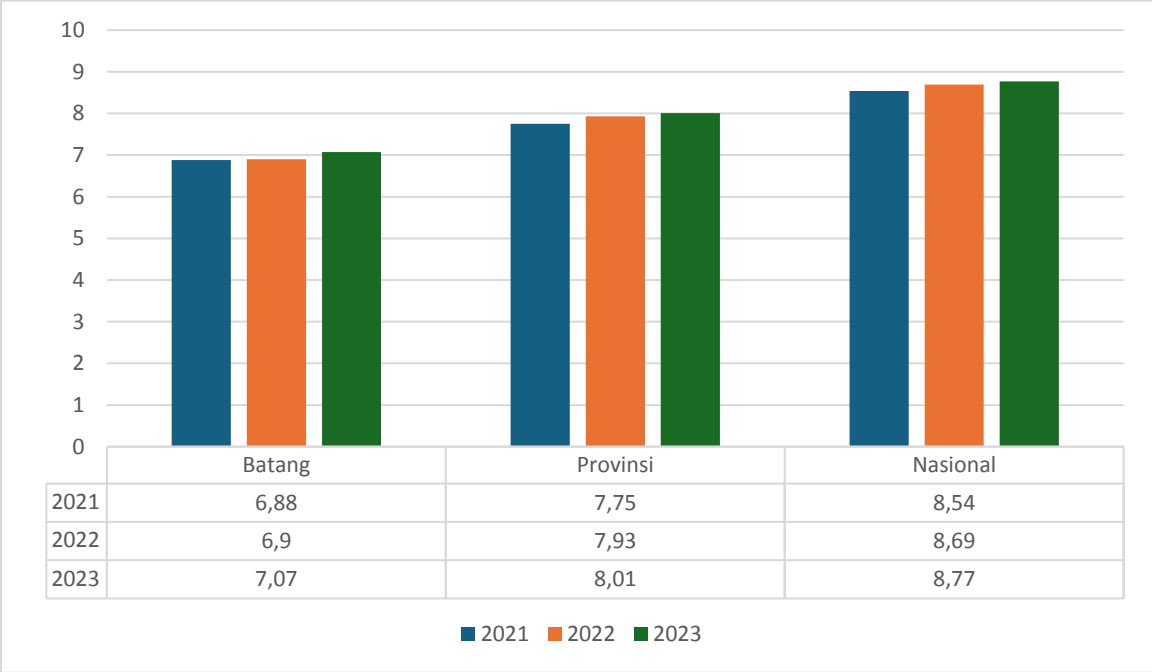

	Batang	Provinsi	Nasional
2021	6,88	7,75	8,54
2022	6,9	7,93	8,69
2023	7,07	8,01	8,77

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang positif dalam rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023, dengan angka yang meningkat secara bertahap menjadi 6,88; 6,9; dan 7,07 tahun. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tingkat provinsi dan nasional, angka lama sekolah Kabupaten Batang masih berada di bawah rata-rata. Rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 7,75; 7,93; dan 8,01 tahun, sementara rata-rata nasional mencapai 8,54; 8,69; dan 8,77 tahun dalam periode yang sama. Meskipun terjadi peningkatan, keberadaan lama sekolah di bawah rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batang, termasuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal yang lebih baik bagi penduduknya.

Gambar 4. 7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Batang (Tahun) 2017-2021

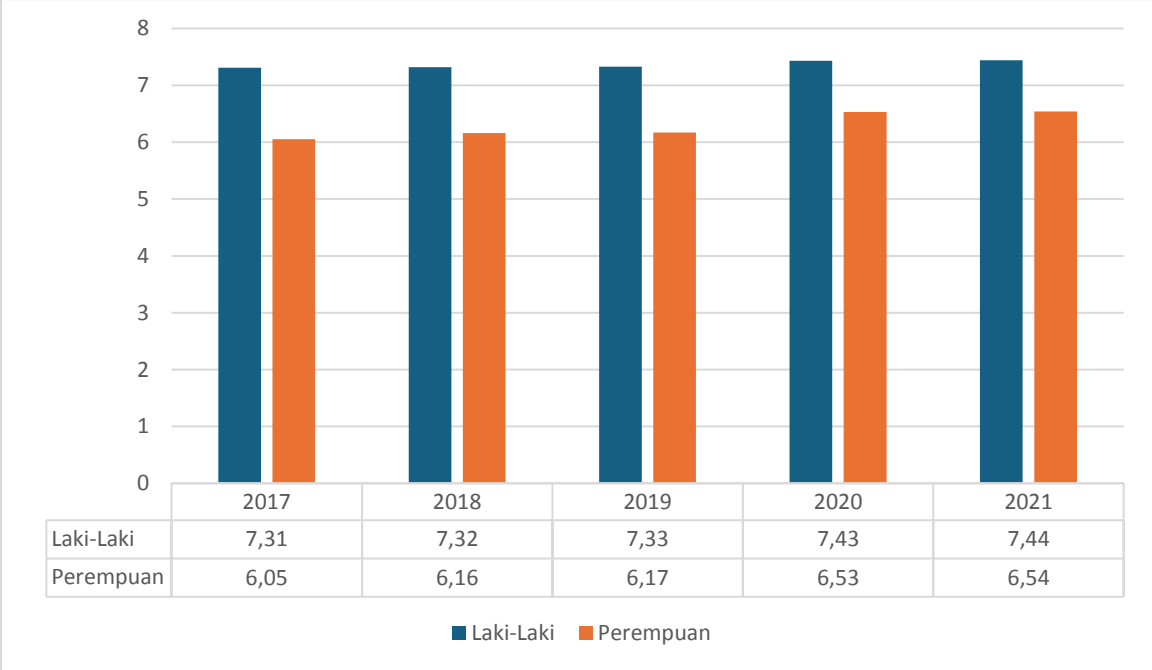

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya ketimpangan dalam rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Selama periode lima tahun dari 2017 hingga 2021, laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih panjang dibandingkan perempuan, dengan angka sekitar 7,37 tahun, sementara perempuan hanya mencapai rata-rata 6,29 tahun dalam periode yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam akses dan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang. Kemungkinan faktor-faktor seperti peran gender dalam masyarakat, ekonomi keluarga, serta aspek sosial dan budaya dapat mempengaruhi disparitas ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Batang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah parameter yang menggambarkan durasi rata-rata sekolah yang diharapkan akan dialami oleh seorang anak pada

titik tertentu di masa depan. Hal ini diasumsikan berdasarkan peluang anak tersebut untuk tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya, dengan asumsi peluang bersekolah tersebut tetap sama dengan peluang bersekolah penduduk pada usia yang sama saat ini. Perhitungan HLS biasanya dimulai dari usia 7 tahun ke atas, seiring dengan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar. Berikut adalah data terkait harapan lama sekolah di Kabupaten Batang secara umum jika dibandingkan dengan HLS provinsi dan nasional:

Gambar 4. 8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Batang dengan Provinsi dan Nasional 2021-2023

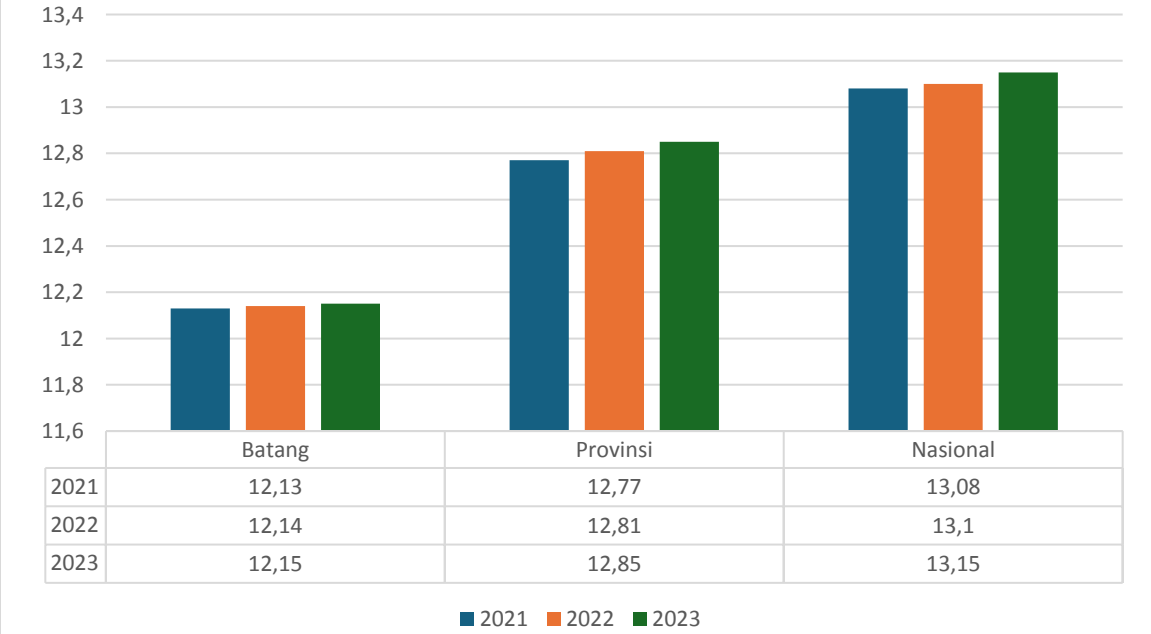

	Batang	Provinsi	Nasional
2021	12,13	12,77	13,08
2022	12,14	12,81	13,1
2023	12,15	12,85	13,15

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Batang mengalami kenaikan yang sangat lambat sebesar 0,01 tahun setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun terjadi peningkatan ini, angka HLS masih jauh di bawah rata-rata HLS di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Batang hanya memiliki HLS selama 12,13 tahun, sementara rata-rata HLS penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 12,77 tahun, dan secara nasional adalah 13,08 tahun. Pada tahun 2022, HLS di Kabupaten Batang meningkat sedikit menjadi 12,14

tahun, namun tetap di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal yang serupa terjadi pada tahun 2023, di mana HLS di Kabupaten Batang hanya mencapai 12,15 tahun, sementara rata-rata provinsi dan nasional adalah 12,85 tahun dan 13,15 tahun, secara berturut-turut. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan HLS dari tahun ke tahun, tetapi perbedaan signifikan masih terjadi antara HLS di Kabupaten Batang dengan rata-rata HLS di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Batang agar dapat mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya yang lebih besar dan strategi yang lebih efektif mungkin diperlukan untuk memperbaiki tren HLS di Kabupaten Batang agar lebih sesuai dengan standar nasional dan provinsi.

Gambar 4. 9 Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Batang (Tahun) 2017-2021

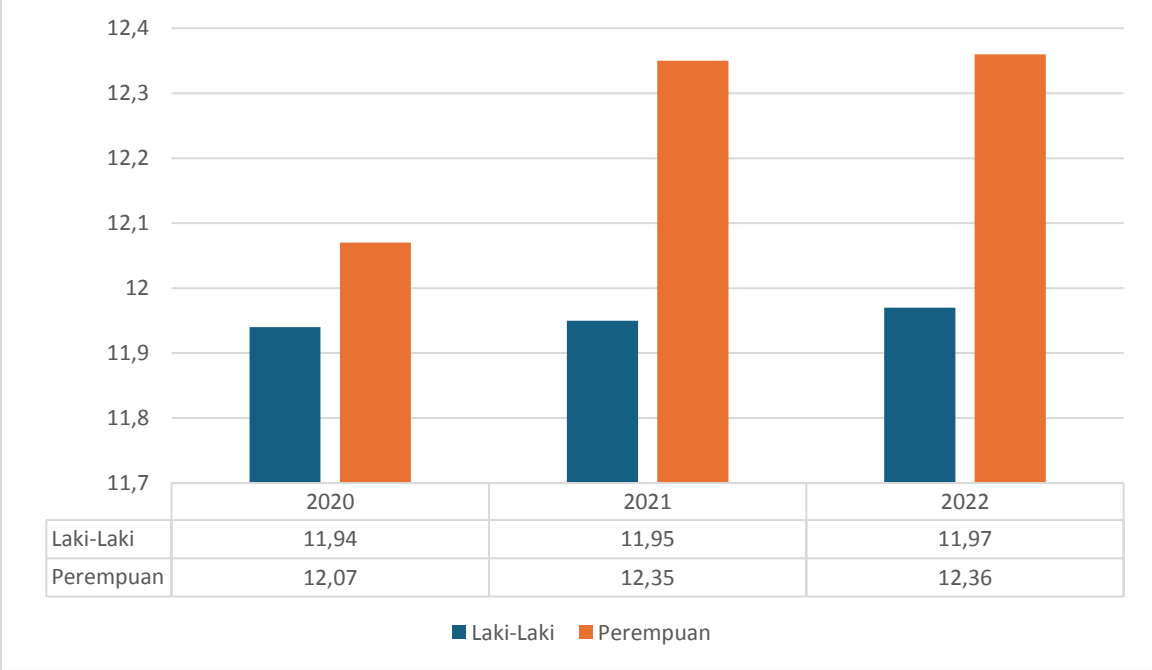

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan selama periode yang diamati. Pada

tahun 2020, terlihat bahwa HLS perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, dengan perempuan memiliki HLS sebesar 12,07 tahun sedangkan laki-laki memiliki HLS sebesar 11,94 tahun. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup besar pada HLS perempuan sementara HLS laki-laki hanya mengalami peningkatan yang sangat kecil. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan yang lebih besar antara HLS laki-laki dan perempuan, di mana HLS perempuan mencapai 12,35 tahun sementara HLS laki-laki hanya 11,95 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2022, perbedaan antara HLS laki-laki dan perempuan tampaknya tetap konsisten, meskipun secara keseluruhan perbedaannya tidak terlalu mencolok. HLS laki-laki adalah 11,97 tahun dan HLS perempuan adalah 12,36 tahun. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam HLS antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tetap penting untuk memantau tren ini dan mungkin melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan data RLS dan HLS terlihat adanya perbedaan yang cukup besar antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Batang. Grafik RLS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan secara bertahap, dengan angka yang naik dari 6,88 tahun pada tahun 2021 menjadi 7,07 tahun pada tahun 2023. Di sisi lain, Grafik 4.7 menunjukkan bahwa harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Batang pada periode yang sama jauh lebih tinggi, dengan angka yang hanya sedikit meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 12,13 tahun pada tahun 2021 menjadi 12,15 tahun pada tahun 2023. Perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan adanya kesenjangan antara realisasi pendidikan dan target pendidikan yang

diharapkan di Kabupaten Batang. Meskipun terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun, harapan lama sekolah tetap jauh lebih tinggi, menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai standar pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan strategi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pendidikan di Kabupaten Batang dapat mencapai harapan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan analisis data dari data RLS dan HLS, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang. Grafik 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, RLS laki-laki adalah 7,43 tahun sedangkan RLS perempuan adalah 6,53 tahun. Meskipun terjadi peningkatan yang sedikit pada tahun 2021, dengan RLS laki-laki menjadi 7,44 tahun dan RLS perempuan menjadi 6,54 tahun, perbedaan antara keduanya tetap signifikan. Sementara itu, Grafik 4.8 menggambarkan bahwa pada tahun 2021, HLS laki-laki adalah 11,95 tahun sedangkan HLS perempuan adalah 12,35 tahun, dengan perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Bahkan, perbedaan ini tetap konsisten pada tahun 2022, di mana HLS laki-laki adalah 11,97 tahun dan HLS perempuan adalah 12,36 tahun. Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok antara harapan pendidikan dan realitas di lapangan, khususnya dalam hal lama sekolah, antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti aksesibilitas pendidikan, norma budaya, atau bahkan faktor ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini guna memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pada permulaan tahun 1972, saat program pendidikan seumur hidup diperkenalkan, Edgar Faure, Ketua The International Commission for Education Development, mengemukakan kesadaran akan pembangunan manusia ini.

Faure menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang paling vital. Pemerintah juga mengakui hal serupa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab IV (Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah) pasal 6 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Pasal 11 ayat 2 juga menegaskan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang cukup guna pendidikan bagi setiap warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun". Hal ini menandakan bahwa seharusnya tidak ada lagi anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah, dan tingkat partisipasi sekolah seharusnya mencapai 100 persen. Jika target ini terpenuhi, akan menjadi modal untuk meningkatkan daya saing dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kualitas kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, tidak hanya relevan pada tingkat provinsi, tetapi juga secara nasional di masa depan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dianggap baik ketika mendekati atau mencapai angka seratus, menunjukkan bahwa setiap anak usia sekolah aktif berada di dalam sistem pendidikan. Peningkatan APS menandakan kesuksesan dalam bidang pendidikan, terutama dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), memberikan gambaran tentang sejauh mana anak-anak dalam usia sekolah terlibat dalam pendidikan formal. Indikator-indikator ini menunjukkan seberapa banyak anak-anak dalam kelompok usia tertentu yang terlibat dalam pendidikan dan sejauh mana pendidikan formal menyerap populasi usia sekolah. Berikut adalah data terkait Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk di Kabupaten Batang pada tahun 2021-2023:

Tabel 4. 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Batang 2021-2023

	Angka Partisipasi Sekolah (APK) (Persen)								
	7-12 tahun			13-15 tahun			16-18 tahun		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Tengah	99,66	99,58	99,57	96,84	96,77	97,08	70,79	70,82	70,87
Kabupaten Batang	99,74	99,98	98,92	96,43	96,18	96,24	64,95	63,86	63,60

Sumber: BPS Jateng, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) antara Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2021 hingga 2023. APS Kabupaten Batang masih dibawah APS Provinsi kecuali di tahun 2022-2023 untuk kelompok umur 7-12 tahun APS Kabupaten Batang berasa di atas Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa persentase APS mendekati sempurna. Namun, data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dan rentang yang bervariasi di setiap kelompok usia. Pada tahun 2021, APS untuk kelompok usia 7-12 tahun sangat tinggi, mencapai 99,74%, menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang hampir sempurna dalam kelompok ini. Namun, terdapat penurunan yang cukup besar pada tahun 2023, dimana APS untuk kelompok usia yang sama turun menjadi 98,92%. Fluktuasi ini juga terlihat pada kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada tahun 2021, APS untuk kedua kelompok usia tersebut adalah 96,43% dan 64,79%, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan APS kelompok usia 13-15 tahun turun menjadi 96,18% dan kelompok usia 16-18 tahun turun menjadi 63,86%. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023, fluktuasi tetap terjadi, dengan APS kelompok usia 13-15 tahun mencapai 96,24% dan kelompok usia 16-18 tahun turun menjadi 63,60%. Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam partisipasi

sekolah di Kabupaten Batang dari tahun ke tahun, dan rentang antara kelompok usia juga cukup signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah di setiap kelompok usia, serta perlunya strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan partisipasi sekolah di semua tingkatan usia untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Batang 2021-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	TAHUN	APS SD/MI (%)			APS SMP/MTs (%)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Total	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Total
1	2019	99,56	99,57	99,56	96,05	96,12	96,08
2	2020	99,61	99,63	99,62	96,13	96,18	96,15
3	2021	99,68	99,69	99,68	96,32	96,37	96,34
4	2022	99,71	99,78	99,74	96,41	96,45	96,43
5	2023	99,85	100,11	99,98	96,15	96,21	96,18

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang menarik dalam partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada jenjang SD/MI, APS sangat tinggi dan konsisten, dengan rata-rata sekitar 99% setiap tahun, menunjukkan akses pendidikan dasar yang baik bagi anak-anak. Tidak ada ketimpangan gender yang signifikan pada jenjang ini, karena partisipasi laki-laki dan perempuan hampir setara. Namun, pada jenjang SMP/MTs, terdapat sedikit penurunan partisipasi, dengan APS rata-rata sekitar 96%. Pada tahun 2023, APS laki-laki menurun menjadi 96,15% dari 96,41% pada tahun sebelumnya, sementara APS perempuan stabil di sekitar 96,21%. Penurunan partisipasi laki-laki di jenjang ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan gender yang perlu diatasi untuk memastikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah sebuah indikator yang mengukur jumlah peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan

jumlah populasi usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persentase. Ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada tingkat jenjang tertentu. Semakin tinggi APK, semakin besar proporsi populasi usia yang terlibat dalam pendidikan di jenjang pendidikan tersebut. Berikut adalah APK di Kabupaten Batang tahun 2021-2023:

Tabel 4. 3 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Batang 2021-2023

	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)								
	SD			SMP			SMA		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Tengah	106,40	106,19	105,01	94,00	94,05	92,80	86,65	86,83	87,84
Kab. Batang	111,05	109,61	109,13	92,28	95,20	96,62	72,27	71,24	73,98

Sumber: BPS Jateng, 2024

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya variasi yang menarik dalam tingkat partisipasi sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Pada tahun 2021, APK untuk Sekolah Dasar (SD) tercatat sangat tinggi, mencapai 111,05%, sementara APK untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga relatif tinggi, dengan masing-masing mencapai 92,28% dan 72,27%. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022, meskipun secara keseluruhan masih tetap tinggi. APK SD turun menjadi 109,61%, sementara APK untuk SMP mengalami peningkatan menjadi 95,20%, dan APK untuk SMA sedikit menurun menjadi 71,24%. Pada tahun 2023, tren penurunan dan peningkatan kembali terjadi. APK SD turun menjadi 109,13%, sementara APK untuk SMP dan SMA mengalami peningkatan signifikan menjadi 96,62% dan 73,98% berturut-turut. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi tahunan, secara umum, tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Batang relatif tinggi di semua jenjang pendidikan. Meskipun APK SD tetap tinggi APK SMP dan SMA pada

tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang Pendidikan semakin rendah APK yang dicapai. Hal ini, menandakan bahwa perlu pemantauan dan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi sekolah di semua tingkat pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Kabupaten Batang.

Tabel 4. 4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Batang 2021-2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	TAHUN	APK SD/MI (%)			APK SMP/MTs (%)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Total	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Total
1	2019	106,39	106,42	106,4	97,51	97,53	97,52
2	2020	107,36	107,4	107,38	97,59	97,63	97,61
3	2021	107,29	107,33	107,31	97,67	97,69	97,68
4	2022	105,9	106,1	106	97,52	97,56	97,54
5	2023	106,07	106,17	106,12	98,25	98,28	98,26

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang mengukur proporsi populasi usia sekolah yang aktif bersekolah di suatu tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhatikan apakah mereka berada dalam jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia mereka atau tidak. Dalam konteks pendidikan, APM memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhitungkan kemungkinan keterlambatan atau percepatan dalam pendidikan. Semakin tinggi APM, semakin besar persentase populasi usia sekolah yang aktif bersekolah, dan sebaliknya. APM yang tinggi dianggap sebagai indikasi positif karena menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang baik di suatu tingkat pendidikan tertentu. Berikut adalah APM di Kabupaten Bateng tahun 2021-2023:

Tabel 4. 5 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Batang 2021-2023

	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)								
	SD			SMP			SMA		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023

Provinsi Jawa Tengah	98,22	98,39	98,46	80,99	81,02	81,56	60,46	61,17	61,46
Kabupaten Batang	96,43	96,98	97,89	79,88	79,62	81,50	54,80	54,21	54,48

Sumber: BPS Jateng, 2024

Data Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan beberapa pola yang menarik dalam partisipasi sekolah di berbagai tingkat pendidikan. Pada tahun 2021, APM untuk Sekolah Dasar (SD) tercatat tinggi dengan 96,43%, sementara APM untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedikit lebih rendah dengan 79,88%, dan APM untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) lebih rendah lagi dengan 54,80%. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan di semua tingkat pendidikan, meskipun sedikit. APM SD meningkat menjadi 96,98%, sementara APM SMP mengalami penurunan kecil menjadi 79,62%, dan APM SMA turun menjadi 54,21%. Pada tahun 2023, tren peningkatan terus berlanjut, dengan APM SD mencapai 97,89%, APM SMP naik menjadi 81,50%, dan APM SMA kembali naik menjadi 54,48%. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi tahunan, secara keseluruhan terjadi peningkatan yang stabil dalam partisipasi sekolah di semua tingkat pendidikan. Namun, dari data diatas diketahui bahwa semakin tinggi jenjang tendidikan terjadi penurunan APM di setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang disajikan untuk Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan dalam Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) di berbagai tingkat pendidikan. Meskipun terdapat variasi tahunan, secara keseluruhan tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Batang relatif tinggi di semua jenjang pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi di semua jenjang pendidikan, meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. APM menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, namun terdapat kecenderungan

penurunan seiring dengan tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi sekolah yang tinggi di tingkat pendidikan menengah. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang cermat dan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi sekolah di semua tingkat pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Batang.

Tabel 4. 6 Jumlah Tenaga Pendidik dan Peserta Didik Kabupaten Batang 2019-2023

No	Urusan dan Indikator	Satuan	Pilah	2019			2020			2021			2022			2023		
				L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar																	
	a.Tenaga Pendidik	(Org)	YA	1.309	2.396	3.705	1.517	2.519	4.036	1.446	2.532	3.978	1.388	2.601	3.989	1.298	2.524	3.822
	b. Peserta Didik	(Org)	YA	31.639	28.922	60.561	31.436	29.059	60.495	31.298	28.994	60.292	32.533	30.221	62.754	30.083	27.871	57.954
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP																	
	a. Tenaga Pendidik	(Org)	YA	698	830	1.528	650	835	1.485	644	840	1.484	630	835	1.465	615	849	1.464
	b. Peserta Didik	(Org)	YA	11.626	11.378	23.004	11.690	11.317	23.007	11.836	11.289	23.125	11.842	11.466	23.308	12.236	11.700	23.936
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	
	a. Tenaga Pendidik	(Org)	YA	31	1.095	1.126	31	1.113	1.144	28	1.114	1.142	29	1.145	1.174	23	1.145	1.168
	b. Peserta Didik	(Org)	YA	7.583	7.133	14.716	7.570	7.106	14.676	7.227	6.757	13.984	7.689	7.148	14.837	7.999	7.432	15.431
				52.886	51.754	104.650	52.894	51.949	104.843	52.479	51.526	104.005	54.111	53.416	107.527	52.254	51.521	103.775

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Batang, 2024

Berdasarkan data diatas diketahui kondisi tenaga pendidik dan peserta didik di tingkat Pendidikan SD di Kabupaten Batang. Pada tahun 2019, persentase pendidik perempuan (64,65%) lebih tinggi daripada pendidik laki-laki (35,35%). Sementara itu, persentase peserta didik laki-laki (52,24%) sedikit lebih tinggi daripada peserta didik perempuan (47,76%). Rasio tenaga pendidik dan peserta didik pada tahun tersebut adalah sekitar 16 peserta didik per tenaga pendidik, menunjukkan bahwa setiap tenaga pendidik bertanggung jawab terhadap sejumlah peserta didik di Kabupaten Batang. Pada tahun 2020, jumlah total pendidik, mencapai 4.036, dengan persentase pendidik perempuan (62,48%) lebih tinggi daripada pendidik laki-laki (37,52%). Sementara itu, dari total 60.495 peserta didik, persentase peserta didik laki-laki (51,93%) sedikit lebih tinggi daripada peserta didik perempuan (48,07%). Rasio tenaga pendidik dan peserta didik pada tahun tersebut adalah sekitar 14,97 peserta didik per tenaga pendidik. Analisis data untuk tahun 2021 di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa persentase pendidik perempuan (63,62%) lebih tinggi daripada pendidik laki-laki (36,38%). Meskipun demikian, distribusi antara peserta didik laki-laki (51,90%) dan perempuan (48,10%) relatif seimbang. Rasio tenaga pendidik dan peserta didik adalah sekitar 0,0662, menandakan bahwa setiap pendidik bertanggung jawab terhadap sekitar 15 peserta didik. Analisis data untuk tahun 2022 di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa persentase pendidik perempuan (65,19%) lebih tinggi daripada pendidik laki-laki (34,81%), menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan sebagai pendidik. Distribusi antara peserta didik laki-laki (51,86%) dan perempuan (48,14%) relatif seimbang. Rasio tenaga pendidik dan peserta didik adalah sekitar 0,0634, menandakan bahwa setiap pendidik bertanggung jawab terhadap sekitar 16 peserta didik. Data tahun 2023 di Kabupaten Batang menunjukkan bahwa persentase pendidik perempuan (66,05%) lebih tinggi dari pendidik laki-laki (33,95%), menandakan peningkatan partisipasi perempuan dalam profesi pendidik. Distribusi antara peserta didik laki-laki (51,92%) dan perempuan (48,08%) relatif seimbang. Rasio tenaga pendidik dan peserta didik sekitar

0,0659, menunjukkan bahwa setiap pendidik bertanggung jawab terhadap sekitar 15 peserta didik.

Analisis data menunjukkan pola yang konsisten dalam komposisi tenaga pendidik dan peserta didik di tingkat Pendidikan Dasar (SD) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023. Persentase pendidik perempuan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara persentase pendidik laki-laki cenderung menurun. Meskipun demikian, distribusi antara peserta didik laki-laki dan perempuan relatif seimbang di setiap tahunnya. Rasio tenaga pendidik dan peserta didik juga menunjukkan stabilitas, dengan setiap pendidik bertanggung jawab terhadap sekitar 15-16 peserta didik. Penekanan pada peningkatan partisipasi perempuan sebagai pendidik menandakan pergeseran dalam dinamika tenaga pendidik di Kabupaten Batang. Dengan demikian, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap distribusi tenaga pendidik dan peserta didik guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas sistem pendidikan di wilayah tersebut.

Analisis data mengenai jumlah pendidik dan peserta didik tingkat SMP di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa pola yang menarik. Pertama, dari segi persentase pendidik, terlihat bahwa perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam jumlah pendidik di setiap tahunnya. Meskipun terjadi fluktuasi kecil dalam jumlah pendidik laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun, persentase pendidik perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2019, persentase pendidik perempuan sebesar 54,31%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 57,99%. Meskipun demikian, proporsi pendidik perempuan tetap stabil di atas 50% setiap tahunnya. Kedua, dari segi persentase peserta didik, distribusi antara peserta didik laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Meskipun terjadi fluktuasi kecil dalam jumlah total peserta didik dari tahun ke tahun, persentase peserta didik laki-laki dan perempuan cenderung berada dalam kisaran yang sama. Pada tahun 2019, persentase peserta didik laki-laki sebesar 50,51%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 51,13%. Hal ini menunjukkan

adanya akses yang merata bagi peserta didik laki-laki dan perempuan dalam pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Batang. Ketiga, dari segi rasio tenaga pendidik dan peserta didik, terlihat bahwa setiap tenaga pendidik bertanggung jawab terhadap sejumlah peserta didik yang relatif konstan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi fluktuasi kecil dalam jumlah total tenaga pendidik dan peserta didik, rasio antara tenaga pendidik dan peserta didik tetap berada dalam kisaran 1:15 hingga 1:16 setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga proporsi yang seimbang antara jumlah tenaga pendidik dan peserta didik di SMP Kabupaten Batang. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa Kabupaten Batang telah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan seimbang di tingkat SMP, dengan ketersediaan pendidik dan partisipasi peserta didik yang cukup merata antara laki-laki dan perempuan.

b. Kesehatan

Analisis pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang stabil dari 801.718 jiwa menjadi 813.791 jiwa. Meskipun pertumbuhannya relatif kecil, sekitar 0,66% dari tahun 2020 ke 2021 dan 0,84% dari tahun 2021 ke 2022, hal ini menandakan adanya kecenderungan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Kabupaten Batang memiliki proporsi penduduk sekitar 2% dari total penduduk Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam rentang antara 36.516.035 hingga 37.032.410 jiwa dari tahun 2020 hingga 2022. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Batang selama periode tahun 2020– 2022 telah menunjukkan peningkatan cukup baik yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka harapan hidup (AHH) penduduk Kabupaten Batang.

Tabel 4. 7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang 2019-2023

Laki-Laki			Perempuan			Rata-rata		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
72,84	72,89	72,93	76,58	76,65	76,70	74,69	74,74	74,79

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Analisis angka harapan hidup di Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten baik untuk laki-laki maupun perempuan, serta rata-rata keseluruhan. Untuk laki-laki, angka harapan hidup meningkat dari 72,84 tahun pada tahun 2020 menjadi 72,89 tahun pada tahun 2021, dan terus naik menjadi 72,93 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, angka harapan hidup perempuan juga mengalami peningkatan dari 76,58 tahun pada tahun 2020 menjadi 76,65 tahun pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 76,70 tahun pada tahun 2022. Rata-rata angka harapan hidup keseluruhan juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2022, meningkat dari 74,69 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,74 tahun pada tahun 2021, dan kemudian menjadi 74,79 tahun pada tahun 2022. Peningkatan ini mungkin mencerminkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan perbaikan kondisi lingkungan, serta kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat di Kabupaten Batang. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang selama periode tersebut.

Tabel 4. 8 Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Batang 2017-2020

Tahun	Bayi			Balita		
	L	P	∑	L	P	∑
2017	93	67	160	113	83	196
2018	82	59	141	98	68	166
2019	78	66	144	91	77	168
2020	85	36	121	103	45	148

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2021

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2020, Kabupaten Batang mencatat rata-rata kematian untuk bayi laki-laki adalah 84 per tahun, dan untuk bayi perempuan adalah 57 per tahun. Perlu diperhatikan bahwa terdapat penurunan dalam kematian bayi secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga 2020. Terkait rentanitas gender dalam kematian bayi, data menunjukkan bahwa bayi perempuan memiliki jumlah kematian yang lebih rendah dibandingkan bayi laki-laki, menunjukkan bahwa secara umum, bayi laki-laki cenderung lebih rentan mengalami kematian dibandingkan bayi perempuan. Untuk kematian balita, rata-rata kematian balita laki-laki adalah 101 per tahun, sementara kematian balita perempuan adalah 68 per tahun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam kematian balita dari tahun 2017 hingga 2020. Dalam konteks rentanitas gender terhadap kematian balita, data menunjukkan bahwa balita laki-laki memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan balita perempuan, menunjukkan bahwa balita laki-laki lebih rentan mengalami kematian dibandingkan balita perempuan.

Tabel 4. 9 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian (orang)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	111	110	274	106	124
2.	Jumlah Kematian Ibu Hamil	4	3	11	6	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Analisis data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menyoroti dinamika yang kompleks dalam jumlah kasus kematian ibu selama periode 2019-2023. Ditemukan bahwa jumlah kematian ibu saat melahirkan mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 mencatat puncak tertinggi dengan 274 kasus, namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2022

menjadi hanya 106 kasus, diikuti dengan sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 124 kasus. Sementara itu, meskipun dalam skala yang lebih rendah, kematian ibu dalam kondisi hamil juga menunjukkan pola yang serupa dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 11 kasus.

Tabel 4. 10 Penyebab Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian (orang)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Partus lama	-	-	-	-	-
2.	Infeksi	-	-	-	-	-
3	Hipertensi	-	-	-	-	-
4	Pendarahan	-	-	2	2	1
5	Penyebab Lainnya (covid)	-	-	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang terkait penyebab kematian ibu saat melahirkan memberikan gambaran yang penting untuk dijadikan dasar analisis. Pada tahun 2021, terdapat 3 kasus kematian ibu yang menunjukkan dua kasus disebabkan oleh pendarahan dan satu kasus disebabkan oleh COVID-19. Sementara itu, pada tahun 2022, penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan, dengan 2 kasus tercatat. Tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan dengan hanya 1 kasus kematian ibu akibat pendarahan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendasari penurunan ini, termasuk efektivitas intervensi medis, ketersediaan peralatan medis, dan perubahan dalam praktik medis.

Tabel 4. 11 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil dan Nifas di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	99,98	100	100	99,78	99,88
2.	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	99,94	99,91	99,81	99,95	99,94
3	Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	99,98	99,92	99,83	99,95	99,96
4	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	100	100	100	100	100
5	Kunjungan K4	93,39	96,43	93,64	94,83	96,32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Analisis cakupan pelayanan ibu hamil dan nifas di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 menunjukkan tingkat pelayanan yang secara umum cukup tinggi. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai angka yang sangat tinggi, dengan persentase mencapai di atas 99,7% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan maternal dan dukungan yang memadai dari tenaga kesehatan selama proses persalinan. Selain itu, cakupan pelayanan bagi ibu nifas juga mencatat angka yang tinggi, dengan persentase di atas 99,8% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang kuat dalam memberikan perawatan pasca-melahirkan kepada ibu dan bayi untuk memastikan kesehatan mereka setelah proses persalinan. Pemberian vitamin A kepada ibu nifas juga mencapai tingkat yang tinggi, dengan persentase di atas 99,9%

selama periode yang diamati. Hal ini menunjukkan kesadaran yang baik dalam upaya pencegahan defisiensi vitamin A pada ibu pasca-melahirkan, yang dapat berkontribusi pada kesehatan ibu dan bayi. Kunjungan ibu hamil (K1/K4) mencapai 100% setiap tahunnya, menunjukkan bahwa semua ibu hamil mendapatkan kunjungan pelayanan kesehatan minimal sebanyak empat kali selama masa kehamilan mereka. Ini merupakan indikator yang positif dalam memastikan pemantauan kesehatan selama kehamilan dan mengidentifikasi potensi masalah dengan cepat. Meskipun demikian, terdapat sedikit penurunan dalam kunjungan K4 dari tahun 2019 hingga 2021, namun angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023. Ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi kunjungan K4, serta upaya untuk memperbaiki aksesibilitas atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kunjungan pascamelahirkan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan ibu hamil dan nifas di Kabupaten Batang cukup baik, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan cakupan pelayanan tersebut, serta memahami dan mengatasi potensi tantangan yang mungkin muncul.

Tabel 4. 12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Dokter	20	26	46	20	24	44	17	26	43	17	28	45	2	26	46
2.	Jumlah Tanaga Medis	2	7	9	2	8	10	0	13	13	2	12	14	3	15	18
3	Jumlah Tenaga Keperawatan	83	128	211	87	131	218	87	145	232	90	147	237	89	144	233
4	Jumlah Tenaga Farmasi	1	21	22	2	24	26	1	31	32	11	108	119	5	33	38
5	Jumlah Tenaga Gizi	3	35	38	3	35	38	3	32	35	3	31	34	1	29	30
6	Jumlah Tenaga Teknisi Medis	6	28	34	11	31	42	11	37	48	11	31	42	10	34	44

7	Jumlah Tenaga Sanitasi	5	26	31	2	26	28	5	25	30	5	21	26	5	16	21
8	Jumlah Kesehatan Masyarakat	9	18	27	8	16	24	9	14	23	8	19	27	115	297	412

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Data yang disajikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang memberikan gambaran yang komprehensif tentang jumlah tenaga kesehatan dari tahun 2019 hingga 2023. Mulai dari dokter, tenaga medis, keperawatan, farmasi, gizi, teknisi medis, sanitasi, hingga kesehatan masyarakat, data ini mencatat setiap jenis tenaga kesehatan baik berdasarkan jenis kelamin maupun total. Jumlah dokter, yang merupakan tenaga medis utama, mengalami variasi dalam rentang 44 hingga 46 selama periode lima tahun tersebut. Sementara itu, tenaga keperawatan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 211 menjadi 233. Terlihat juga peningkatan yang signifikan pada jumlah tenaga farmasi dari 22 menjadi 38. Meskipun begitu, jumlah tenaga gizi cenderung stabil dalam kisaran 30 hingga 38. Begitu juga dengan tenaga teknisi medis yang relatif stabil antara 34 hingga 48. Data juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga sanitasi cenderung stabil dalam rentang 21 hingga 31. Namun, yang paling mencolok adalah peningkatan yang signifikan pada jumlah tenaga kesehatan masyarakat dari 27 menjadi 412 selama periode tersebut.

Tabel 4. 13 Jumlah Penduduk di Kabupaten Batang (Jiwa), 2021-2023

Wilayah	Jumlah Penduduk		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	801.718	807.005	813.791

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2024

Dari data, jumlah dokter total pada tahun 2023 adalah 46 orang. Jumlah tenaga medis, yang mencakup berbagai profesi medis, mencapai 18 orang. Tenaga keperawatan tercatat sebanyak 233 orang. Jumlah tenaga farmasi adalah 38 orang, sementara tenaga gizi berjumlah antara 30 hingga 38 orang. Tenaga teknisi medis mencapai 48 orang, sedangkan tenaga sanitasi berjumlah antara 21 hingga 31 orang. Terakhir, tenaga kesehatan masyarakat mencapai 412 orang. Sementara itu, populasi Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah sebanyak 813.791 orang. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa dalam beberapa aspek, seperti jumlah dokter dan tenaga farmasi, Kabupaten Batang mungkin

belum memiliki cukup tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Namun, untuk aspek lain seperti tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan masyarakat, jumlah tenaga kesehatan tampak lebih memadai.

Tabel 4. 14 Jumlah Balita Gizi Buruk , Gizi Kurang, Gizi Lebih dan Balita yang mendapat Perawatan di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	146	102	126	117	186
2.	Jumlah Balita Gizi Kurang	3883	3802	3604	4689	2.865
3	Jumlah Balita Gizi Lebih	2484	1288	1060	987	870
4	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	146	102	126	117	186

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Data mengenai jumlah balita dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 memberikan pemahaman yang penting tentang kondisi gizi pada anak usia dini di wilayah tersebut. Jumlah balita dengan gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih mengalami variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa Kabupaten Batang masih memiliki tantangan dalam menangani masalah gizi pada balita, terutama dalam kasus gizi buruk dan gizi kurang yang memiliki jumlah yang cukup besar. Penting untuk dicatat bahwa jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan sistem perawatan kesehatan di wilayah tersebut. Meskipun jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan tercatat setara dengan jumlah balita gizi buruk secara keseluruhan selama periode tersebut,

masih ada ruang untuk meningkatkan akses dan kualitas perawatan bagi balita yang menderita masalah gizi.

Tabel 4. 15 Jumlah Jumlah Penderita HIV/AIDs di Kabupaten Batang 2019-2023

2019			2020			2021			2022			2023		
L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
35	46	81	37	44	81	37	34	71	67	62	129	75	58	133

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Analisis data mengenai jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tren dan dinamika penyebaran penyakit ini di wilayah tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020, terlihat bahwa jumlah total penderita HIV/AIDS relatif stabil, tetapi terdapat fluktuasi dalam jumlah laki-laki dan perempuan yang terkena dampak. Pada tahun 2019, jumlah total penderita adalah 81, dengan 35 laki-laki dan 46 perempuan. Di tahun 2020, meskipun jumlah total penderita tetap 81, terjadi perubahan dalam distribusi jenis kelamin, di mana jumlah laki-laki meningkat menjadi 37 dan jumlah perempuan mengalami penurunan menjadi 44. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah total penderita HIV/AIDS menjadi 71. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah laki-laki dan perempuan yang terkena dampak, masing-masing menjadi 37 dan 34. Namun, perlu dicatat bahwa penurunan jumlah penderita pada tahun ini tidak sejalan dengan tren global, yang menunjukkan peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di beberapa wilayah. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan yang dramatis dalam jumlah total penderita HIV/AIDS, mencapai 129. Lonjakan ini disebabkan oleh peningkatan yang besar pada jumlah laki-laki yang terinfeksi, mencapai 67, sementara jumlah perempuan juga mengalami peningkatan menjadi 62. Lonjakan signifikan ini memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini di Kabupaten Batang. Pada tahun 2023, meskipun

jumlah total penderita meningkat menjadi 133, terjadi penurunan pada jumlah laki-laki yang terkena dampak, sementara jumlah perempuan tetap relatif stabil. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa HIV/AIDS tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Kabupaten Batang. Data ini menyoroti fluktuasi yang signifikan dalam jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Batang selama periode lima tahun tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap fluktuasi ini antara lain pengetahuan tentang penyakit, akses terhadap layanan kesehatan, perilaku berisiko, dan program-program pencegahan yang tersedia.

Tabel 4. 16 Jumlah Posyandu di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kader Posyandu	-	-	-	6150	6170
2.	Jumlah Posyandu Pratama	0	7	7	4	2
3	Jumlah Posyandu Madya	243	205	191	199	118
4	Jumlah Posyandu Purnama	378	417	397	408	418
5	Jumlah Posyandu Mandiri	606	601	635	623	696

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Data mengenai jumlah kader Posyandu dan jumlah Posyandu di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2024 memberikan gambaran yang penting tentang keberlangsungan program kesehatan masyarakat di tingkat desa. Jumlah kader Posyandu mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 6150 orang menjadi 6170 orang pada tahun 2023. Namun, terdapat variasi dalam jumlah Posyandu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri selama

periode tersebut. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah Posyandu Pratama tetap stabil sebanyak 7, tetapi pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan menjadi 4 dan 2, menunjukkan kemungkinan adanya penurunan minat atau dukungan terhadap program Posyandu di tingkat dasar. Sementara itu, jumlah Posyandu Madya menurun secara signifikan dari 243 pada tahun 2019 menjadi 118 pada tahun 2023, sedangkan jumlah Posyandu Purnama mengalami fluktuasi kecil selama periode tersebut. Di sisi lain, jumlah Posyandu Mandiri menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023, mencapai 696 pada tahun terakhir.

Tabel 4. 17 Jumlah Sanitasi Layak di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sanitasi layak	199.860	199.882	207.814	203.344	242.258

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, 2024

Data mengenai jumlah sanitasi layak di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang umumnya positif dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang memadai. Pada tahun 2019, jumlah sanitasi layak tercatat sebanyak 199.860 unit, yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 199.882 unit pada tahun 2020. Tren peningkatan ini berlanjut dengan lebih signifikan pada tahun 2021, di mana jumlah sanitasi layak meningkat menjadi 207.814 unit. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 203.344 unit, namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 242.258 unit. Lonjakan yang signifikan pada tahun 2023 menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang memadai.

c. Keluarga Berencana

Pencapaian Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Masyarakat (PPM) Peserta KB Baru menggambarkan perkiraan permintaan masyarakat

terhadap layanan KB bagi pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Program PPM ini dirancang untuk memberikan layanan KB kepada pasangan usia subur yang baru memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Dalam konteks Kabupaten Batang, PPM mencatat jumlah peserta KB baru yang menerima layanan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Pencapaian PPM Peserta KB Baru menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program KB di suatu wilayah. Tingkat pencapaian yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya berencana keluarga dan akses terhadap layanan KB yang aman dan terpercaya. Hal ini juga mencerminkan efektivitas dari upaya penyuluhan dan promosi KB yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

Selain itu, melalui PPM, pemerintah dapat memantau tren penggunaan metode kontrasepsi baru dan memastikan bahwa pasangan usia subur memiliki akses yang memadai terhadap berbagai opsi kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh karena itu, pencapaian PPM Peserta KB Baru tidak hanya mencerminkan permintaan masyarakat terhadap layanan KB, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. 18 Pencapaian PPM Peserta Keluarga Berencana Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Batang 2020-2022

Tahun	IUD	MOP*	MOW*	Susuk	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah	PPM	%
2020	1.288	2	170	4.527	7.478	2.907	807	17.179	21.450	80,09
2021	1.276	9	133	17.743	5.951	2.580	692	16 106	25 566	63
2022	1.164	21	82	3.185	12.146	7.512	2.105	26.215	27.750	94,47

*MOP: Male Operation Medic

*MOW: Female Operation Medic

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2023

Data pencapaian peserta Keluarga Berencana (KB) baru menurut metode kontrasepsi dan kecamatan di Kabupaten Batang dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan tren yang menarik dalam penggunaan metode kontrasepsi dan pencapaian program KB di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah peserta KB baru yang mencapai 17.179. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik, diikuti oleh susuk dan pil. Persentase pencapaian Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Masyarakat (PPM) mencapai 80,09%, menunjukkan kesuksesan dalam mencapai target pemerintah. Pada tahun 2021, meskipun jumlah peserta KB baru sedikit menurun menjadi 16.106, namun persentase pencapaian PPM menurun menjadi 63%. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan tetap suntik, namun terjadi penurunan dalam penggunaan susuk. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah peserta KB baru menjadi 26.215, dengan persentase pencapaian PPM mencapai 94,47%. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik, diikuti oleh pil dan suntik. Jumlah peserta KB baru terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB dan akses terhadap metode kontrasepsi yang beragam di Kabupaten Batang.

d. Sosial

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan dalam suatu populasi. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendapatan. Penduduk dengan pendapatan rendah cenderung memiliki kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, serta ketimpangan ekonomi yang besar. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan perawatan kesehatan yang terjangkau juga dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Tabel 4. 19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang 2021-2023

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	9,68	8,98	8,92

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Tingkat persentase penduduk miskin merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam periode tiga tahun berturut-turut, dari 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang telah mencatat penurunan yang signifikan dalam tingkat persentase penduduk miskin. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 9,68%, menunjukkan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi. Namun demikian, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai stakeholder terkait telah membuahkan hasil yang positif. Hal ini terbukti dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2022, di mana tingkat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,98%. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023, di mana tingkat kemiskinan mencapai angka

8,92%. Penurunan ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi di antara masyarakat Kabupaten Batang. Meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi, penurunan yang konsisten dalam tingkat kemiskinan menunjukkan arah yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Batang.

Pengembangan kesejahteraan sosial merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan material, spiritual, dan sosial dari setiap warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya. Ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai program dan layanan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di antaranya melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdapat istilah yang dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang merujuk kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan bantuan sosial. Kelompok ini meliputi masyarakat miskin, kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, lanjut usia, dan perempuan terpinggirkan, serta penyandang disabilitas. Penyediaan layanan sosial yang tepat dan terfokus kepada PMKS menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sehingga mereka dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan meraih potensi penuhnya sebagai anggota masyarakat. Perincian perubahan jumlah penduduk miskin dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Jumlah Penyandang PMKS di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Anak Balita Terlantar	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Anak Terlantar	-	-	-	-	-	-	27	24	51	-	15	15	-	-	-
3	Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	6	10	16	7	18	25	7	5	12	3	27	30	32	45	77
4	Jumlah Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	-	-	-	-	-	-	171	137	308	140	118	258	15	15	30
6	Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
8	Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	_	222	-	-	221	_	_	_	_
10	Jumlah Korban Tindak Kekerasan	0	7	7	0	6	6	0	19	19	0	16	16	0	6	6
11	Jumlah Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	-	-	-	-	-	-	103	222	325	104	219	323	-	-	-
13	Jumlah Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
14	Jumlah Eks Tuna Susila yang Mendapatkan Ketrampilan dan Bantuan UEP/KUBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jumlah Gelandangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
17	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
18	Jumlah Penyandang Disabilitas	-	-	-	-	-	-	491	352	843	497	334	831	-	-	-
19	Jumlah Pemulung	-	-	-	-	-	-	15	10	25	15	10	25	-	-	-
20	Jumlah Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
22	Jumlah Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	13	5	-	5	8	-	33	10	-
24	Jumlah Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang, 2024

Data mengenai jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi sosial masyarakat setempat. Berbagai aspek kehidupan sosial dipantau dan diidentifikasi untuk memahami tingkat kerentanan dan kebutuhan yang perlu ditangani lebih lanjut. Pada tahun 2021, terdapat 4 orang perempuan anak balita yang terlantar, menunjukkan perlunya perlindungan khusus bagi kelompok anak balita. Selain itu, jumlah anak terlantar pada tahun yang sama mencapai 27 laki-laki dan 24 perempuan, menyoroti kompleksitas masalah sosial di antara kelompok anak-anak. Sementara itu, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2023 yaitu 32 laki-laki dan 45 perempuan. Adapun jumlah anak dengan kedisabilitasan (ADK) juga menjadi perhatian, dengan jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar pada tahun 2021 yaitu 491 laki-laki dan 352 perempuan, serta mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 497 laki-laki dan 334 perempuan. Terdapat fluktuasi jumlah kasus KDRT di Kabupaten Batang, dengan puncaknya pada tahun 2021 (19 kasus) dan penurunan signifikan pada tahun 2023 (6 kasus). Semua kasus KDRT yang tercatat menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam konteks korban kekerasan rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Jumlah lanjut usia terlantar juga signifikan, terutama pada tahun 2021 dengan 103 laki-laki dan 222 perempuan. Terlebih lagi, data menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah tersebut menunjukkan perlunya penanganan khusus terhadap masalah kriminalitas remaja di wilayah tersebut. Selain itu, data juga mencakup aspek lain dari PMKS, seperti jumlah tuna susila, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), dan lainnya, yang semuanya memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Batang.

Tabel 4. 21 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Batang 2019-2023

TAHUN	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jenis Kelamin	
		L	P
2019	30	**6**	**24**
2020	49	**20**	**29**
2021	44	**13**	**31**
2022	34	**3**	**31**
2023	84	**41**	**43**

Sumber: DP3AP2KB

Analisis data Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan. Dari total kasus yang dilaporkan selama periode tersebut, perempuan mendominasi sebagai korban, dengan persentase yang cenderung tinggi. Pada tahun 2019, dari 30 kasus yang tercatat, 24 di antaranya melibatkan perempuan. Tren serupa terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan proporsi kasus yang melibatkan perempuan umumnya lebih tinggi daripada yang melibatkan laki-laki. Meskipun terdapat kasus yang melibatkan laki-laki, jumlahnya cenderung lebih rendah, kecuali pada tahun 2023 di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Analisis ini menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Batang, serta perumusan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menanggulangi ketimpangan gender dan melindungi mereka dari kekerasan serta perlakuan yang merugikan.

2. Ekonomi

a. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase individu dalam kelompok usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ini mencerminkan seberapa besar proporsi populasi yang aktif dalam pasar tenaga kerja, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pemantauan

dan analisis terhadap tingkat ini penting bagi perancangan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah tingkat partisipasi Angkatan kerja penduduk di Kabupaten Batang tahun 2021-2023:

Tabel 4. 21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen), 2021-2023

Wilayah	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	71,40	74,90	76,62

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Batang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi mencapai 71,40%, kemudian meningkat menjadi 74,90% pada tahun 2022, dan mencapai puncak tertinggi sebesar 76,62% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan sektor industri, pembangunan infrastruktur, serta upaya pemerintah dalam mengembangkan program-program ketenagakerjaan. Peningkatan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai indikator positif bagi perkembangan ekonomi lokal, karena menandakan adanya peluang kerja yang lebih banyak bagi penduduk setempat.

Tabel 4. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2021-2023

Wilayah	Persentase Pengangguran Terbuka		
	2021	2022	2023
Kabupaten Batang	6,59	6,64	6,06

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,59%, mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,64% pada tahun 2022, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 6,06% pada tahun 2023. Meskipun fluktuasi ini tidak

terlalu signifikan, perubahan kecil ini dapat mengindikasikan adanya dinamika dalam kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut selama periode tersebut. Secara lebih lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Batang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 23 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Batang (Persen), 2021-2023

Bekerja			Pengangguran Terbuka			Total Angkatan Kerja		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
402.320	426.004	459.118	28.370	30.301	29.619	430.690	456.305	488.737

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Dalam rentang tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Batang mencatat peningkatan jumlah penduduk yang bekerja secara signifikan, dari 402.320 pada tahun 2021 menjadi 459.118 pada tahun 2023. Selama periode yang sama, jumlah penduduk yang menganggur terbuka juga mengalami fluktuasi, mulai dari 28.370 pada tahun 2021, mencapai titik tertinggi 30.301 pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 29.619 pada tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah pengangguran terbuka, total angkatan kerja, yang mencakup penduduk yang bekerja dan yang menganggur, terus meningkat dari 430.690 pada tahun 2021 menjadi 488.737 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sementara terjadi peningkatan dalam kesempatan kerja, tantangan dalam mengurangi pengangguran terbuka masih perlu ditangani lebih lanjut untuk memastikan partisipasi yang lebih besar dari angkatan kerja dalam perekonomian Kabupaten Batang.

Tabel 4. 24 Jumlah Peserta Pelatihan di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Peserta Pelatihan	101	187	288	9	71	80	102	106	208	128	136	264	155	266	421

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, 2023

Dalam periode 2019-2023, data peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Dalam tahun 2019, tercatat sebanyak 288 peserta, dengan mayoritas peserta adalah perempuan (187 peserta) dibandingkan dengan laki-laki (101 peserta). Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020, di mana jumlah peserta turun menjadi 80 peserta, dengan mayoritas juga adalah perempuan (71 peserta). Meskipun demikian, tren kenaikan jumlah peserta kembali terjadi pada tahun 2021, dengan jumlah peserta mencapai 208 peserta, di mana jumlah laki-laki hampir seimbang dengan jumlah perempuan. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan jumlah total peserta mencapai 421 orang, dimana perempuan masih mendominasi jumlah peserta. Analisis data menunjukkan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan mendapat respons yang positif dari masyarakat, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja di Kabupaten Batang, serta upaya pemerintah daerah dalam memberikan akses yang lebih luas terhadap pelatihan-pelatihan yang bermanfaat.

b. Koperasi dan UMKM

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, baik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi maupun sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Batang, sektor koperasi dan UMKM menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi, menyumbang secara signifikan terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Batang telah menyaksikan perkembangan yang pesat dalam sektor ini, dengan bertumbuhnya jumlah koperasi dan UMKM yang beroperasi di berbagai bidang usaha. Dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai program pembinaan telah mendorong pertumbuhan dan penguatan kapasitas koperasi serta UMKM di wilayah ini.

Dari data yang dipilah, kita dapat melihat perkembangan koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023. Perhatian khusus diberikan pada jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dibina oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Data menunjukkan bahwa jumlah UMK yang dibina terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2021. Namun, terdapat fluktuasi kecil pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, total UMK yang dibina tetap relatif stabil pada kisaran 84.000 hingga 84.200 orang.

Selain itu, seluruh UMKM aktif juga telah dibina oleh Pemda, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung sektor UMKM di wilayah tersebut. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah pengurus koperasi aktif, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Namun, jumlah anggota koperasi aktif menunjukkan tren yang berbeda, dengan penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023.

Hal yang menarik diperhatikan adalah tidak adanya penerimaan kredit dari lembaga keuangan yang tercatat selama periode tersebut. Hal ini mungkin menunjukkan tantangan dalam akses keuangan bagi UMKM dan koperasi di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, analisis data pilah menyoroti kemajuan yang signifikan dalam pembinaan UMK oleh Pemda, namun juga menunjukkan area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti partisipasi anggota koperasi dan akses keuangan bagi UMKM.

Tabel 4. 25 Koperasi dan UMKM di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Dibina Oleh Pemda	140	645	785	195	720	915	39670	44891	84011	39630	44796	84146	39575	44711	84286
2.	Jumlah UMKM Aktif yang Dibina Oleh Pemda	0	0		0	0		0	0		0		0	0	0	84286
3.	Jumlah UMKM yang memiliki ijin yang Dibina Oleh Pemda	0	0		0	0		0	0		0		0	0	0	84286
4.	Jumlah Pengurus Koperasi Aktif	0	0	0	338	408	746	292	335	627	216	208	434	264	270	534
5.	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	0	0	0	41307	36695	78002	37594	35360	72954	26483	25151	51634	30174	31185	61359
6.	Jumlah Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKMKabupaten Batang, 2024

c. Penanaman Modal

Tabel 4. 26 Jumlah Investor PMDN dan PMA/PMDN di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Investor PMDN	24	2	26	50	0	50	56	2	58	16	6	22	11	3	14
2.	Jumlah Investor PMA/PMDN	7	0	7	3	12	15	1	5	6	6	0	6	16	0	16

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Data tersebut mencatat jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau PMDN di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023. Untuk investor PMDN, jumlahnya mengalami variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah investor PMDN mencapai puncaknya dengan total 50 investor, sementara pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah investor PMDN hanya sebanyak 14, menunjukkan penurunan yang cukup drastis dalam minat investor lokal untuk menanamkan modal di kabupaten tersebut. Penurunan tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, atau ketidakpastian pasar. Sementara itu, untuk investor PMA/PMDN, jumlahnya juga bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah investor PMA/PMDN mencapai puncaknya dengan total 15 investor, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2023, jumlah investor PMA/PMDN kembali meningkat menjadi 16 investor, menunjukkan adanya minat yang terus tumbuh dari investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Batang.Analisis data ini menunjukkan perubahan minat investor, baik lokal maupun asing, dalam berinvestasi di Kabupaten Batang selama periode tersebut. Fluktuasi jumlah investor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan domestik, kebijakan pemerintah, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kepastian investasi.

d. Pertanian

Tabel 4. 27 Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kelompok Tani Tanaman Pangan	918	919	925	944	944
2.	Jumlah Kelompok Tani Ternak	227	230	241	279	279
3	Jumlah Kelompok Wanita Tani	263	263	266	275	275

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2024

Data tersebut mencatat jumlah kelompok tani di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023, yang dibagi menjadi kelompok tani tanaman pangan, kelompok tani ternak, dan kelompok wanita tani. Pertama, untuk kelompok tani tanaman pangan, jumlahnya mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 918 kelompok tani, dan angka ini meningkat menjadi 944 pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang baik dari masyarakat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Batang. Kedua, untuk kelompok tani ternak, jumlahnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 227 kelompok tani ternak, dan angka ini meningkat menjadi 279 pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini mungkin mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sektor peternakan di wilayah tersebut guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Ketiga, untuk kelompok wanita tani, jumlahnya relatif stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Terdapat 263 kelompok wanita tani pada tahun 2019, dan angka ini sedikit meningkat menjadi 275 pada tahun 2022 dan 2023. Keterlibatan wanita dalam sektor pertanian merupakan hal yang penting untuk

meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya peningkatan atau stabilnya jumlah kelompok tani di Kabupaten Batang selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, baik dalam tanaman pangan maupun ternak, serta upaya untuk meningkatkan peran wanita dalam pembangunan pertanian. Dengan memperkuat kelompok-kelompok tani ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Tabel 4. 28 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	PPL	32	18	**50**	30	15	**45**	66	29	**95**	59	32	**91**	60	31	**91**

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2024

Data tersebut mencatat jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023, yang dibagi berdasarkan jenis kelamin. Pertama, jumlah total PPL dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2019, terdapat 50 PPL (32 laki-laki dan 18 perempuan), kemudian mengalami penurunan menjadi 45 pada tahun 2020 (30 laki-laki dan 15 perempuan). Namun, jumlah PPL kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 95 (66 laki-laki dan 29 perempuan). Selanjutnya, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, tetapi jumlah total PPL tetap stabil di sekitar 90-an, dengan 91 PPL pada kedua tahun tersebut. Kedua, secara khusus, jika dilihat dari perbandingan antara jumlah PPL laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa pada setiap tahunnya jumlah PPL laki-laki cenderung lebih tinggi daripada jumlah PPL perempuan. Meskipun demikian, proporsi perempuan yang menjadi PPL meningkat dari tahun 2019 hingga 2021, yang mungkin mencerminkan adanya kebijakan atau program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang penyuluhan pertanian. Dari

segi analisis, fluktuasi jumlah PPL dari tahun ke tahun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan anggaran, kebijakan pemerintah, atau kebutuhan lapangan. Meskipun demikian, stabilnya jumlah total PPL di sekitar 90-an menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Batang telah melakukan upaya yang cukup baik dalam mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia di bidang penyuluhan pertanian. Selain itu, peningkatan proporsi perempuan sebagai PPL juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya inklusi gender dalam pembangunan pertanian lokal. Dengan demikian, peran PPL diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Batang.

e. Perikanan dan Kelautan

Tabel 4. 29 Jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, Poklaksar, Pengurus Pokmaswas di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Nelayan	805	0	805	818	0	818	843	0	843	1088	0	1088	678	0	678
2.	Jumlah Pembudidaya Ikan													85	1	86
3.	Jumlah Poklaksar	3	638	641	3	638	641	3	638	641	3	638	641	3	638	641
4.	Jumlah pengurus Pokmaswas	37	5	42	37	5	42	37	5	42	37	5	42	37	5	42

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2024

Analisis data mengenai jumlah nelayan, pembudidaya ikan, poklaksar, dan pengurus pokmaswas di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 menggambarkan beberapa pola yang menarik. Pertama, jumlah nelayan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat 805 nelayan, yang kemudian meningkat menjadi 818 pada tahun 2020. Namun, jumlahnya kembali meningkat tajam pada tahun 2022, mencapai 1.088 nelayan, sebelum kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 678 nelayan pada tahun 2023. Fluktuasi ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, cuaca, atau perubahan kebijakan terkait sektor perikanan. Kedua, jumlah pembudidaya ikan menunjukkan data

yang stabil selama periode tersebut. Hanya pada tahun 2023, terdapat sedikit peningkatan jumlahnya menjadi 86, dengan sebagian besar pembudidaya ikan adalah laki-laki. Ketiga, jumlah poklaksar (kelompok nelayan) menunjukkan kestabilan dari tahun ke tahun, dengan total 641 poklaksar selama periode 2019-2023. Ini menunjukkan adanya komunitas yang terorganisir dengan baik di kalangan nelayan untuk mengatasi berbagai masalah dan memperjuangkan kepentingan bersama. Keempat, jumlah pengurus pokmaswas (kelompok masyarakat sadar wisata) juga menunjukkan kestabilan dalam jumlahnya selama periode tersebut. Dengan total 42 pengurus, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola dan mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Batang. Secara keseluruhan, data tersebut memberikan gambaran tentang dinamika sektor perikanan dan pariwisata di Kabupaten Batang. Meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa kategori, keberadaan organisasi seperti poklaksar dan pokmaswas menunjukkan adanya upaya komunitas untuk memperkuat sektor-sektor tersebut dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

f. Perdagangan

Berikut adalah perkembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023. Data menunjukkan jumlah pemilik los di pasar, pemilik warung, pemilik kios, pedagang PKL, dan pemberian bantuan gerobak. Pertama, dari segi pemilik los di pasar, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 5.485 pemilik los, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Kedua, jumlah pemilik warung dan kios cenderung stabil selama periode tersebut. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, total jumlah pemilik warung dan kios tetap sama dari tahun 2019 hingga 2023. Ketiga, data menunjukkan bahwa tidak ada pemberian bantuan gerobak selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan perluasan usaha mandiri tanpa bantuan langsung dari pemerintah. Keempat, jumlah pedagang PKL juga menunjukkan

kestabilan dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, total jumlah pedagang PKL tetap sama sepanjang periode tersebut.Kelima, tidak ada pelatihan pengolahan dan penyajian makanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Secara keseluruhan, data menunjukkan perkembangan yang stabil dalam UDKM di Kabupaten Batang. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam beberapa kategori, namun secara keseluruhan, sektor UDKM menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil selama periode tersebut.

Tabel 4. 30 Usaha Dagang Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Pemilik Los di Pasar	820	1665	2385	472	1100	1572	1682	3575	5257	1857	3450	5307	1700	3785	5485
2.	Jumlah Pemilik Warung	27	16	43	23	20	43	23	20	43	25	18	43	25	18	43
3.	Jumlah Pemilik Kios	391	795	1186	1649	3848	5497	481	1021	1502	526	976	1502	492	1094	1586
4.	Jumlah Pemberian Bantuan Gerobak															
5.	Jumlah Pedagang PKL	65	91	156	60	96	156	60	96	156	66	90	156	66	90	156
6.	Jumlah Pelatihan Pengolahan dan Penyajian Makanan															

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKMKabupaten Batang, 2024

3. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan

a. Politik (KPU, Kesbangpol)

Kabupaten Batang, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola dinamika politiknya. Menyajikan data terkait kondisi politik di Kabupaten Batang memungkinkan untuk memahami gambaran yang lebih jelas tentang proses politik yang berkembang di wilayah tersebut. Data ini mencakup beberapa aspek kunci, termasuk keterlibatan perempuan di Parlemen dalam persentase, jumlah anggota DPRD Provinsi, jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta informasi tentang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Selain itu, data juga mencakup informasi tentang pengurus partai politik dan organisasi di wilayah tersebut. Dengan menyajikan data-data ini, dapat dipahami lebih dalam tentang struktur politik dan dinamika kekuatan politik di Kabupaten Batang, yang memberikan landasan penting untuk analisis lebih lanjut tentang proses demokratisasi dan perwakilan politik di tingkat lokal.

Tabel 4. 31 Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen), 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Kabupaten Batang	15,56	15,91	15,56

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Data menunjukkan keterlibatan perempuan di Parlemen Kabupaten Batang dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang relatif kecil. Pada tahun 2021, persentase keterlibatan perempuan di Parlemen adalah sebesar 15,56%, meningkat sedikit menjadi 15,91% pada tahun 2022, namun kemudian kembali turun menjadi 15,56% pada tahun 2023. Meskipun ada kenaikan kecil pada tahun 2022, fluktuasi persentase yang rendah menunjukkan adanya konsistensi relatif dalam keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Batang selama periode tersebut. Analisis ini menyoroti beberapa hal. Pertama, meskipun terdapat peningkatan yang sedikit pada tahun 2022, keterlibatan perempuan di Parlemen masih relatif rendah dan

cenderung stabil dalam periode tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan representasi perempuan dalam proses politik di tingkat legislatif. Kedua, fluktuasi yang kecil menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan mungkin belum mencapai titik kritis yang signifikan. Perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik.

Tabel 4. 32 Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Batang, 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi	6	0	**6**	6	0	**6**	6	0	**6**	6	0	**6**	6	0	**6**
2.	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota	38	7	**45**	38	7	**45**	38	7	**45**	38	7	**45**	38	7	**45**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, 2024

Data menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Batang memiliki sejumlah anggota yang mewakili daerah tersebut di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selama periode tersebut, jumlah anggota tersebut tetap konsisten, yaitu enam orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batang memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi, karena jumlah wakilnya relatif sedikit. Di sisi lain, dalam DPRD Kabupaten Batang sendiri, terjadi fluktuasi dalam jumlah anggota dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 38 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, sehingga total anggotanya adalah 45 orang. Meskipun demikian, data tersebut tidak menunjukkan tren yang signifikan selama periode lima tahun. Analisis data menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam DPRD Kabupaten Batang masih rendah, dengan hanya sejumlah kecil perempuan yang terpilih sebagai anggota. Hal ini menggambarkan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik lokal. Perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik, baik sebagai calon maupun pemilih, untuk mencapai representasi yang lebih seimbang di

semua tingkatan pemerintahan. Meskipun jumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Batang tidak berubah secara signifikan selama periode lima tahun, analisis data ini memberikan gambaran tentang dinamika politik di Kabupaten Batang. Upaya untuk memperkuat representasi dan partisipasi masyarakat, terutama perempuan, di dalam lembaga-lembaga legislatif perlu terus ditingkatkan guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis.

Tabel 4. 33 Jumlah Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Batang, 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Pengurus Harian PKS	4	6	**10**	4	6	**10**	4	6	**10**	4	6	**10**	4	6	**10**
2.	Jumlah Pengurus Harian PAN	17	8	**25**	17	8	**25**	17	8	**25**	17	8	**25**	17	8	**25**
3.	Jumlah Pengurus Harian PDIP	13	6	**19**	13	6	**19**	13	6	**19**	13	6	**19**	13	6	**19**
4.	Jumlah Pengurus Harian PKB	34	16	**50**	34	16	**50**	34	16	**50**	34	16	**50**	34	16	**50**
5.	Jumlah Pengurus Harian GOLKAR	36	22	**58**	36	22	**58**	36	22	**58**	36	22	**58**	36	22	**58**
6.	Jumlah Pengurus Harian NASDEM	18	11	**29**	18	11	**29**	18	11	**29**	18	11	**29**	18	11	**29**
7.	Jumlah Pengurus Harian PPP	18	7	**25**	18	7	**25**	18	7	**25**	18	7	**25**	18	7	**25**
8.	Jumlah Pengurus Harian HANURA	9	7	**16**	9	7	**16**	9	7	**16**	9	7	**16**	9	7	**16**
9.	Jumlah Pengurus Harian Demokrat	28	16	**44**	28	16	**44**	28	16	**44**	28	16	**44**	28	16	**44**
10.	Jumlah Pengurus Harian GERINDRA	22	10	**32**	22	10	**32**	22	10	**32**	22	10	**32**	22	10	**32**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, 2024

Data tersebut mencakup jumlah pengurus harian partai politik di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023. Dari data tersebut, terlihat variasi dalam jumlah pengurus harian dari berbagai partai politik yang aktif di daerah tersebut. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memiliki jumlah pengurus harian sebanyak 10 orang, dengan mayoritas di antaranya adalah laki-laki. Sementara itu, PAN (Partai Amanat Nasional) memiliki jumlah yang sedikit lebih tinggi, yaitu 25 orang, dengan sebagian besar juga adalah laki-laki. Partai

lainnya, seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan GOLKAR (Partai Golongan Karya), memiliki jumlah pengurus harian yang cukup signifikan, masing-masing 19, 50, dan 58 orang. Terlihat bahwa GOLKAR memiliki jumlah pengurus harian terbanyak dibandingkan dengan partai lainnya. Meskipun demikian, partai-partai seperti NASDEM, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), HANURA, Demokrat, dan GERINDRA juga memiliki jumlah pengurus harian yang cukup representatif, dengan masing-masing memiliki 29, 25, 16, 44, dan 32 orang. Analisis data menunjukkan bahwa partai-partai politik utama di Kabupaten Batang memiliki dukungan yang kuat dari pengurus harian, yang mewakili upaya mereka untuk membangun basis yang solid dan aktif di tingkat lokal. Jumlah pengurus harian yang cukup besar dari berbagai partai politik juga mencerminkan dinamika politik yang ada di daerah tersebut, serta kompetisi yang ketat antarpartai dalam memperoleh dukungan dan pengaruh di tingkat lokal.

Analisis representasi perempuan dalam badan pengurus harian partai politik di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang menarik. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa secara keseluruhan, jumlah pengurus harian perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pengurus harian laki-laki di hampir semua partai politik yang tercatat. Dari 10 partai politik yang disebutkan, hanya PKS dan PDIP yang memiliki jumlah pengurus harian perempuan lebih besar dari pengurus harian laki-laki. Meskipun demikian, perbedaan antara jumlah pengurus harian perempuan dan laki-laki pada kedua partai tersebut tidak signifikan, dengan PKS memiliki perbandingan 4:6 dan PDIP memiliki perbandingan 13:6. Sementara itu, pada partai-partai lainnya, jumlah pengurus harian laki-laki jauh lebih dominan daripada jumlah perempuan. Misalnya, pada GOLKAR, hanya 22 dari total 58 pengurus harian yang perempuan. Hal yang serupa terjadi pada PAN, PKB, dan Demokrat, di mana jumlah pengurus harian perempuan juga merupakan minoritas dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kehadiran perempuan dalam struktur

kepengurusan partai politik, namun peran mereka masih belum seimbang dengan peran laki-laki. Hal ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam meraih posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan di dalam struktur politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam badan pengurus harian partai politik, sehingga kepentingan dan pandangan mereka juga dapat terwakili dengan lebih baik dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Tabel 4. 34 Jumlah Pengurus LSM/Ormas/Organisasi Profesi (Yang terdaftar Badan Hukum Kemenkumham RI) Kabupaten Batang, 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah Pengurus LSM/Ormas/Organisasi Profesi	107	22	**129**	132	24	**156**	159	27	**186**	175	29	**204**	175	29	**204**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, 2024

Analisis jumlah pengurus LSM/Ormas/Organisasi Profesi di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, total pengurus mencapai 129 orang, dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 107 laki-laki dan 22 perempuan. Tren peningkatan terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2020, total pengurus meningkat menjadi 156 orang, dan terus bertambah menjadi 186 orang pada tahun 2021. Peningkatan jumlah pengurus terus berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana total pengurus mencapai 204 orang pada kedua tahun tersebut. Menariknya, dalam periode tersebut, komposisi antara pengurus laki-laki dan perempuan tetap sama, yaitu 175 laki-laki dan 29 perempuan. Tren ini menunjukkan bahwa kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan organisasi masyarakat sipil, LSM, Ormas, dan Organisasi Profesi di Kabupaten Batang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, perbedaan jumlah antara pengurus laki-laki dan perempuan masih cukup signifikan, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam struktur kepengurusan masih

perlu diperhatikan lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dalam kegiatan pengurus LSM/Ormas/Organisasi Profesi, akan tercipta representasi yang lebih inklusif dan beragam dalam proses pembuatan keputusan dan implementasi program-program organisasi tersebut.

b. Hukum (Polres, Rutan, Kejaksaan, Pengadilan)

Tabel 4. 35 Banyaknya Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kabupaten Batang, 2019-2021

No	Uraian	2019				2020				2021			
		K	N	T	∑	K	N	T	∑	K	N	T	∑
1.	LAPAS KELAS II B BATANG	217	198	217	**415**	217	212	75	287	217	198	217	**415**

*K: Kapasitas, N: Napi, T: Tahanan

Sumber: BPS Jawa Tengah, 20222

Selama periode 2019 hingga 2021, Lapas Kelas II B Batang mencatat sejumlah data terkait kapasitas dan populasi penghuninya. Pada tahun 2019, kapasitas lapas mencapai 217 orang, dengan jumlah narapidana mencapai 198 orang, mendekati kapasitas maksimal. Namun, pada tahun 2020, meskipun kapasitas tetap sama, jumlah narapidana meningkat menjadi 212 orang. Sebaliknya, jumlah tahanan turun secara signifikan menjadi 75 orang, menyebabkan total penghuni lapas pada tahun tersebut menjadi 287 orang. Pada tahun 2021, situasinya kembali normal dengan jumlah narapidana dan tahanan yang sama seperti tahun 2019, serta total penghuni lapas mencapai 415 orang. Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah tahanan, kapasitas lapas tetap stabil selama periode tersebut, menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan populasi di dalamnya.

Tabel 4. 36 Data Anggota Satlinmas dan Pos Kamling di Kabupaten Batang 2022

∑	L/P		Pendidikan					Usia			Diklat		Memiliki KTA	
	L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	<30	30-50	>50	Blm	Sdh	Blm	Sdh
6305	6226	79	3457	1874	869	13	92	184	3159	2962	5826	479	5137	1168

Sumber: Satpol PP Kabupaten Batang, 2023

Pada tahun 2022, jumlah total anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pos Kamling di Kabupaten Batang mencapai 6305 orang, yang terdiri dari 6226 laki-laki dan 79 perempuan. Dari segi pendidikan terakhir, mayoritas anggota memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 3457 orang, diikuti oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 1874 orang, dan lulusan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 869 orang. Hanya sedikit anggota yang memiliki pendidikan lebih tinggi, seperti Diploma (D3) yang berjumlah 13 orang dan Sarjana (S1) sebanyak 92 orang. Secara usia, terdapat 184 orang anggota yang berusia kurang dari 30 tahun, 3159 orang berusia antara 30 hingga 50 tahun, dan 2962 orang berusia di atas 50 tahun. Lebih lanjut, dari total anggota Satlinmas, sebanyak 5626 orang belum mengikuti pelatihan (diklat), sementara 479 orang sudah mengikuti diklat. Dari segi kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA), mayoritas anggota Satlinmas belum memiliki KTA, yaitu sebanyak 5137 orang, sementara yang sudah memiliki KTA hanya 1168 orang. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan pelatihan dan pemenuhan persyaratan administratif bagi anggota Satlinmas agar dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas perlindungan masyarakat di Kabupaten Batang.

c. Pengambilan Keputusan (Badan Kepegawaian Daerah)

Data yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang mengenai ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2019 hingga 2024 menggambarkan perubahan jumlah ASN di berbagai tingkatan eselon. Pada tahun 2019 hingga 2023, tidak ada ASN pada tingkat Eselon I. Untuk tingkat Eselon II, terjadi fluktuasi jumlah ASN dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2019, terdapat 29 orang ASN Eselon II, dengan 25 laki-laki dan 4 perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi 24 orang pada tahun 2023, dengan 23 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, jumlah ASN pada tingkat Eselon III juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, terdapat 143 orang ASN Eselon III, dengan 106 laki-laki dan 37 perempuan. Jumlah ini cenderung menurun menjadi 102 orang pada tahun 2023, dengan 61 laki-laki dan 41 perempuan. Untuk tingkat Eselon IV, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, terdapat 269 laki-laki dan 173 perempuan ASN. Namun, jumlah ini menurun menjadi 232 laki-laki dan 162 perempuan pada tahun 2020. Selanjutnya, terjadi kenaikan jumlah ASN pada tahun 2021, dengan 251 laki-laki dan 191 perempuan. Namun, jumlah ini kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023, dengan 130 laki-laki dan 94 perempuan pada tahun 2022, serta 131 laki-laki dan 100 perempuan pada tahun 2023. Analisis data ini menunjukkan adanya variasi jumlah ASN di berbagai tingkatan eselon selama periode tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pengangkatan ASN, pensiun, dan perubahan kebutuhan organisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan tenaga kerja di sektor pemerintahan.

Data yang disajikan mengenai jumlah ASN pada jabatan guru dan tenaga medis dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada kedua jabatan tersebut. Pada jabatan guru, jumlah ASN menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 3858 ASN jabatan guru, namun jumlah ini menurun menjadi 3552 pada tahun 2020, kemudian 2895 pada tahun 2021, dan 2458 pada tahun 2022. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah ASN jabatan guru menjadi 2274, terdiri dari 887 laki-laki dan 1387 perempuan.

Sementara itu, pada jabatan tenaga medis juga terjadi penurunan jumlah ASN dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 1221 ASN jabatan tenaga medis, kemudian naik sedikit menjadi 1252 pada tahun 2020, namun

kemudian turun drastis menjadi 1057 pada tahun 2021, dan 1023 pada tahun 2022. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah ASN jabatan tenaga medis menjadi 1034, terdiri dari 200 laki-laki dan 834 perempuan. Analisis data ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam ketersediaan ASN pada jabatan guru dan tenaga medis di Kabupaten Batang selama periode tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pengangkatan ASN, perubahan kebutuhan organisasi, atau faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ketersediaan dan mobilitas tenaga kerja di sektor kesehatan dan pendidikan. Diperlukan perhatian khusus untuk menjaga ketersediaan dan kualitas layanan dalam sektor-sektor tersebut melalui strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif.

Tabel 4. 37 Data ASN di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Jumlah PNS Eselon I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah PNS Eselon II	25	4	29	25	3	28	30	3	33	28	2	30	24	1	25
3	Jumlah PNS Eselon III	106	37	143	97	38	135	110	48	158	102	38	140	102	41	143
4	Jumlah PNS Eselon IV	269	173	442	232	162	394	251	191	442	130	94	224	131	100	231
5	Jumlah PNS Jabatan Guru			3858			3552			2895			2458	887	1387	2274
6	Jumlah PNS Jabatan Tenaga Medis			1221			1252			1057			1023	200	834	1034
7	Jumlah PNS Golongan I	118	13	131	104	15	119	92	10	102	79	7	86	61	6	67
8	Jumlah PNS Golongan II	732	443	1175	734	334	1068	668	409	1077	592	377	969	508	179	687
9	Jumlah PNS Golongan III	1304	2016	3320	1344	1929	3273	1315	2022	3337	1258	1995	3253	1248	2132	3380
10	Jumlah PNS Golongan IV	1042	979	2021	889	905	1794	772	814	1586	672	723	1395	549	613	1162
11	Jumlah PNS (Lulus SD Sederajat)			83	68	7	75	59	6	65	51	8	59	45	8	53
12	Jumlah PNS (Lulus SMP Sederajat)			165	94	52	146	121	7	128	115	9	124	101	9	110
13	Jumlah PNS (Lulus SMA Sederajat)			838	485	256	741	544	133	677	529	153	682	477	136	613
14	Jumlah PNS (Lulus Diploma)			1087	228	841	1069	224	727	951	242	753	995	219	719	938
15	Jumlah PNS (Lulus S1/S2/S3)			4474	2026	2197	4223	1863	2382	4245	1664	2179	3843	1524	2058	3582

Sumber: BKD Kabupaten Batang, 2024

Data tersebut menunjukkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan golongan dari tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Batang. Untuk golongan I, terdapat penurunan jumlah PNS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 131, kemudian turun menjadi 119 pada tahun 2020, 102 pada tahun 2021, 86 pada tahun 2022, dan 67 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan restrukturisasi atau penyesuaian dalam pengelolaan ASN di golongan ini. Golongan II juga mengalami penurunan jumlah PNS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 1175, kemudian turun menjadi 1068 pada tahun 2020, 1077 pada tahun 2021, 969 pada tahun 2022, dan 687 pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya perubahan kebijakan atau prioritas dalam perekrutan dan pengelolaan ASN di golongan II. Sementara itu, untuk golongan III, jumlah PNS cenderung stabil atau mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 3320, kemudian naik sedikit menjadi 3273 pada tahun 2020, 3337 pada tahun 2021, turun sedikit menjadi 3253 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 3380 pada tahun 2023. Golongan IV juga mengalami penurunan jumlah PNS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 2021, kemudian turun menjadi 1794 pada tahun 2020, 1586 pada tahun 2021, 1395 pada tahun 2022, dan 1162 pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya perubahan dalam kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusia di golongan ini. Analisis data menunjukkan pola penurunan yang konsisten dalam jumlah PNS di golongan I, II, dan IV dari tahun 2019 hingga 2023, sementara golongan III menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil. Hal ini menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk mengatasi perubahan kebutuhan organisasi dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan jabatan.

Data tersebut menunjukkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan tingkat pendidikan mereka dari tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Batang. Untuk PNS yang lulus SD sederajat, terdapat penurunan

jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 83, kemudian turun menjadi 75 pada tahun 2020, 65 pada tahun 2021, 59 pada tahun 2022, dan 53 pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya pergeseran kebutuhan dalam perekrutan ASN dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. PNS yang lulus SMP sederajat juga mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 165, kemudian turun menjadi 146 pada tahun 2020, 128 pada tahun 2021, 124 pada tahun 2022, dan 110 pada tahun 2023. Hal ini juga mungkin mencerminkan adanya kebutuhan akan ASN dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk PNS yang lulus SMA sederajat, jumlahnya juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 838, kemudian naik menjadi 741 pada tahun 2020, naik lagi menjadi 677 pada tahun 2021, naik sedikit menjadi 682 pada tahun 2022, dan turun menjadi 613 pada tahun 2023. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan rekrutmen atau pensiun PNS. PNS yang lulus Diploma menunjukkan fluktuasi dalam jumlah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 1087, kemudian turun menjadi 1069 pada tahun 2020, turun lagi menjadi 951 pada tahun 2021, naik sedikit menjadi 995 pada tahun 2022, dan turun menjadi 938 pada tahun 2023. Terakhir, untuk PNS yang lulus S1/S2/S3, jumlahnya juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlahnya adalah 4474, kemudian turun menjadi 4223 pada tahun 2020, naik sedikit menjadi 4245 pada tahun 2021, turun menjadi 3843 pada tahun 2022, dan turun lagi menjadi 3582 pada tahun 2023. Analisis data menunjukkan adanya fluktuasi dan penurunan jumlah PNS di berbagai tingkat pendidikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam kebutuhan tenaga kerja ASN serta perubahan dalam kebijakan rekrutmen dan pensiun di Kabupaten Batang.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum adalah langkah untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dan dilindungi oleh

hukum dan regulasi yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dalam upaya melindungi hak-hak perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini, komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan merancang Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, kemudian ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Tindakan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan, termasuk komitmen khusus untuk menghapus diskriminasi terhadap mereka.

Tabel 4. 38 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan di Kabupaten Batang (Jiwa), 2019-2021

Wilayah	Korban Kekerasan		
	2019	202	2021
Kabupaten Batang	6	10	19

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Data tersebut menggambarkan jumlah perempuan yang berusia 18 tahun ke atas yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, terdapat 6 kasus, meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2020, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 19 kasus pada tahun 2021. Analisis terhadap data ini menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah korban kekerasan perempuan selama periode tersebut. Peningkatan ini mungkin dapat diatribusikan kepada berbagai faktor, termasuk kesadaran yang

meningkat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan, perubahan dalam pelaporan dan pendataan, serta kemungkinan adanya peningkatan kasus kekerasan secara aktual. Dengan memahami tren ini, pihak berwenang dan lembaga terkait dapat mengambil langkah-langkah preventif dan intervensi yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada korban. Selain itu, data ini juga menggarisbawahi perlunya program pencegahan kekerasan yang lebih terfokus dan terukur di tingkat lokal untuk mengurangi insiden kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Batang.

5. Bidang Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Batang harus memperhatikan akses, control, partisipasi dan pemanfaatan bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional. Kondisi penyediaan infrastruktur ramah gender di Kabupaten Batang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 39 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Batang, 2022

Jenis Permukaan				Jumlah
Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
317,96	148,75	56,88	28,83	552,421

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2023

Data tersebut memberikan gambaran mengenai panjang jalan kabupaten di Kabupaten Batang pada tahun 2022 berdasarkan kondisinya. Jumlah total panjang jalan kabupaten adalah 552,421 kilometer. Dari jumlah tersebut, sebagian besar jalan dikategorikan sebagai jalan baik, dengan panjang mencapai 317,96 kilometer. Selanjutnya, terdapat jalan dengan kondisi sedang sepanjang 148,75 kilometer. Jalan yang rusak memiliki panjang sebesar 56,88 kilometer, sementara jalan rusak berat memiliki panjang 28,83 kilometer.

Dari segi persentase, jalan baik mendominasi dengan persentase sekitar 57,54% dari total panjang jalan kabupaten. Jalan sedang menyumbang sekitar 26,94%, sementara jalan rusak dan rusak berat masing-masing hanya

menyumbang sekitar 10,30% dan 5,22% dari total panjang jalan. Analisis data ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten di Kabupaten Batang dalam kondisi baik, namun masih ada sebagian kecil jalan yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut, terutama yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan alokasi sumber daya yang tepat untuk memperbaiki dan memelihara jaringan jalan tersebut guna memastikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 4. 40 Persentase Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Batang, 2020-2022

Sumber Air Minum Bersih			Akses Air Minum Layak		
2020	2021	2022	2020	2021	2022
73,19	73,09	78,94	97,14	96,20	91,59

Sumber: BPS Jawa Tengah 2023

Data tersebut memberikan gambaran tentang persentase sumber air minum bersih dan akses air minum layak di Kabupaten Batang selama periode 2020-2022. Pada tahun 2020, persentase sumber air minum bersih sebesar 73,19%, sedangkan akses air minum layak mencapai 97,14%. Pada tahun berikutnya, persentase sumber air minum bersih sedikit menurun menjadi 73,09%, sementara akses air minum layak juga mengalami penurunan menjadi 96,20%. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan, dimana persentase sumber air minum bersih mencapai 78,94%, sementara akses air minum layak turun menjadi 91,59%.

Analisis data menunjukkan bahwa meskipun persentase sumber air minum bersih di Kabupaten Batang relatif stabil selama periode tersebut, terjadi fluktuasi dalam akses air minum layak. Penurunan akses air minum layak pada tahun 2021 dan 2022 memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air minum di wilayah tersebut. Pentingnya akses yang memadai terhadap air minum layak menunjukkan

perlunya investasi lebih lanjut dalam penyediaan sumber air minum yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang.

Tabel 4. 41 Jumlah Sanitasi Layak di Kabupaten Batang, 2019-2023

2019			2020			2021			2022			2023		
L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
3.006	3.138	**6.144**	2.396	2.494	**4.890**	1.453	1.514	**2.967**	1.050	1.075	**2.125**	2.044	1.982	**4.026**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Batang, 2024

Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mengungkapkan jumlah sanitasi layak di wilayah tersebut selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, tercatat 3006 unit sanitasi layak untuk laki-laki, 2138 unit untuk perempuan, dengan total 6144 unit. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah sanitasi layak menurun menjadi 2396 unit untuk laki-laki dan 2484 unit untuk perempuan, dengan total 4890 unit. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah tersebut terus mengalami penurunan menjadi 1453 unit untuk laki-laki dan 1514 unit untuk perempuan, dengan total 2967 unit. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan hanya 1050 unit sanitasi layak untuk laki-laki dan 1075 unit untuk perempuan, dengan total 2125 unit. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023, dengan mencapai 2044 unit untuk laki-laki dan 1982 unit untuk perempuan, dengan total 4026 unit sanitasi layak.

Analisis data menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah sanitasi layak di Kabupaten Batang selama periode tersebut. Penurunan yang signifikan terutama terjadi pada tahun 2020 hingga 2022, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya investasi dalam infrastruktur sanitasi atau perubahan kebijakan. Namun, peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 memberikan harapan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan kualitas sanitasi sedang dilakukan. Pentingnya sanitasi layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menekankan perlunya perhatian yang

lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi yang berkualitas dan terjangkau.

6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Data dari Dispendukcapil Kabupaten Batang menunjukkan bahwa persentase kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, memiliki fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, persentase kepemilikan KTP mencapai 96,84%, sedangkan pada tahun 2020 turun sedikit menjadi 96,37%. Namun, pada tahun 2021, persentase tersebut sedikit meningkat menjadi 96,48%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 98,08%. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, namun tetap tinggi dengan persentase sebesar 97,92%. Sementara itu, jumlah kepemilikan akta kelahiran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tercatat 148.832 laki-laki dan 133.929 perempuan memiliki akta kelahiran, sedangkan pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 156.758 laki-laki dan 141.253 perempuan. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlahnya mencapai 206.931 laki-laki dan 187.817 perempuan.

Selain itu, persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, persentasenya adalah 107.897 laki-laki dan 102.149 perempuan. Meskipun mengalami fluktuasi kecil, namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu 120.819 laki-laki dan 114.239 perempuan. Analisis data menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran, dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan publik serta hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk

meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Tabel 4. 42 Jumlah Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan di Kabupaten Batang 2019-2023

No	Uraian	2019			2020			2021			2022			2023		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1.	Persentase Kepemilikan KTP			96,84			96,37			96,48			98,08			97,92
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	148.832	133.929	282.761	156.758	141.253	298.011	195.763	176.514	372.277	195.612	176.274	371.886	206.931	187.817	394.748
3	Persentase Anak Usia 0-18 yang Memiliki Akta Kelahiran	107.897	102.149	210.046	106.868	101.228	208.096	111.195	105.410	216.605	104.571	99.112	203.683	120.819	114.239	235.058

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Batang, 2024

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Batang memiliki rasio ketergantungan yang cukup tinggi. Rasio ketergantungan laki-laki mencapai 234%, atau dari 234 orang laki-laki menanggung 100 orang laki-laki usia non-produktif. Sedangkan rasio ketergantungan perempuan mencapai 116%, atau dari 116 perempuan menanggung 100 orang perempuan dengan usia non-produktif. Rasio ketergantungan total, yang mencakup kedua jenis kelamin, mencapai 235%. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan, yang menanggung penduduk usia non-produktif sangatlah signifikan, atau di antara 235 orang produktif menanggung 100 orang usia non-produktif. Dapat diketahui bahwa penduduk berusia produktif di Kabupaten Batang sangatlah potensial untuk dikembangkan guna pembangunan, mengingat angka ketergantungan penduduk usia non-produktif antara laki-laki dan perempuan usia produktif cukup rendah. Tetapi untuk mencapai pembangunan dengan optimal, diperlukan pembangunan berbasis gender untuk mempertahankan potensi yang dimiliki.

C. Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang

Secara umum gambaran perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Batang masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kabupaten Batang menempati urutan ke 12 dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan angka IPG Kabupaten Batang masih di bawah rata-rata IPG Provinsi yaitu 92,18 di tahun 2020; 92,48 di tahun 2021; 92,83 di tahun 2022 dan rata-rata per tahun adalah 92,50. Rata-rata IDG Kabupaten Batang menempati urutan ke 14 dari 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan angka IDG Kabupaten Batang masih di bawah rata-rata IDG Provinsi yaitu 72,03 di tahun 2020; 71,64 di tahun 2021; 73,78 di tahun 2022 dan rata-rata per tahun adalah 72,48. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Batang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesenjangan gender. Pada tahun 2020, IKG di Kabupaten Batang adalah 0,484, kemudian menurun menjadi 0,444 di tahun 2021, dan terus menurun menjadi 0,406 di tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan, namun jika dibandingkan dengan IKG di tingkat provinsi Jawa Tengah, angka tersebut masih menandakan adanya tingkat ketimpangan yang relatif tinggi

Secara keseluruhan, Kabupaten Batang masih menghadapi tantangan dalam pembangunan gender dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan keterbelakangan dalam hal kesetaraan gender. Meskipun terjadi penurunan IKG dari tahun ke tahun, namun masih ada kesenjangan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Batang, baik melalui kebijakan maupun program-program yang berkelanjutan.

1. Bidang Sosial

a. Pendidikan

1. Ada ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Batang, dengan rata-rata lama sekolah penduduk masih di bawah standar wajib belajar 12 tahun. Laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, menunjukkan ketimpangan gender dalam akses pendidikan.
2. Kesenjangan antara akses dan kualitas pendidikan semakin nyata dengan perbedaan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Batang. Meskipun harapan lama sekolah mencapai 12 tahun, rata-rata lama sekolah hanya sekitar 7 tahun, menunjukkan adanya hambatan dalam mencapai pendidikan yang sesuai dengan standar.
3. Fluktuasi dalam Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan tantangan dalam mempertahankan keterlibatan siswa di sekolah, terutama pada kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Penurunan APS dari tahun 2021 ke tahun 2023 menandakan adanya masalah dalam mempertahankan siswa di sekolah.
4. Variasi dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbedaan dalam keterlibatan siswa di berbagai tingkat pendidikan. Meskipun terjadi peningkatan pada tingkat SMP dan SMA, namun penurunan pada tahun 2022 menandakan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi siswa di semua tingkat pendidikan.
5. Pola peningkatan dalam Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan upaya dalam meningkatkan keterlibatan siswa di semua tingkat pendidikan. Meskipun terjadi peningkatan stabil, namun perlu perhatian khusus untuk meningkatkan APM pada tingkat SMP dan SMA yang masih lebih rendah dibandingkan SD.

6. Tren penurunan APM dengan peningkatan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat keterlibatan siswa. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong kesetaraan akses pendidikan di semua tingkat.

b. Kesehatan

1. Kematian Bayi:

   Rata-rata kematian bayi laki-laki adalah 84 per tahun, sedangkan untuk bayi perempuan adalah 57 per tahun dari tahun 2017 hingga 2020.

   Data menunjukkan bahwa secara umum, bayi laki-laki cenderung lebih rentan mengalami kematian dibandingkan bayi perempuan.
2. Kematian Balita:

   Rata-rata kematian balita laki-laki adalah 101 per tahun, sementara untuk balita perempuan adalah 68 per tahun dari tahun 2017 hingga 2020. Balita laki-laki memiliki jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan balita perempuan, menunjukkan rentanitas gender terhadap kematian balita.
3. Kematian Ibu saat Melahirkan:

   Jumlah kematian ibu saat melahirkan mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sejumlah 274 kasus kematian ibu melahirkan. Di tahun 2022 kasus kematian ibu melahirkan turun menjadi 106 dan Kembali naik menjadi 124 kasus di tahun 2023.

   Meskipun dalam skala yang lebih rendah, kematian ibu dalam kondisi hamil juga menunjukkan pola yang serupa.
4. Penyebab Kematian Ibu saat Melahirkan:

   Penyebab utama kematian ibu saat melahirkan bervariasi dari tahun ke tahun, dengan pendarahan menjadi penyebab utama pada beberapa tahun.

5. Perbandingan jumlah dokter dan tenaga farmasi Kabupaten Batang mungkin belum seimbang dengan jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Namun, untuk aspek lain seperti tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan masyarakat, jumlah tenaga kesehatan tampak lebih memadai.
6. Kabupaten Batang masih memiliki tantangan dalam menangani masalah gizi pada balita, terutama dalam kasus gizi buruk dan gizi kurang yang memiliki jumlah yang cukup besar.
7. Masalah kerentanan gender pada penderita HIV/AIDS di Kabupaten Batang dapat terlihat dari jumlah jumlah laki-laki dan perempuan yang terkena dampak HIV/AIDS di Kabupaten Batang. Meskipun angka total penderita relatif stabil dari tahun 2019 hingga 2020, fluktuasi dalam distribusi jenis kelamin menyoroti perubahan-perubahan yang terjadi. Pada tahun 2019, jumlah perempuan yang terinfeksi lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sementara pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah laki-laki yang terkena dampak. Lonjakan signifikan pada tahun 2022 kembali menunjukkan peningkatan jumlah laki-laki yang terinfeksi. Meskipun terjadi penurunan pada jumlah laki-laki yang terkena dampak pada tahun 2023, tetapi masalah HIV/AIDS tetap menjadi perhatian utama.
8. Data Posyandu di Kabupaten Batang menunjukkan variasi dalam jumlah kader dan Posyandu dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun jumlah kader Posyandu naik sedikit, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah Posyandu Pratama dan Madya, menunjukkan kemungkinan menurunnya minat atau dukungan terhadap program Posyandu di tingkat dasar.

c. Keluarga Berencana

1. Dalam Kabupaten Batang, analisis penggunaan kontrasepsi menunjukkan bahwa beban penggunaan kontrasepsi masih lebih besar

pada perempuan daripada laki-laki, yang tercermin dari jenis kontrasepsi yang lebih sering digunakan oleh perempuan. Tingginya persentase pencapaian Pelayanan Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Masyarakat (PPM) yang kemungkinan besar dipenuhi oleh perempuan, serta fluktuasi dalam penggunaan kontrasepsi yang masih menunjukkan dominasi metode yang berkaitan dengan perempuan.

d. Sosial

1. Adanya disparitas antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam berbagai kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Batang. Terdapat indikasi bahwa perempuan cenderung lebih rentan terhadap beberapa masalah sosial.
2. Pada tahun 2021, terdapat jumlah anak terlantar yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, namun jumlah perempuan anak balita yang terlantar lebih tinggi. Terdapat 4 perempuan anak balita yang terlantar dan jumlah anak terlantar mencapai 27 laki-laki dan 24 perempuan, menyoroti kompleksitas masalah sosial di antara kelompok anak-anak.
3. Jumlah perempuan yang berhadapan dengan hukum juga meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam hal keamanan dan perlindungan bagi perempuan di wilayah tersebut. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2023 yaitu 32 laki-laki dan 45 perempuan.
4. Masalah gender pada kelompok disabilitas dapat dilihat dari perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang merupakan penyandang disabilitas di Kabupaten Batang. Pada tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Selain itu, penurunan jumlah perempuan penyandang disabilitas dari tahun 2021 ke tahun 2022 juga bisa menjadi perhatian, karena menunjukkan kemungkinan terjadinya

masalah akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial yang lebih lanjut bagi perempuan dengan disabilitas di Kabupaten Batang.

5. Masalah gender pada kelompok usia lanjut yang terlantar dapat dilihat dari perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang mengalami keterlantaran di Kabupaten Batang. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan lanjut usia yang terlantar pada tahun 2021 lebih tinggi daripada jumlah laki-laki yang terlantar. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lanjut usia mungkin menghadapi risiko sosial dan ekonomi yang lebih besar, serta memiliki ketergantungan yang lebih tinggi terhadap dukungan sosial dan layanan kesehatan. Jumlah lanjut usia terlantar juga signifikan, terutama pada tahun 2021 dengan 103 laki-laki dan 222 perempuan.

2. Ekonomi

a. Ketenagakerjaan

1. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka: Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat fluktuasi dalam tingkat pengangguran terbuka. Meskipun fluktuasi ini tidak terlalu signifikan, namun menunjukkan dinamika dalam kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
2. Kesenjangan Gender dalam Pelatihan Ketenagakerjaan: Meskipun terdapat tren pertumbuhan dalam jumlah peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, masih terlihat kesenjangan gender dalam partisipasi. Mayoritas peserta pelatihan adalah perempuan, yang mungkin mencerminkan adanya kendala akses atau ketidaksetaraan dalam kesempatan pelatihan bagi laki-laki dan perempuan.
3. Tantangan dalam Mengurangi Pengangguran Terbuka: Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, masih terdapat tantangan dalam

mengurangi pengangguran terbuka. Fluktuasi dalam jumlah pengangguran terbuka menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup mungkin belum optimal.

4. Kualitas Pekerjaan dan Kualifikasi Tenaga Kerja: Meskipun peningkatan aktivitas ekonomi menunjukkan adanya peluang kerja yang lebih banyak, masih perlu diperhatikan kualitas pekerjaan yang tersedia dan ketersesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Hal ini bisa memengaruhi kesejahteraan ekonomi dan stabilitas pekerja.

b. Koperasi dan UMKM

1. Partisipasi Anggota Koperasi: Terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah anggota koperasi aktif dari tahun 2020 hingga 2023. Masalah ini mungkin mengindikasikan kesenjangan dalam partisipasi anggota koperasi dari berbagai jenis kelamin, di mana mungkin terdapat kendala-kendala khusus yang dihadapi oleh perempuan dalam menjadi anggota aktif koperasi.
2. Akses Keuangan bagi UMKM: Tidak adanya penerimaan kredit dari lembaga keuangan selama periode tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam akses keuangan bagi UMKM dan koperasi di Kabupaten Batang. Permasalahan ini mungkin memengaruhi secara tidak langsung peluang dan perkembangan UMKM yang dimiliki oleh perempuan.

c. Penanaman Modal

1. Investor PMDN: Tren total investor PMDN cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah investor laki-laki (L) dan perempuan (P) pada tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2019, mayoritas investor adalah laki-laki dengan total 24, sementara hanya ada 2 investor perempuan. Hal serupa terjadi pada tahun 2020 dan 2021, di mana jumlah investor perempuan sangat rendah dibandingkan dengan jumlah investor laki-

laki. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 jumlah investor perempuan sedikit meningkat, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah investor laki-laki.

2. Investor PMA/PMDN: Total investor PMA/PMDN juga mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investor perempuan, namun jumlah ini kembali menurun pada tahun 2021. Tren yang menarik adalah pada tahun 2022, di mana tidak ada investor perempuan yang tercatat, sedangkan pada tahun 2023 jumlah investor perempuan kembali muncul dengan jumlah yang signifikan, sama dengan jumlah investor laki-laki.

d. Pertanian

1. Jumlah kelompok tani mengalami peningkatan yang stabil dari 918 pada tahun 2019 menjadi 944 pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan minat dan partisipasi yang baik dalam pertanian tanaman pangan.
2. Jumlah kelompok tani ternak meningkat dari 227 pada tahun 2019 menjadi 279 pada tahun 2022 dan 2023, mencerminkan upaya pengembangan sektor peternakan oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Jumlah kelompok wanita tani relatif stabil dari 263 pada tahun 2019 menjadi 275 pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan keterlibatan wanita dalam sektor pertanian yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Jumlah total PPL mengalami fluktuasi yang tidak signifikan dari tahun ke tahun, stabil di sekitar 90-an, menunjukkan upaya yang baik dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang penyuluhan pertanian.

e. Perikanan dan kelautan

1. Terjadi fluktuasi jumlah nelayan yang signifikan dari tahun ke tahun. Puncak jumlah nelayan terjadi pada tahun 2022 dengan 1.088 nelayan, namun kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 678

pada tahun 2023. Fluktuasi mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi, cuaca, dan kebijakan sektor perikanan.

2. Jumlah pembudidaya ikan terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 86 pembudidaya ikan, dengan mayoritas adalah laki-laki.
3. Jumlah poklaksar menunjukkan kestabilan dari tahun ke tahun, dengan total 641 kelompok selama periode tersebut. Menandakan adanya komunitas yang terorganisir dengan baik di kalangan nelayan untuk mengatasi masalah dan memperjuangkan kepentingan bersama.
4. Jumlah pengurus pokmaswas stabil selama periode tersebut, dengan total 42 pengurus, baik laki-laki maupun perempuan. Menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola dan mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Batang.

f. Perdagangan

1. Terdapat ketimpangan gender dalam kepemilikan usaha di sektor pasar, di mana perempuan mendominasi sebagai pemilik los dan kios, sementara laki-laki lebih dominan sebagai pemilik warung. Ketidakseimbangan ini mungkin mencerminkan adanya hambatan-hambatan bagi partisipasi ekonomi perempuan di sektor perdagangan, yang perlu ditangani untuk mencapai kesetaraan gender dalam kepemilikan usaha.
2. Perkembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) di Kabupaten Batang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan signifikan jumlah pemilik los di pasar, sementara jumlah pemilik warung dan kios cenderung stabil. Tidak ada pemberian bantuan gerobak selama periode tersebut, menandakan perluasan usaha mandiri, sementara jumlah pedagang PKL tetap stabil. Meskipun tidak ada pelatihan pengolahan makanan yang diselenggarakan pemerintah daerah, data

menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik dalam sektor UDKM tanpa bantuan langsung dari pemerintah.

3. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan

a. Politik

1. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, persentase keterlibatan perempuan di Parlemen Kabupaten Batang tetap rendah dan cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga legislatif masih belum optimal, mencerminkan tantangan dalam memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam proses politik di tingkat lokal. Fluktuasi yang minim juga mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan belum mencapai titik signifikan, menyoroti perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi aktif perempuan dalam politik
2. Meskipun Kabupaten Batang memiliki enam anggota yang mewakili daerah tersebut di DPRD Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023, jumlah wakilnya relatif sedikit, menunjukkan pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Di DPRD Kabupaten Batang sendiri, terjadi fluktuasi dalam jumlah anggota dari tahun ke tahun, namun representasi perempuan masih rendah dengan jumlah yang terpilih sebagai anggota hanya sejumlah kecil.
3. Secara keseluruhan, jumlah pengurus harian perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pengurus harian laki-laki di hampir semua partai politik yang tercatat. Meskipun PKS dan PDIP memiliki jumlah pengurus harian perempuan yang relatif seimbang dengan laki-laki, pada partai lainnya, jumlah pengurus harian perempuan jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam meraih posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan di dalam struktur politik yang masih didominasi oleh laki-laki.

4. Ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam struktur kepengurusan LSM/Ormas/Organisasi Profesi di Kabupaten Batang. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pengurus dari tahun ke tahun, perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan organisasi tersebut masih kurang, sehingga menciptakan ketimpangan gender dalam representasi dan pengambilan keputusan. Perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan sehingga tercipta kesetaraan gender yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.
5. Pola representasi perempuan dalam badan pengurus harian partai politik dan LSM/Ormas/Organisasi Profesi, yang menunjukkan dominasi laki-laki dalam kepengurusan, meskipun terdapat peningkatan tren partisipasi perempuan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam semua aspek kehidupan politik dan masyarakat, guna mencapai tujuan kesetaraan gender yang lebih baik di Kabupaten Batang.

b. Hukum

1. Selama periode 2019 hingga 2021, Lapas Kelas II B Batang mencatat fluktuasi dalam populasi penghuninya, meskipun kapasitas lapas tetap stabil. Pada tahun 2019, jumlah narapidana mendekati kapasitas maksimal dengan 198 orang, sementara jumlah tahanan turun signifikan menjadi 75 orang, menjadikan total penghuni lapas sebanyak 287 orang. Namun, pada tahun 2020, jumlah narapidana meningkat menjadi 212 orang, sementara jumlah tahanan kembali normal. Pada tahun 2021, situasinya kembali normal dengan jumlah narapidana dan tahanan yang sama seperti tahun 2019, serta total penghuni lapas mencapai 415 orang.
2. Pada tahun 2022, data anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pos Kamling di Kabupaten Batang menunjukkan adanya

kebutuhan akan peningkatan pelatihan dan pemenuhan persyaratan administratif bagi anggota, mengingat mayoritas dari mereka belum mengikuti pelatihan dan belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Upaya untuk meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat di daerah tersebut memerlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan persyaratan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas.

c. Pengambilan Keputusan

1. Tidak ada ASN pada tingkat Eselon I selama periode tersebut, sementara terjadi fluktuasi jumlah ASN pada tingkat Eselon II dan III. Jumlah ASN Eselon II cenderung menurun dari 29 orang pada tahun 2019 menjadi 24 orang pada tahun 2023. Sementara itu, fluktuasi jumlah ASN Eselon III juga terjadi, turun dari 143 orang pada tahun 2019 menjadi 102 orang pada tahun 2023. Di tingkat Eselon IV, terjadi perubahan yang signifikan, dengan jumlah ASN menurun dari 442 pada tahun 2019 menjadi 231 pada tahun 2023.
2. Terjadi tren penurunan yang signifikan dalam jumlah ASN pada jabatan guru dan tenaga medis selama periode tersebut. Jumlah ASN jabatan guru menurun dari 3858 pada tahun 2019 menjadi 2274 pada tahun 2023, sementara jumlah ASN jabatan tenaga medis turun dari 1221 menjadi 1034 dalam rentang waktu yang sama. Analisis data ini menyoroti perlunya strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk menjaga ketersediaan dan keberlanjutan tenaga kerja di sektor pemerintahan, serta memastikan pemenuhan kebutuhan layanan publik yang berkualitas.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Batang dari 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan signifikan. Pada 2019 terdapat 6 kasus, meningkat menjadi 10 kasus pada 2020, dan kemudian mencapai 19 kasus pada 2021. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk peningkatan kesadaran, perubahan dalam pelaporan,

dan kemungkinan peningkatan kasus kekerasan yang sebenarnya. Analisis data ini menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang lebih efektif serta program-program pencegahan yang terfokus untuk melindungi perempuan dari kekerasan di tingkat lokal.

5. Bidang Infrastruktur

1. Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Batang pada tahun 2022, dengan total panjang jalan mencapai 552,421 kilometer. Mayoritas jalan dikategorikan sebagai jalan baik (317,96 km), diikuti oleh jalan sedang (148,75 km), jalan rusak (56,88 km), dan jalan rusak berat (28,83 km). Persentase jalan baik mendominasi dengan 57,54%, diikuti oleh jalan sedang (26,94%), jalan rusak (10,30%), dan jalan rusak berat (5,22%). Perlunya perencanaan dan alokasi sumber daya yang tepat untuk memperbaiki jalan yang rusak guna memastikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Batang.
2. Persentase sumber air minum bersih dan akses air minum layak di Kabupaten Batang dari 2020 hingga 2022 relatif stabil, terjadi fluktuasi dalam akses air minum layak. Perlunya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur air minum untuk meningkatkan akses yang memadai bagi seluruh masyarakat.
3. Jumlah sanitasi layak di wilayah tersebut dari 2019 hingga 2023 masih fluktuatif, namun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023. Perlu investasi dalam infrastruktur sanitasi yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Bidang Kependudukan

1. Data dari Dispendukcapil Kabupaten Batang menunjukkan adanya fluktuasi dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran dari tahun 2019 hingga 2023. Persentase kepemilikan KTP

cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kepemilikan akta kelahiran.

2. Rasio ketergantungan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Batang memiliki potensi untuk mendukung pembangunan, dengan menanggung beban penduduk usia non-produktif dalam proporsi yang relatif rendah.
3. Diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan, serta memanfaatkan potensi penduduk usia produktif secara optimal dalam pembangunan berkelanjutan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BATANG

Secara umum data dan informasi serta kinerja PUG di Kabupaten Batang dirumuskan pada tiga indikator yakni Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang disajikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketimpangan Gender

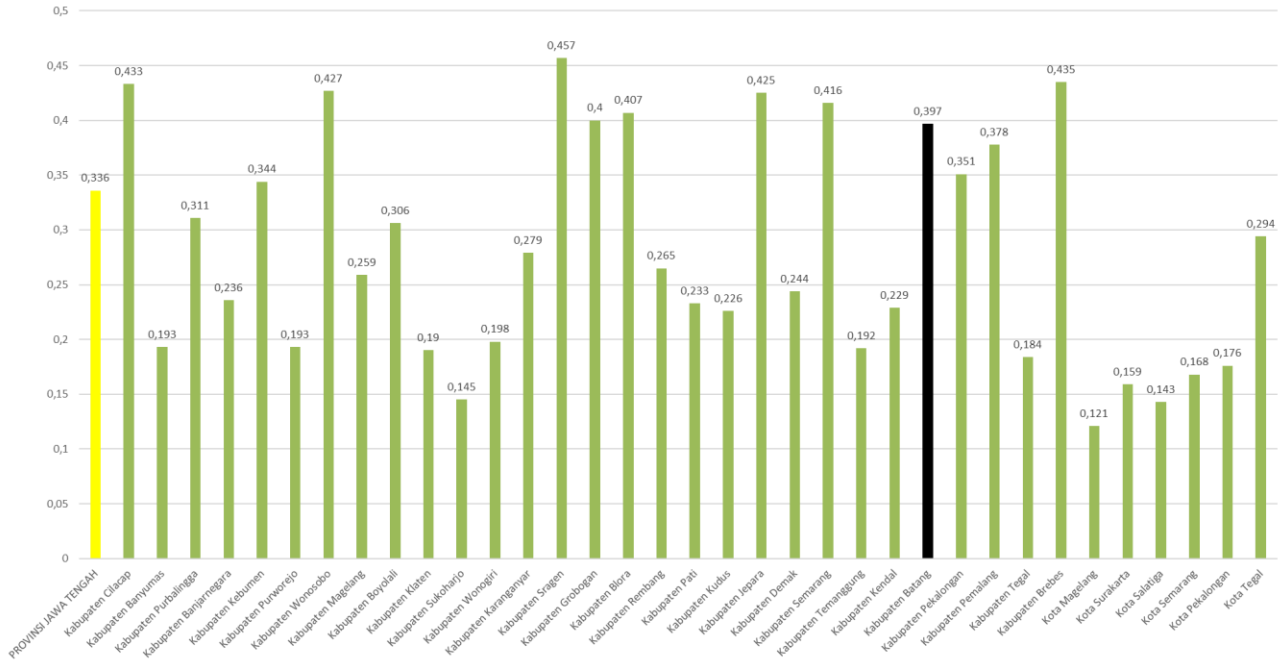

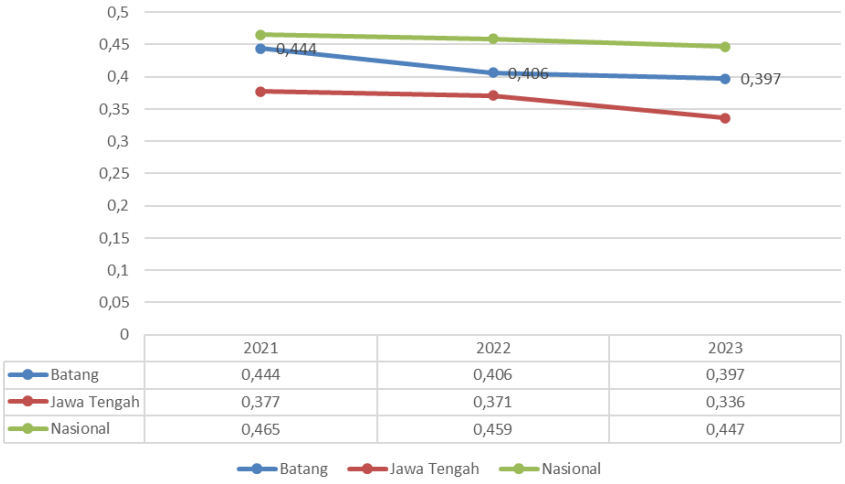

	2021	2022	2023
Batang	0,444	0,406	0,397
Jawa Tengah	0,377	0,371	0,336
Nasional	0,465	0,459	0,447

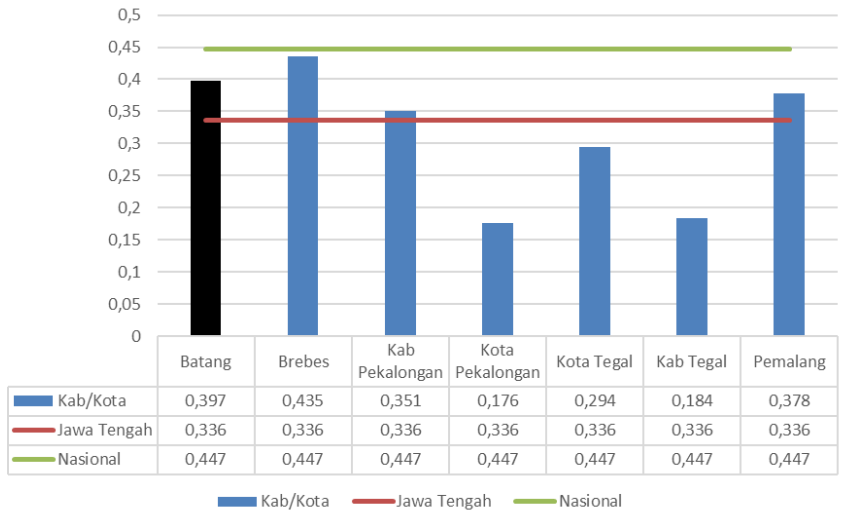

	Batang	Brebes	Kab Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Tegal	Kab Tegal	Pemalang
Kab/Kota	0,397	0,435	0,351	0,176	0,294	0,184	0,378
Jawa Tengah	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
Nasional	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447

[Indeks Ketimpangan Gender-IKG] (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun)

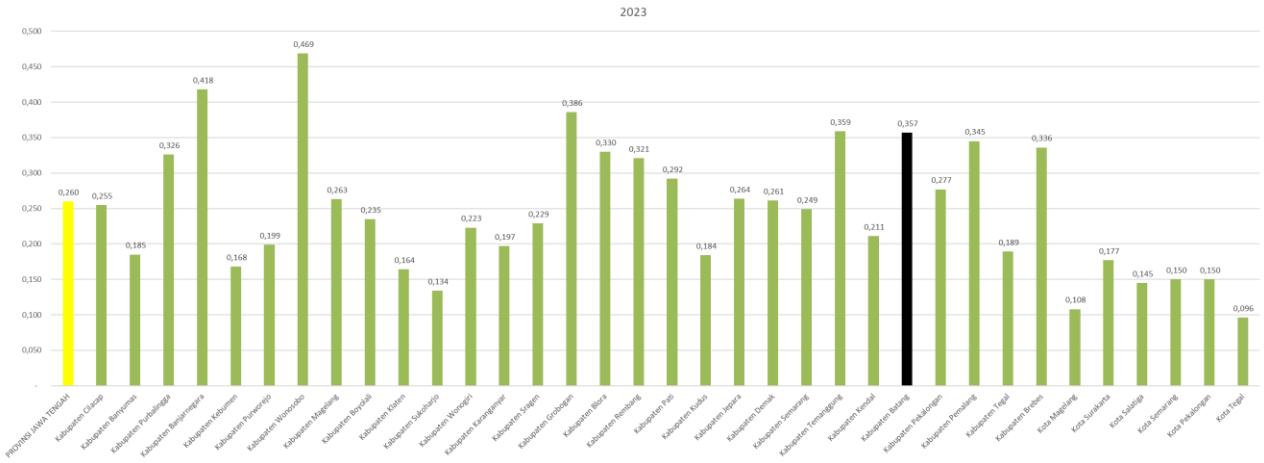

[Indeks Ketimpangan Gender-IKG] (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan)

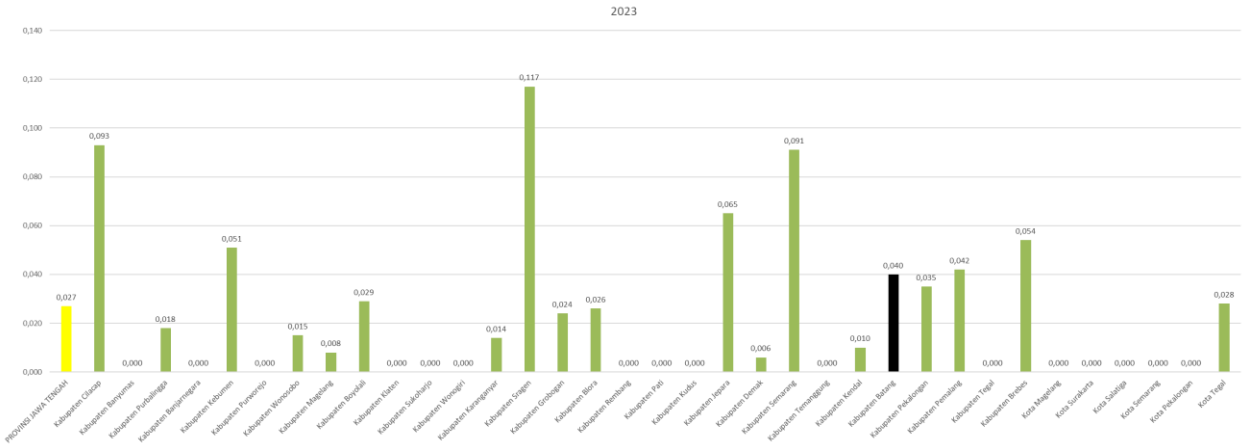

[Indeks Ketimpangan Gender-IKG] Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin (Persen)

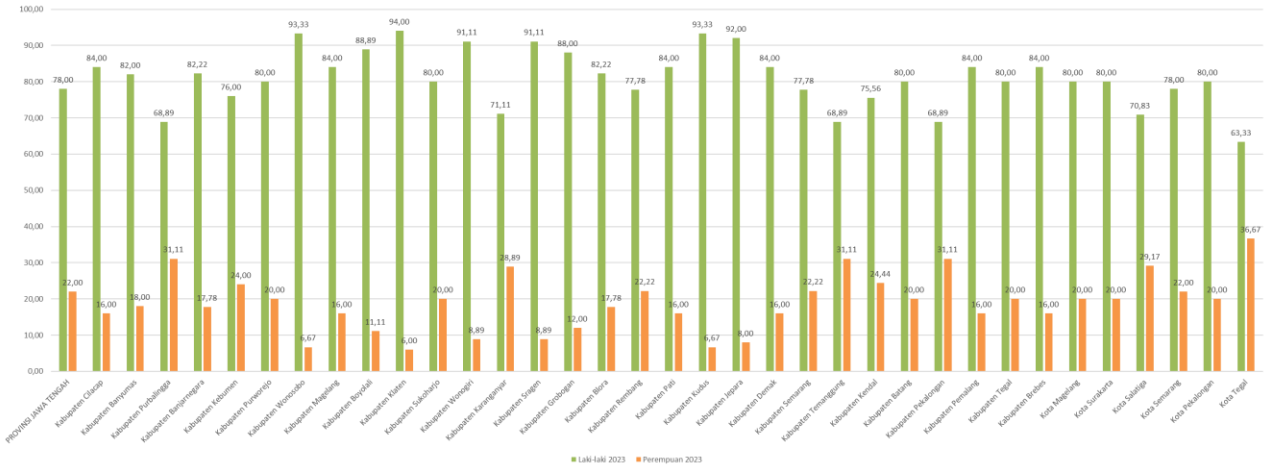

[Indeks Ketimpangan Gender-IKG] Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin (Persen)

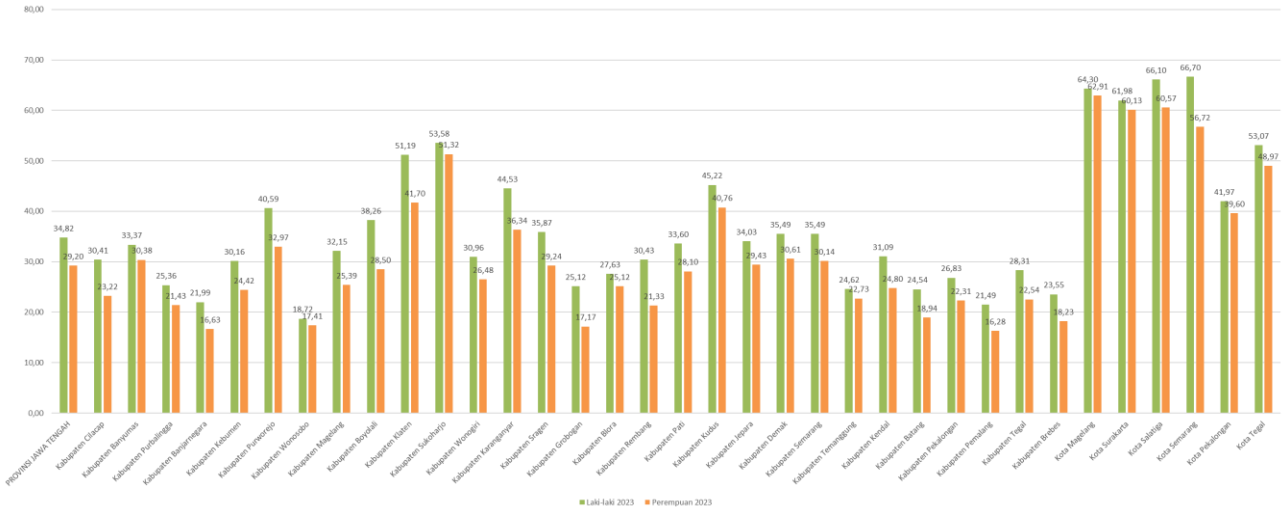

[Indeks Ketimpangan Gender-IKG] Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin (Persen)

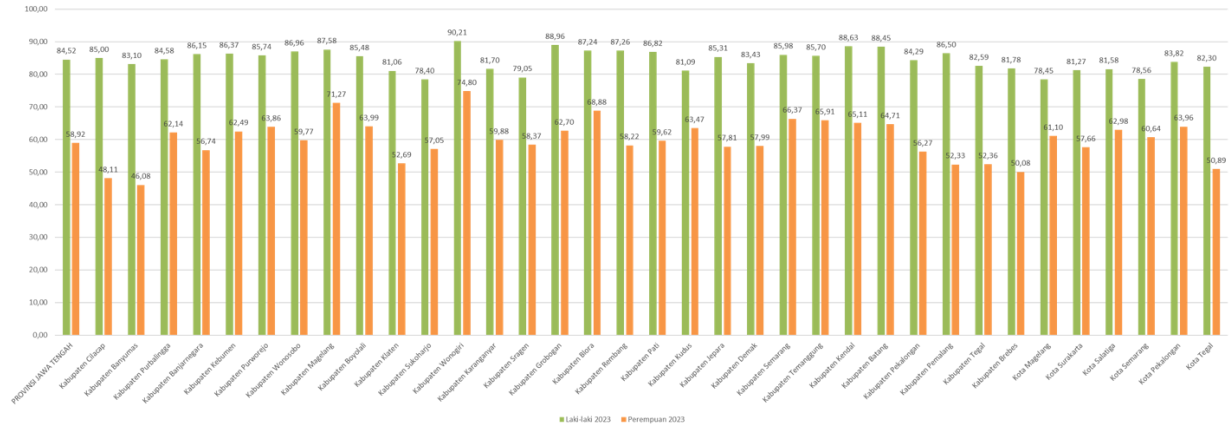

2. Indeks Pembangunan Gender

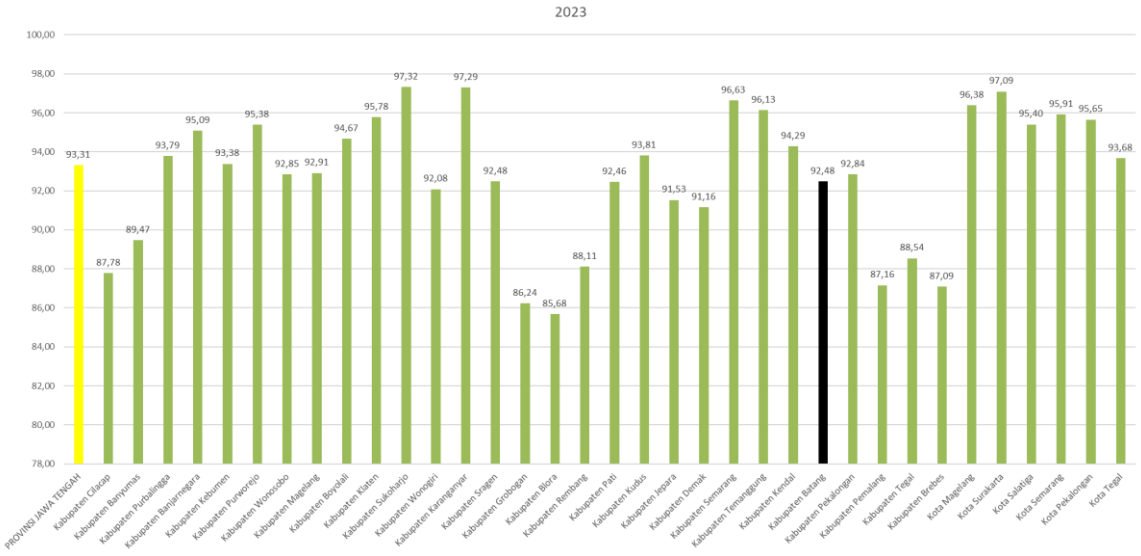

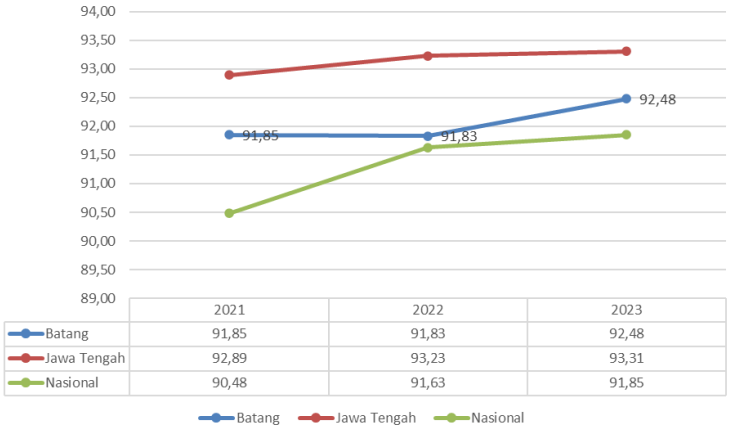

	2021	2022	2023
Batang	91,85	91,83	92,48
Jawa Tengah	92,89	93,23	93,31
Nasional	90,48	91,63	91,85

Batang Jawa Tengah Nasional

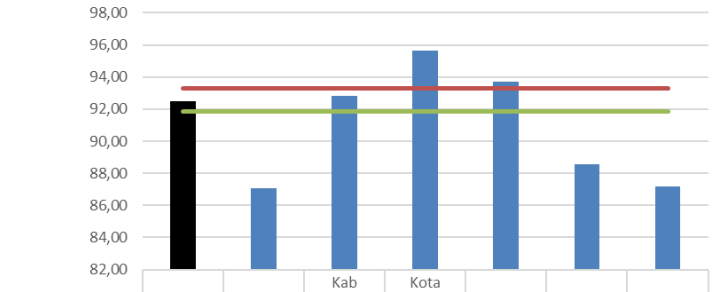

	Batang	Brebes	Kab Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Tegal	Kab Tegal	Pemalang
Kab/Kota	92,48	87,09	92,84	95,65	93,68	88,54	87,16
Jawa Tengah	93,31	93,31	93,31	93,31	93,31	93,31	93,31
Nasional	91,85	91,85	91,85	91,85	91,85	91,85	91,85

Kab/Kota Jawa Tengah Nasional

3. Indeks Pemberdayaan Gender

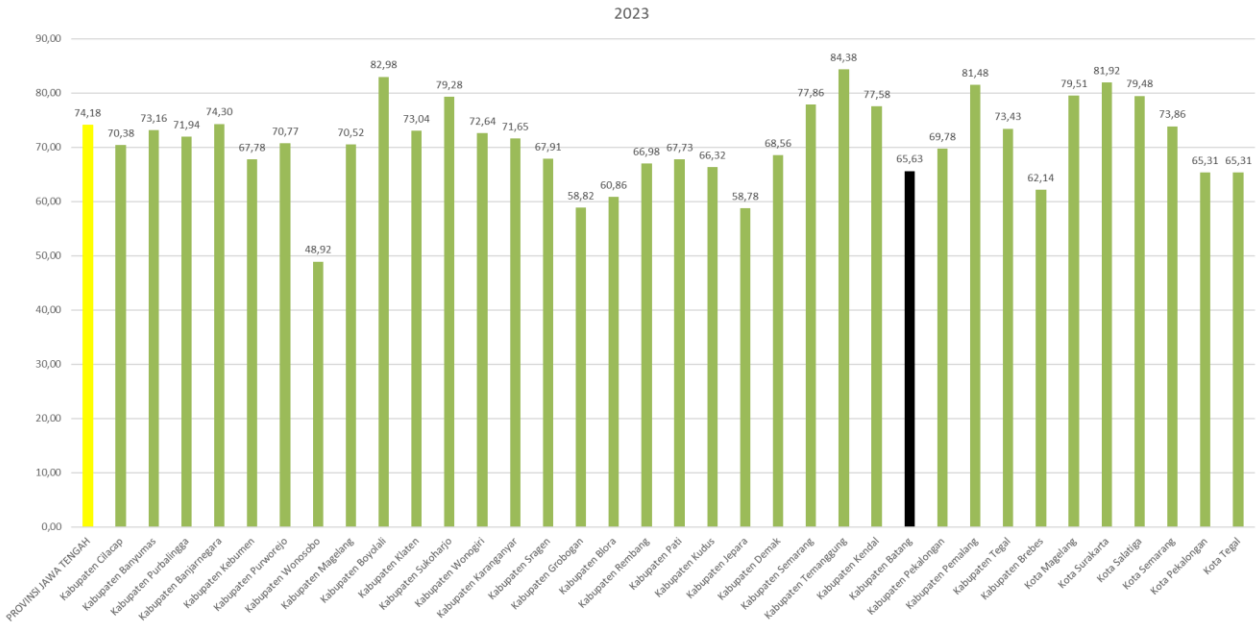

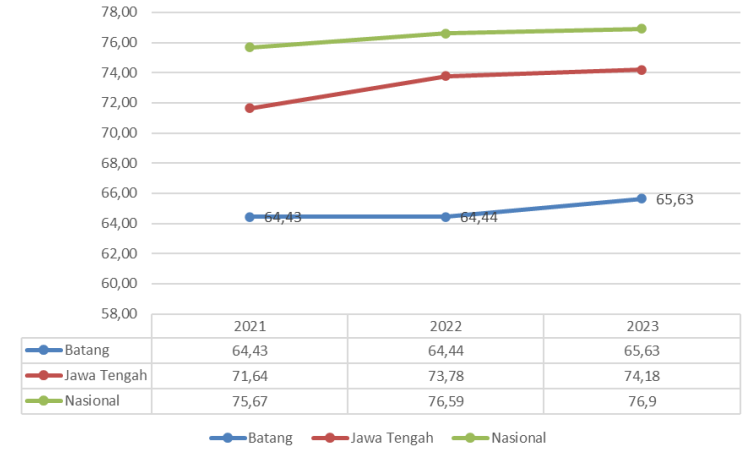

	2021	2022	2023
Batang	64,43	64,44	65,63
Jawa Tengah	71,64	73,78	74,18
Nasional	75,67	76,59	76,9

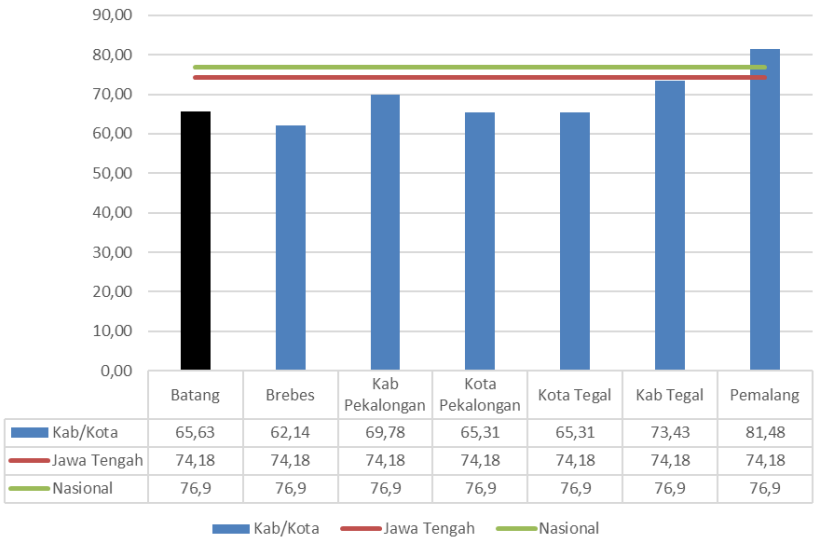

	Batang	Brebes	Kab Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Tegal	Kab Tegal	Pemalang
Kab/Kota	65,63	62,14	69,78	65,31	65,31	73,43	81,48
Jawa Tengah	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18	74,18
Nasional	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9	76,9

[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)

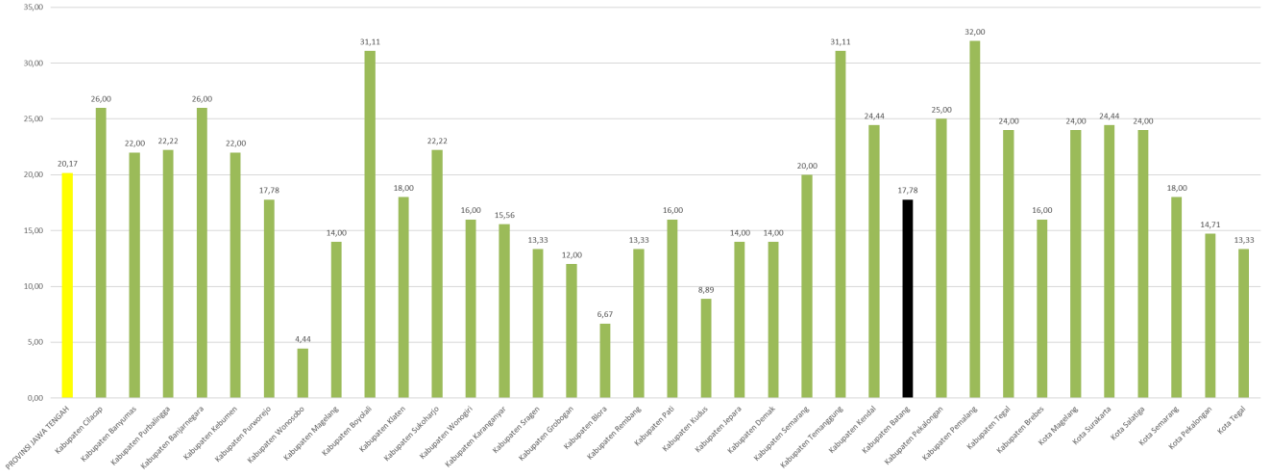

[IDG] Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)

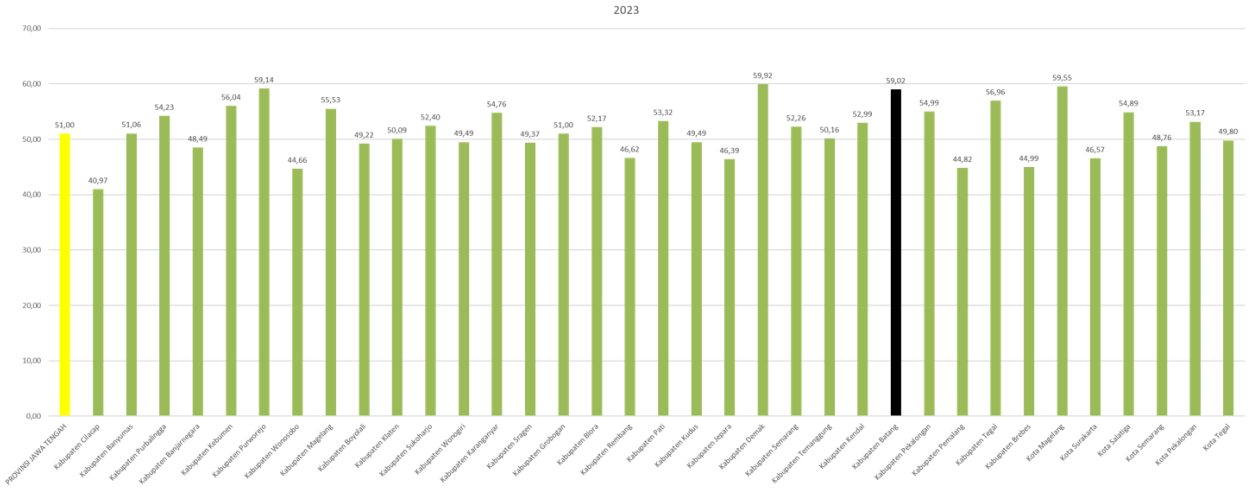

[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)

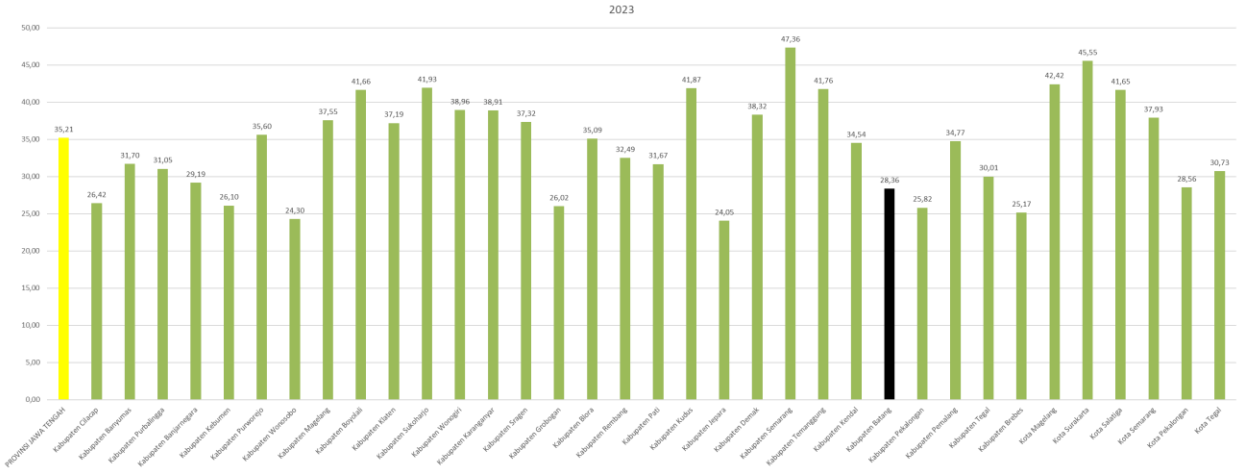

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Batang telah dilaksanakan sejak ditetapkan Peraturan Presiden tentang PUG. Bab ini akan menjelaskan tentang penyelenggaran PUG di Kabupaten Batang dengan melihat 3 (tiga) variabel utama yaitu variabel Pelembagaan PUG; Penyelenggaran PUG dalam Pemerintahan; dan Inovasi.

1. PELEMBAGAAN PUG

1.1 Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Batang menggunakan kebijakan berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020 tentang Perubahan atas

Keputusan Bupati Batang Nomor 411/087/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang. Kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 2022 DP3AP2KB mengusulkan Perda PUG Inisiasi Dewan dan setujui untuk diusulkan pada tanggal 23 September 2022. Proses Raperda PUG Kabupaten Batang pada tahap pembahasan dengan Kemenkumham per tanggal 10 Oktober 2023.

1.2 SDM dan Internalisasi PUG

Bapelitbang selaku ketua Pokja PUG telah menyelenggarakan pelatihan PPRG bersama dengan DP3AP2KB Kab. Batang. Pelatihan dilakukan sejak tahun 2022 dan mengundang seluruh Kasubag Program atau Perencana, SDM teknis dan SDM pemantau di Kab. Batang. Pada tahun 2022 SDM APIP dan P2UPD yang terlatih PUG sebanyak satu orang, sedangkan pada tahun 2023 seluruh PPUPD telah mengikuti PUG.

Pemerintah Kabupaten Batang telah memiliki *Gender Champions*. Pemerintah Kabupaten Batang memberikan piagam penghargaan yang diberikan oleh Bupati Batang kepada Tatik Setianingsih selaku Ketua Sanggar Merti Desa atas dedikasnya dalam menggerakan masyarakat berasaskan kesetaraan gender. Hingga saat ini Tatik Setianingsih tetap terus bergerak untuk memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki Focal Point PUG. Di Kabupaten Batang Focal Point PUG berada pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh OPD di Kabupaten Batang sudah melaksanakan PUG salah satunya dengan membentuk Focal point di setiap OPD dan memiliki Fasilitator PUG. Fasilitator PUG dihasilkan melalui *"Training of Facilitator (ToF)* PPRG bagi Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah" yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Fasilitator setiap tahun aktif menjadi peserta kegiatan yang berkaitan dengan PUG dan pada tahun 2022 menjadi fasilitator dalam Pelatihan PPRG di Kabupaten Batang.

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang diatur dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020. Kelompok Kerja

(Pokja) PUG beranggotakan seluruh OPD sesuai dengan Keputusan Bupati Batang tersebut.

Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan internalisasi PUG di lingkup internal. Sejak tahun 2022, Kabupaten Batang melalui Bapelitbang selaku ketua Pokja PUG menyelenggarakan Kegiatan Simulasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan mengundang seluruh SDM Perencana, SDM teknis, SDM pemantauan dan pengawasan. Disisi lain, Focal Point setiap OPD melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan PUG tingkat instansi.

1.3 Data Terpilah

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki sistem data terpilah. Sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dan SITIKA Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang juga melakukan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah seperti:

a) Profil Gender Kab. Batang
b) https://batangkab.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3
c) https://bappelitbang.batangkab.go.id/ppid/?p=2
d) https://sitika.batangkab.go.id/

Selain data diatas, seluruh OPD memiliki data terpilah sektoral di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS.

2. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN

2.1 Perencanaan

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan yaitu melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/087/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang. Kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Bapelitbang Kabupaten Batang Nomor 411/011.1/2021 Selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang

tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Batang.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Batang merupakan salah satu permasalahan pembagunan daerah yang penting. Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:

a) Masih adanya kesenjangan gender di beberapa bidang;

b) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, swasta dan legislatif;

c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak;

d) Belum terpenuhinya beberapa indikator KLA dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Isu Strategis

Dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Batang, PUG masuk dalam isu strategis Peningkatan Kualitas SDM terutama melalui upaya peningkatan derajat kesehatan. Di Kabupaten Batang masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun, dari 127,27 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 159,80. Peningkatan ini, antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Namun persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi.

Pada tahun 2019 AKI mengalami penurunan menjadi sebesar 111,08 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan

menjadi sebesar 109,36 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5 ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan AKI yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Dari angka 273,43 per 100.000 KH (atau setara dengan 33 kasus), 157,42 KH (atau setara dengan 19 kasus kematian ibu) disebabkan oleh Covid-19, sedangkan 14 kasus lainnya (atau setara dengan 116,01 per 100.000 KH) disebabkan oleh penyakit penyerta tidak menular seperti jantung, hipertensi dan TB.

Visi Misi Kabupaten Batang 2005-2025

PUG di Kabupaten Batang juga tercermin dalam Visi dan Misi Kabupaten Batang. Visi Kabupaten Batang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Batang adalah sebagai berikut “Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan”.

Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap stakeholders, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif,
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi,
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis pada profesionalisme, kapasitas, kapabilitas, dan jejaring,
4. Peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang pengembangan kawasan berbasis pada kemampuan dan potensi lokal,
5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang sejahtera, tenteram, tertib, aman, demokratis, dan kondusif,
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2023-2026

PUG di Kabupaten Batang juga telah menjadi bagian dari Tujuan I pada dokumen Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2023-2026. Tujuan I tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Melalui tujuan pertama ini, Pemerintah Kabupaten Batang, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup dan kehidupan sekurangnya dari aspek:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Batang, dan menurunkan kesenjangan antar kelompok pengeluaran.
d. Peningkatan harmoni kehidupan, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan didukung oleh penyediaan dan pemerataan infrastruktur.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Daya Saing Daerah, serta dijabarkan dalam sasaran :

a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Perkapita.
c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, dengan indikator sasaran Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terbuka.
d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur.

e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PUG Kabupaten Batang juga telah menjadi bagian dari analisis SWOT dalam menentukan Strategi Pembangunan Daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor eksternal dan internal yang melekat pada masing-masing isu.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, Kabupaten Batang menghasilkan beberapa strategi yaitu:

1. ST.1. Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi.
2. ST.2. Penguatan kolaborasi multipihak untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja.
3. ST.3. Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.
4. ST.4. Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis.
5. ST.5. Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.
6. ST.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca.

7. ST.7. Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
8. ST.8. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor industri.
9. ST.9. Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan daerah.
10. ST.10. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis.
11. ST.11. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR.
12. ST.12. Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan.
13. ST.13. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan beban pengeluaran masyarakat miskin.
14. ST.14. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana.
15. ST.15. Peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Arah Kebijakan 2023-2026

PUG Kabupaten Batang dicanangkan sebagai salah satu bagian Arah Kebijakan 2023-2026 melalui Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak. Arah Kebijakan ini diturunkan dalam beberapa arahan kebijakan yaitu:

a. Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
b. Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelataran Anak

c. Perwujudan Kabupaten Layak Anak

Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan melalui analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan yang dituangkan dalam penyusunan sasaran RPD Kabupaten Batang 2023-2026. Sasaran RPD Kabupaten Batang yang secara khusus membahas tentang kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Perkapita.
c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, dengan indikator sasaran Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terbuka.
d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur.
e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Kerangka Pendanaan

PUG Kabupaten Batang telah dimasukkan dalam Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Batang yaitu pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Kerangka Pendanaan PUG dilakukan melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana program prioritas sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD
b. Program Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi

perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini diarahkan pada pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak.

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

2.2 Penganggaran

Kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan dan penganggaran didukung melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/087/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang. Surat Keputusan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Bapelitbang Kabupaten Batang Nomor 411/011.1/2021 Selaku Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Batang.

Penganggaran responsif gender diwujudkan dalam kegiatan/sub kegiatan responsif gender pada masing-masing OPD terutama OPD Bidang Sosial. OPD bidang sosial tersebut meliputi Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup. Namun demikian saat ini belum ada kegiatan/sub kegiatan responsif gender pada Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan. Sebanyak 85% OPD di Kabupaten Batang memiliki Anggaran Responsif Gender

2.3 Pelaksanaan

2.3.1 Output Kegiatan responsif gender

Output dari kegiatan/sub kegiatan responsif gender, kegiatan afirmasi dan/atau kegiatan pemberdayaan perempuan sesuai amanat UU 23/2014 telah dilaksanakan dalam berbagai bidang meliputi:

a) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
b) Bidang Hukum
c) Bidang Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, dll)
d) Bidang Ekonomi (Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dll)
e) Bidang Lainnya (terkait dengan SDG's; dan selain bidang 1.1 s/d 1.4)

Unsur masyarakat terlibat dalam pencapaian output bidang politik dan pengambilan keputusan melalui keterlibatan aktor berikut ini:

a) Lembaga Masyarakat
b) Media massa
c) Dunia usaha
d) Akademisi

Lembaga Masyarakat Kabupaten Batang terlibat dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Batang yang didalamnya terdapat lembaga lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi dan lainnya. Pemda Kabupaten/Kota memiliki Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP), sebagaimana Amanat UU 23/2014?

a) Lembaga yang dikembangkan oleh Pemerintah : pada tahun 2021 Kabupaten Batang berbentuk PUSPAGA SAMAWA
b) Lembaga yang dikembangkan oleh Masyarakat : Lembaga Penyedia Layanan oleh Masyarakat Sanggar Merti Desa

LPLPP di Kabupaten Batang belum terstandarisasi. Ketersediaan LPLPP di Kabupaten Batang pada tahun 2022 berbentuk Puspaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang nomor: 411/02/2023 tentang Perubahan atas keputusan kepala dinas pemberdayaan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten batang Nomor :411/76/2020 tentang pembentukan pusat pembelajaran keluarga (puspaga).

Jumlah perempuan pelopor pembangunan (dalam bentuk "Suara dan Aksi Perempuan Pelopor" atau SIAP) tergabung dalam organisasi wanita (GOW) Kab. Batang. Anggotanya terdiri GOW Batang terdiri dari 25 organisasi, diantaranya Dharma Wanita Persatuan (DWP), Kerta PWRI, Bhayangkari, Persit, Dharmayukti, Dian Kemala, Perip, Ikatan Istri Dewan, dan lainnya. Dari organisasi sosial keagamaan Aisyiah, Nasiatul Aisyiah, Muslimat, Fatayat,

Salimah, Asyamil, Wanita Islam, Wanita Kristen Republik Indonesia (WKRI), Wanita Syarikat Islam, dan WKKB.

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki Pusat Informasi Sahabat Perempuan yaitu melalui layanan Hotline P2TP2A Kabupaten dan Puspaga Samawa Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki kerangka *He For She* yang pelaksanaannya bersamaan dengan BASS (Bapak Asuh Stunting). Gerakan *He For She* diharapkan dapat lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada Stunting. Pemerintah Kabupaten Batang memiliki kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) sesuai Amanat UU 23/2014. Kegiatan yang diperuntukan pecegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun 2022 melalui kegiatan Lembaga penyedia layanan dibawah ini, yaitu

a) P2TP2A Kab. Batang
b) Puspaga SaMaWa Kab. Batang
c) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Batang :

a) partisipasi dari TP. PKK dalam Kegiatan kader PKK Kabupaten Batang mendapatkan Sosialisasi pencegahan kekerasan
b) Partisipasi media massa dalam pemberitaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sejak Dini di Kabupaten Batang
c) Ketersediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan

Pemerintah Kabupaten Batang sudah menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan sesuai Amanat UU 23/2014 dengan adanya Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang dengan SK Bupati Batang Nomor 411/196/2020 tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Batang melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan atau LPLPHP (Amanat UU 23/2014) dalam bentuk UPTD PPA (Permen PPPA No. 2 Tahun 2022). Pada tahun 2022 Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga Perempuan

Kabupaten Batang masih berbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 411/196/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/64/2017 tentang pembentukan P2TP2A. yang mana dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan, akhir tahun 2022 pencanangan pembentukan UPTD. Proses pembentukan UPTD berjalan hingga saat ini. Adapun Tim P2TP2A beranggotakan instansi yang berkompeten dibidangnya

UPTD PPA Kabupaten/Kota sudah memiliki Anggaran dalam APBD. Kabupaten Batang melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan atau LPLPHP dalam bentuk P2TP2A Kab. Batang, dilampirkan anggaran P2TP2A tahun 2022.

Pada tahun 2022 Kabupaten Batang melakukan penguatan dan pembangan lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP) melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 411/196/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/64/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). yang mana dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan, akhir tahun 2022 pencanangan pembentukan UPTD. Proses pembentukan UPTD berjalan hingga saat ini.

Pada tahun 2022 Kabupaten Batang melakukan penguatan dan pembangan lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP) melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 411/196/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/64/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan dimana pada akhir tahun 2022 lembaga ini dicanangkan berbentuk UPTD. Proses pembentukan UPTD berjalan hingga saat ini.

Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender. Beberapa kegiatan diantaranya:

a) Puspaga SAMAWA bekerja sama dengan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) memberikan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan pada perempuan dan
b) Puspaga memberikan konsultasi keluarga
c) Puspaga memberikan konseling pranikah usia anak
d) Puspaga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Disnaker dalam memberikan layanan rujukan

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pada tahun 2022 dimana Pemerintah Kabupaten Batang giat mengadakan pembinaan desa wisata yang menerapkan kesetaraan gender dalam pelaksanaanya oleh Disparpora.

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (pemilahan jenis kelamin setiap komponennya). IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding lai-laki berada pada angka 100. Jika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

IPG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 sebesar 90,65, mengalami kenaikan menjadi 90,65 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 naik menjadi 91,08 dan kembali naik di tahun berikutnya hingga sebesar 91,42 pada tahun 2020 dan menjadi 91,86 di

tahun 2021. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 92,48 namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional 91,27.

Capaian IDG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2018 sebesar 66,29 meningkat menjadi 64,44 pada tahun 2022, namun demikian capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 73,78 dan Nasional 76,59.

Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di bawah angka nasional IKG Nasional Tahun 2022 = 0.459. Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di bawah angka provinsi IKG Propinsi 2022 = 0.371 dimana IKG Kabupaten Tahun 2022 = 0.406. Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Batang tidak dihitung sampai tingkat kab.

Pemerintah Kabupaten Batang menyediakan ruang laktasi di lingkungan kantor perangkat daerah dan instansi vertikal. Ruang laktasi juga terdapat di fasilitas umum (Pasar Batang). Tempat penitipan anak pemerintah kabupaten di sah kan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Nomor: 15/KEP/PKK/III/2021 tentang Penetapan Pengelola dan Pengasuh Ruang Bermain Anak Sahabat Bunda Pasar Batang.

Angka Kekerasan terhadap Perempuan tingkat Kabupaten menurun Tahun 2021 sebanyak 20 dimana tahun 2022 menurun menjadi 16 kasus. Pemerintah Kabupaten Batang juga memiliki Layanan Pengaduan Kekerasan di Kantor Pemerintah ada 16 meliputi 1 ditingkat Kabupaten, dan 15 ditingkat Kecamatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Batang juga memiliki Layanan Pengaduan Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Setiap sekolah yang ada di Kabupaten Batang sudah memliki Layanan Pengaduan Kekerasan di Sekolah masing-masing. Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten batang menganggarkan sebesar Rp. 1.500.000.0000 untuk pentaan trotoar dan drainase di jalan dr. Sutomo yang mendukung sarana dan prasarana rensonsif

gender. Sebanyak 16 perempuan yang mendapat manfaat layanan perlindungan pada tahun 2022.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengadakan kegiatan sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG). Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari di gedung Pramuka Kwartir Batang dengan peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Adapun tujuan dari sosialisasi PUG ini adalah meningkatkan pemahaman bagi peserta program pengarus utamaan gender tentang pendidikan perempuan dan ekonomi, selain itu juga dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG)di Kabupaten Batang. Sosialisasi DRPPA melalui kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Bapelitbang Kabupaten Batang pada tanggal 22 Februari 2022. DRPPA Kab. Batang belum terbentuk pada tahun 2022 dan baru sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, tetapi dalam pelaksanaannya DP3AP2KB melakukan sosialisasi secara masif melalui kegiatan bidang KBPP. Adapun di Kampung KB ada 3 Desa yang ada di Kec. Kandeman, Kec. Banyuputih dan Kec. Warungasem Kab. Batang pada tahun 2022 yang rencananya akan dibentuk DRPPA.

2.4 Pemantauan

Regulasi yang mengatur pemantauan penyelenggaraan PUG dikabupaten Batang adalah Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/087/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang. Yang mana direncanakan akan disusun Perbup setelah Perda PUG Kab. Batang disahkan. Pada tahun 2022 pemantauan pelakanaan PUG dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan oleh Inspektorat, selaku anggota Pokja dan tim teknis PUG.

2.5 Evaluasi

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Batang telah dilakukan evaluasi oleh Insepektorat pada tahun 2022. Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

melakukan pengawasan PUG dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksaan Penganggaran Responsif Gender atas Rencana Kerja dan Anggaran TA 2022.

Seluruh OPD Kabupaten Batang menindaklanjuti hasil evalusi yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Batang pada tahun 2022, seperti penyusunan Perda PUG Inisiasi Dewan pada tahun 2023 dan penggaran RAD PUG pada tahun 2024 setelah Perda PUG disahkan

2.6 Pengawasan

Regulasi yang mengatur Pengawasan penyelenggaraan PUG dikabupaten Batang adalah Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/087/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang. Yang mana direncanakan akan disusun Perbup pelaksanaan Perda PUG Kabupaten Batang setelah pengesahan. Kemudian Inspektorat Kabupaten Batang terus meningkatkan komitmen dalam penyelenggaraan PUG dengan membuat pedoman teknis reviu PPRG.

Permohonan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bapelitbang selaku Ketua Pokja PUG Kabupaten Batang kepada Inspektur Daerah Kabupaten Batang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat Inspektorat perihal Permintaan Dokumen Bahan Pemeriksaan PPRG tahun 2022 kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang. Kemudian dilakukan Rakor Tim Teknis persiapan pengawasan oleh Inspektorat, selanjutnya pada akhir Oktober 2022 dilaksanakan Desk di Aula Integritas Inspektorat Kabupaten Batang. Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan audit internal atas komitmennya dalam penyelenggaran PUG tahun 2022 pada akhir bulan Oktober di aula Integritas Inspektorat.

2.7 Pelaporan

Regulasi yang mengatur Pelaporan penyelenggaraan PUG dikabupaten Batang pada tahun 2022 adalah Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 411/177/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 411/087/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang. Yang mana direncanakan akan disusun Perbup pelaksanaan Perda PUG Kabupaten Batang setelah pengesahan, pada Peraturan Bupati tersebut akan dijelaskan terkait Pelaporan Penyelenggaraan PUG.

Pelaporan penyelenggaraan PUG dalam Laporan Pemerintah Daerah berupa kalimat implisit atau tersirat yang menjelaskan hasil pelaksanaan kegiatan atas komitmen Daerah, berupa presentase capaian kinerja tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dalam LAKIP, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Sedangkan pelaporan penyelenggaraan PUG yang dijelaskan tersendiri, sebagaimana dimaksud pada indikator pertanyaan APE akan dilaksanakan saat Perda PUG Kabupaten Batang disahkan

Pada tahun 2022 Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) adalah DP3AP2KB Kab. Batang, sementara untuk PD lain akan disyrakatkan untuk menuangkan penyelenggaraan PUG dalam LAKIP setelah Perda PUG Kabupaten Batang disahkan.

3. INOVASI

Salah satu inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan yaitu Bengkel Kriya, yang mana bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan dalam bidang kewirausahaan

BAB VI
TUJUAN DAN SASARAN SERTA RENCANA AKSI PUG KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029

6.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 ditetapkan adalah Meningkatkan capaian pengarusutamaan gender yang berkeadilan yang diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Dimana variabel pembentuk IKG yaitu:

1. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir;
2. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
3. Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/sederajat menurut jenis kelamin;
4. Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
5. Tingkat partispasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

Selanjutnya sasaran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 adalah

1. Terwujudnya kualitas pembangunan gender yang berkesetaraan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender.

   Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.
2. Terwujudnya pemberdayaan gender yang responsif dan berkeadilan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.

   Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan

politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Selengkapnya target kinerja tujuan dan sasaran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. 1

Tujuan dan Sasaran PUG Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan capaian pengarusutamaan gender yang berkeadilan	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,397	0,390	0,386	0,380	0,376	0,370
A	Terwujudnya kualitas pembangunan gender yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,88	92,25	92,47	92,65	93,00	93,25
B	Terwujudnya pemberdayaan gender yang responsif dan berkeadilan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	64,44	65,25	65,75	66,25	66,75	67,25

6.2. RENCANA AKSI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 dirumuskan rencana aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 6. 2
Rencana Aksi Peningkatan IDG Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.		Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	%	85	85	87	87	90	90	DP3AP2KB	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi /advokasi Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	orang	0	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelom-pok	0	0	0	0	0	0	DP3AP2KB	
			Jumlah peserta	Orang	50	50	50	50	50	50	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	yang mengikuti pelatihan advokasi PUG									
			Jumlah peserta gender champion yang mendapat penghargaan	Orang	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
2	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		Jumlah parpol dan Lembaga Pendidikan yang mengikuti Pendidikan politik	Lembaga	10	11	11	11	11	11	Bakesbangpol	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis yang dirumuskan	Dok	11	12	12	12	12	12	Bakesbangpol	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
		Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	orang	8	9	9	9	9	9	Bakesbangpol	
		Jumlah peserta mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dan peningkatan partisipasi politik	Jumlah peserta Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik perempuan	orang	1432	1200	1250	1300	1350	1400	Bakesbangpol	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	10	12	12	14	15	15	Disperindagkop UKM	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	5	5	5	5	5	Disperindagkop UKM	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	4	5	5	5	5	5	Disperindagkop UKM	
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;	Jumlah UMK difasilitasi	UMK	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;	Jumlah UMK difasilitasi	UMK	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;	Jumlah UMK difasilitasi	UMK	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
		"Koordinasi dan Sinkro-	Jumlah kegiatan Koordinasi	Kali	4	4	4	4	5	6	Disperindagkop UKM	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		nisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pember-dayaan Usaha Mikro"										
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha	%	60	60	65	70	70	75	Disperindagkop UKM	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			130	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	UMKM	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
			Jumlah event	Event	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Disperindagkop UKM	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			festival kuliner yang dilaksa- nakan									
			Jumlah UMKM yang menda- patkan fasilitasi pengembangan usaha	UMKM	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif	UMKM	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses pembiayaan permodalan	UMKM	100	100	120	120	125	150	Disperindagkop UKM	
			Jumlah usaha mikro yang mendapat sosialisasi fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	UMKM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disperindagkop UKM	NIHIL tidak ada
			Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	UMKM	15	15	16	17	17	20	Disperindagkop UKM	

Tabel 6. 3
Rencana Aksi Peningkatan IPG Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase capaian SPM pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	Disdikbud	
a		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD									Disdikbud	NA
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan perlengkapan PAUD	Sekolah	13	13	14	14	15	15	Disdikbud	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)	Siswa	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700	22.800	Disdikbud	
		Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK negeri yang difasilitasi	TK	13	13	14	14	15	15	Disdikbud	
			Jumlah Penerima dana Hibah	PAUD	585	585	585	585	585	585	Disdikbud	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									Disdikbud	
		Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar	Siswa	59.120	59.200	59.500	59.520	59.530	59.540	Disdikbud	
			Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	siswa	59.120	59.200	59.500	59.520	59.530	59.540	Disdikbud	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar	Siswa	59.120	59.200	59.500	59.520	59.530	59.540	Disdikbud	
			Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Siswa	59.120	59.200	59.500	59.520	59.530	59.540		

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD/MI yang diadakan	Paket								
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM	SD	454	454	454	454	454	454	Disdikbud	
			Jumlah penyelenggara SD inklusi	sekolah	454	454	454	454	454	454	Disdikbud	
			Jumlah SD/MI penyelenggara UAS yang difasilitasi	sekolah	454	454	454	454	454	454	Disdikbud	
			Penyusunan soal UAS SD/MI	kegiatan	1	1	1	1	1	1	Disdikbud	
			Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter	sekolah	454	454	454	454	454	454	Disdikbud	
		Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOS SD	Jumlah SD negeri yang mendapatkan BOS	SD	454	454	454	454	454	454	Disdikbud	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SMP									Disdikbud	
		Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	Jumlah peserta didik jenjang SMP yang difasilitasi biaya personil peserta didik	Siswa	21.000	21.050	21.100	21.150	21.200	21.250	Disdikbud	
			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	Siswa	21.000	21.050	21.100	21.150	21.200	21.250	Disdikbud	
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	umlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Siswa	21.000	21.050	21.100	21.150	21.200	21.250	Disdikbud	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa SMP/MTs yang diadakan	Paket	51	51	51	51	51	51	Disdikbud	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan UAS	sekolah	75	76	76	76	76	76	Disdikbud	
			Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM	sekolah	75	76	76	76	76	76		
			Jumlah SMP yang difasilitasi pendidikan karakter SMP	sekolah	75	76	76	76	76	76		
			Jumlah SMP yang difasilitasi FOP SMP	sekolah	75	76	76	76	76	76		
		Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS	Sekolah	75	76	76	76	76	76		
		Pengelolaan Pendidikan Non formal /Kesetaraan									Disdikbud	
		Sub kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik kesetaraan	Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personal peserta didik	peserta didik	460	470	480	490	500	510	Disdikbud	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			kesetaraan/nonformal									
			Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	peserta didik	460	470	480	490	500	510	Disdikbud	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga pendidikan kesetaraan/nonformal yang diadakan	Unit	1	1	1	1	1	1	Disdikbud	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A B C	org	460	470	480	490	500	510	Disdikbud	
			Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi pelaksanaan UNPK	lembaga	24	24	24	24	24	24	Disdikbud	
			Jumlah PNF yang terfasilitasi	lembaga	24	24	24	24	24	24	Disdikbud	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			penyelenggaran AKM									
			Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai Karakter	lembaga	24	24	24	24	24	24	Disdikbud	
			Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya	mapel	7	7	7	7	7	7	Disdikbud	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan EDS	Lembaga	24	24	24	24	24	24	Disdikbud	
			Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS	Lembaga	24	24	24	24	24	24	Disdikbud	
		Sub kegiatan: Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP	Lembaga	24	24	24	24	24	24	Disdikbud	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	%	86	88	90	92	94	96	RSUD Batang	
a		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit	%	88	95	100	100	100	100	RSUD Batang	
			Jml TT Perawatan Bulin RSUD Batang	unit	20	20	20	25	25	25	RSUD Batang	
			Jml TT Bersalin (Bed VK)	unit	7	7	7	10	10	10	RSUD Batang	
			Jml TT Bayi	unit	20	20	20	25	25	25	RSUD Batang	
			Jml Inkubator	unit	8	8	8	10	10	12	RSUD Batang	
			Jml Kunjungan Persalinan di RSUD	orang	605	615	620	630	640	650	RSUD Batang	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jml Persalinan melalui Sectio Cesar	orang	162	170	175	180	185	190	RSUD Batang	
			Jml Kematian Ibu	orang	-	-	-	-	-	-	RSUD Batang	
			Jml Kematian Bayi	orang	22	22	20	18	15	12	RSUD Batang	
b		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	%	97,6	97,8	98	98	98	99	RSUD Batang	
			Jml Bidan RSUD Batang	orang	73	73	75	75	78	78	RSUD Batang	
			Jml Petugas di PONEK	orang	15	15	17	17	18	18	RSUD Batang	
			Jml Petugas Anestesi di Ruang Operasi	orang	5	5	7	7	8	8	RSUD Batang	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORAN		Persentase ketersediaan sarana, prasarana	%	88	90	92	94	96	98	RSUD Limpung	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	GAN DANUPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar									
a		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit	%	90	96	100	100	100	100	RSUD Limpung	
			Jumlah TT Perawatan Bulin	unit	8	12	12	12	12	12	RSUD Limpung	
			Jumlah TT Bersalin (Bed VK)	unit	6	6	6	6	6	6	RSUD Limpung	
			Jumlah TT Bayi	unit	12	12	12	12	12	12	RSUD Limpung	
			Jumlah Inkubator	unit	7	8	9	10	11	12	RSUD Limpung	
			Jumlah Kunjungan Persalinan	satuan	147	200	210	220	230	240	RSUD Limpung	
			Jumlah Persalinan melalui Sectio Cesar	satuan	14	20	21	22	23	24	RSUD Limpung	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah Kematian Ibu	satuan	-	-	-	-	-	-	RSUD Limpung	
			Jumlah Kematian Bayi	satuan	7	7	6	5	4	3	RSUD Limpung	
b		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	%	97,6	97,8	98	98	98	99	RSUD Limpung	
			Jumlah Bidan	orang	44	44	44	44	44	44	RSUD Limpung	
			Jumlah Petugas di PONEK	orang	11	11	12	12	12	12	RSUD Limpung	
			Jumlah Petugas Anestesi di Ruang Operasi	orang	3	3	4	4	5	5	RSUD Limpung	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	**Bidang Kesehatan**											
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	
			Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas dan Fasyankes	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	
a		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk**									Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	10849	10800	10750	10700	10650	10600	Dinkes	
			Jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Orang	10497	10475	10450	10425	10400	10385	Dinkes	
			Jumlah kasus anemia	Orang	1861	1850	1840	1830	1820	1810	Dinkes	
			pada ibu hamil									
			Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	Orang	4	12	11	11	10	10	Dinkes	
			Jumlah ibu hamil yang memperoleh	Orang	10450	10400	10350	10300	10250	10200	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			pelayanan antenatal K1/K4 sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu									
			Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Orang	379	350	325	300	275	250	Dinkes	
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK Output)	Set	24	24	24	30	30	30	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	10497	10475	10450	10425	10400	10385	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Bayi	10509	10500	10475	10450	10425	10400	Dinkes	
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (IKK Output)	Set	24	24	24	30	30	30	Dinkes	
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output)	Orang	24	24	24	30	30	30	Dinkes	
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neoatal esensial sesuai standar (IKK Output)	Orang	932	932	932	932	932	932	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah bumil KEK yang mendapatkan suplemen gizi	Orang	1027	1000	975	950	925	900	Dinkes	
			Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal	Orang	tad	tad	tad	tad	tad	tad	Dinkes	
			Jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Anak	1205	1200	1190	1180	1170	1160	Dinkes	
			Jumlah balita gizi buruk	Anak	170	165	160	155	150	145	Dinkes	
			Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif	Anak	5719	5818	6067	6316	6566	6898	Dinkes	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) HIV dan	Pekerjaan	11800	16000	16000	16000	16000	16000	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		dan Tidak Menular	Sipillis yang diadakan (DAK)									
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output) kesehatan sesuai standar (SPM)	Set							Dinkes	
			Jumlah penderita ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	540	2.138	2.154	2.170	2.186	2.202	Dinkes	
			Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	8884	7620	6573	6370	6170	5970	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Orang	15257	15357	15457	1550	1557	1560	Dinkes	
			Jumlah kasus HIV/AIDS	Kasus	305	330	355	360	365	370	Dinkes	
			Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	Kasus	1645	1411	1217	1017	817	617	Dinkes	
			Jumlah kasus Hepatitis B	Kasus	230	235	240	245	250	255	Dinkes	
			Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan	Kasus		36	35	33	30	28	Dinkes	
			Jumlah kasus filaria yang ditangani	Kasus	3	3	3	3	3	3	Dinkes	
			Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan	Jiwa	34.992	226.000	226.150	226.300	226.450	226.500	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg									
			Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes	Jiwa	2.372	9.500	12.500	15.500	18.500	21.500	Dinkes	
			Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)	Set	283	293	303	313	323	343	Dinkes	
			Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk	Set	283	293	303	313	323	343	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)									
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)	Set	283	293	303	313	323	343	Dinkes	
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi ODGJ berat (IKK Output)	Set	21	31	41	51	61	71	Dinkes	
			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan	Set	10000	9000	9000	8500	8500	8000	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)									
			Jumlah dukungan logistik	Unit							Dinkes	
			kesehatan yang tersedia untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)	test	11800	16000	16000	16000	16000	16000		
			Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)	orang	105	105	105	105	105	105	Dinkes	
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi	orang	105	105	105	105	105	105	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			penderita hipertensi (IKK Output)									
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)	orang	105	105	105	105	105	105	Dinkes	
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi penderita ODGJ berat (IKK Output)	orang	42	63	63	94	94	115	Dinkes	
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)	orang	120	120	120	120	120	120	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	120	120	120	120	120	120	Dinkes	
			bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)									
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit	Orang	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	Dinkes	
			Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya transport rujukan dan living cost	Orang	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
			Jumlah masyarakat penerima bantuan premi	Orang	117570	106283	106283	106283	106283	106283	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			asuransi BPJS PD dan PBPU Kelas 3									
			Jumlah pertemuan koordinasi pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kali	3	3	3	3	3	3	Dinkes	
			Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan ke Puskesmas dan Rumah Sakit	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinkes	
			Jumlah peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)	Jiwa	829324	830000	830000	835000	835000	835000	Dinkes	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS	Bulan	0	0	0	0	0	0	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Operasional	belanja operasional Puskesmas, IFK dan Labkesda	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinkes	
		Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
			Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Bupati	Orang	5	5	5	5	5	5	Dinkes	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Workshop Penunjang Akreditasi Puskesmas	Kali	0	1	1	1	1	1	Dinkes	
			Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal (PPME)	Puskesmas	21	21	21	21	21	21	Dinkes	
			Peningkatan & Jumlah penilaian Mutu Internal	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			(PPMI) yang dilaksanakan									
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit	Kali	20	52	52	52	52	52	Dinkes	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									Dinkes	
		Peningkaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinkes	
			Jumlah pertemuan	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			fasilitasi peningkatan									
			mutu fasyankes								Dinkes	
			Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana	Orang	26	26	26	26	26	26	Dinkes	
			Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes	Kali							Dinkes	
			Jumlah pendampingan akreditasi fasyankes	Kali							Dinkes	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah unit Puskesmas yang dibangun	Unit	1	2	2	2	2	2	Dinkes	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat kesehatan Labkesda yang diadakan	Paket							Dinkes	
			Jumlah unit Labkesda yang dibangun	Unit							Dinkes	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pertemuan fasilitasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber DAK	Kali							Dinkes	
			Jumlah Puskesmas/pustu yang direhabilitasi/ dipelihara	Lokasi							Dinkes	
			Jumlah DE yang disusun								Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	Lokasi							Dinkes	
			Jumlah IPAL Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin								Dinkes	
			Jumlah Genset Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin								Dinkes	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas keliling roda 2 yang diadakan bersumber DAK	Unit							Dinkes	
			Jumlah puskesmas keliling roda 4 yang diadakan bersumber DAK	Unit							Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Pengadaan ambulan PSC (DAK)	Unit							Dinkes	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang diadakan (DAK)								Dinkes	
			Pembangunan gedung PSC (DAK)	Unit							Dinkes	
			Pengadaan sistem informasi PSC (DAK)	Unit							Dinkes	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)	Unit	0	6	12	12	15	15	Dinkes	
			Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAK)	Paket	128	180	180	180	180	180	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
											Dinkes	
											Dinkes	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan (DAU)	Pekerjaan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah pengadaan obat (DAK)	Pekerjaan	1	1	1	1	1	1	Dinkes	
			Jumah pengadaan alat kesehatan untuk kegiatan vaksinasi covid-19	Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
			Jumlah pengadaan Bahan Medis Habis Pakai untuk kegiatan Vaksinasi Covid- 19	Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Reagen dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan (DAK)	Pekerjaan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah Cartridge TCM yang diadakan (DAK)	Unit	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
			Jumlah BTI DBD yang diadakan (DAK)	Botol	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rehabilitasi puskesmas/pustu	Lokasi							Dinkes	
			Jumlah DE yang disusun								Dinkes	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi	Unit	304	320	320	340	340	350	Dinkes	
			Jumlah alat kesehatan	Jenis	0	0	0	0	0	0	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			(Puskesmas, Labkesda) yang diservice									
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									Dinkes	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinkes	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**	%							Dinkes	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia									Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota										
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Kab yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengawasan perijinan tenaga kesehatan	Kali	24	24	24	24	24	24	Dinkes	
			Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)	Orang	500	600	600	600	600	600	Dinkes	
			Jumlah dokumen SDMK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)									
			Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan	Orang	40	40	40	40	40	40	Dinkes	
			Jumlah sosialisasi Uji Kompetensi tenaga kesehatan	Kali	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan belanja hibah IBI Kabupaten Batang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	0		Dinkes	
			Jumlah kegiatan belanja hibah PPNI Kabupaten Batang yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0	0	0	0	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah pertemuan teknis dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19	Kali	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									Dinkes	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring pelaksanaan vaksinasi covid-19	bulan	0	0	0	0	0	0	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	%	90	90	93	93	95	95	Dinkes	
			Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes	
			Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	%							Dinkes	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha									Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek dan Toko Obat yang dilakukan pengawasan perizinan (DAK)	Lokasi	96	100	102	104	106	108	Dinkes	
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan (DAU)	Lokasi	40	42	44	45	46	47	Dinkes	
			Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Bupati	Orang	1	1	1	1	1	1	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									Dinkes	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin	Jumlah Petugas Pengelola Obat di Fasilitas Kefarmasian yang mengikuti Bimtek	Orang	120	120	120	120	120	120	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu										
		yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
			Jumlah petugas pengawas pangan yang mengikuti pelatihan DFI	Orang	0	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah petugas pengawas pangan yang mengikuti pelatihan PKP	Orang	0	1	1	1	1	1	Dinkes	
			Jumlah IRTP yang telah mengikuti Bimtek Keamanan Pangan	Orang	120	80	80	80	80	80	Dinkes	
			Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan	Lokasi	120	80	80	80	80	80	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			dalam rangka penerbitan SPP-IRT									
			Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market	Lokasi	120	125	125	130	130	135	Dinkes	
			Jumlah sampling dan pengujian PIRT	Sampel	52	52	52	55	55	55	Dinkes	
			Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan	Orang	50	60	60	70	70	70	Dinkes	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran									Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		dan Depot Air Minum (DAM)										
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan penerbitan SLHS	Lokasi	468	60	80	100	120	140	Dinkes	
			Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan makanan minuman	Lokasi	314	60	80	100	120	140	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**Persentase Rumah Tangga Sehat**	%	99,19	99	99	99	99	99	Dinkes	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									Dinkes	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan Program Pemberdayaan Kesehatan yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	4	Dinkes	
			Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kali	17	17	17	17	17	17	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Saka Bhakti Husada (SBH) yang dilaksanakan									
			Jumlah kegiatan refreshing Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi ke masyarakat yang dilaksanaka n	Kegiatan	45	45	45	45	45	45	Dinkes	
			Jumlah belanja cetak pemberdayaan kesehatan yang dilaksanakan	Pekerjaa n	3	3	3	3	3	3	Dinkes	
			Jumlah Kegiatan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader	Kali	1	1	1	1	1	1	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Teladan Tk. Kab yang dilaksanakan									
			Jumlah pemberdayaan Pondok Pesantren yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan kesehatan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	45	45	45	45	45	45	Dinkes	
			Jumlah kegiatan penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			respon penyakit yang dilaksanakan									
			Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	22	Dinkes	
			Jumlah pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas yang dilaksanakan	Pekerjaan	1	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan BOK kefarmasian yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan sosialisasi vaksinasi Covid-19 yang	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			dilaksanakan									
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									Dinkes	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kab yang dilaksanakan	Kali	0	0	0	0	0	0	Dinkes	
			Jumlah Kegiatan Dokumentasi dan Dekorasi Publik	Pekerjaan	2	2	2	2	2	2	Dinkes	
			Jumlah kegiatan cetak promosi kesehatan	Pekerjaan	3	3	3	3	3	3	Dinkes	
			Jumlah pertemuan lintas	Kali	8	8	8	8	8	8	Dinkes	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			program dan lintas sektor yang dilaksanakan									

Tabel 6. 4

Rencana Aksi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	74	75	75	76	77	77	DP3AP2KB	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan hasil kegiatan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Laporan	12	12	12	12	12	12	DP3AP2KB	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penurunan Angka Perka-winan di bawah 21 Tahun	%	41,56	37	35	32	30	25	DP3AP2KB	
a		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Terbentuknya kelompok kerja untuk mendukung KIE	kelompok kerja / Tim	3	3	3	5	5	5	DP3AP2KB	
		Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kegiatan pengendalian penduduk sesuai dengan kearifan budaya lokal	kali	2	2	2	2	2	2	DP3AP2KB	
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga	Kelompok	6	6	6	6	6	6	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			berencana melalui penyuluhan langsung									
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB	Balai	15	15	15	15	15	15	DP3AP2KB	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota									DP3AP2KB	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan	Unit	3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari Keluarga Miskin yang mendapat pelayanan KB	Orang	100	120	144	172	206	246	DP3AP2KB	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Unmeet need KB	%		11,04	10,5	10	9,5	9	DP3AP2KB	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksanannya kegiatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, PIK R BKL dan UPPKA)	Kegiatan	5	10	10	10	10	10	DP3AP2KB	
		Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta	Jumlah kegiatan/fasilitasi PPKBD, KKB, Kelompok Kegiatan,	Kegiatan	175	350	350	350	350	350	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Rumah Data Kependudukan dan PPKS									

Tabel 6. 5

Rencana Aksi Urusan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	Program Pemberdayaan Sosial											
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)										
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		Bulan	0	0	0	0	0	0	Dinsos	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota										
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja	Jumlah rakor pembinaan PSKS yang	Kali	1	2	2	2	2	2	Dinsos	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinsos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah TKSK yang difasilitasi	orang	15	15	15	15	15	15	Dinsos	
			Jumlah bulan Fasilitasi	bulan	12	12	12	12	12	12	Dinsos	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Jumlah lembaga Masyarakat yang difasilitasi hibah	Lembaga	0	10	20	30	40	50		

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										
	Program Rehabilitasi Sosial										Dinsos	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									Dinsos	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu	Orang	60	60	60	60	60	60	Dinsos	
			Jumlah Wanita Rawan Sosial yang mendapat pelatihan	Orang	0	10	10	10	10	10	Dinsos	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah Pelayanan Anak Rentan Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinsos	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah kelayan yang dilayani	Orang	23	23	23	23	23	23	Dinsos	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									Dinsos	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal	Pasang	0	0	10	10	10	10	Dinsos	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kartu Identitas Anak										
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										Dinsos	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemutakhiran data	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinsos	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi BPNT	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinsos	
			Jumlah bulan pelayanan SLRT	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinsos	
			Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinsos	
		Fasilitasi Bantuan	Jumlah bulan	Bulan	12	12	12	12	12	12	Dinsos	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Sosial Kesejahteraan Keluarga	pendampingan PKH									
			Prosentase KPM PKH yang mendapat sosialisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinsos	

Tabel 6. 6

Rencana Aksi Bidang Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1												
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persentase	0						Disnaker	
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									Disnaker	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampil-	Jumlah pelatihan untuk buruh rokok (DBHCHT) yang diselenggarakan	kali	4	2	2	2	2	2	Disnaker	

		an bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dg BLK melalui kios 3 in 1	Perusahaan						Disnaker	
			Jumlah penganggur yang dilatih	orang	96+BLK					Disnaker	
			Lulusan bersertifikat kompetensi	orang							
	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	persentase	96,05 %	93%	93%	93%	93%	93%	Disnaker	

		Kegiatan : Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota								Disnaker	
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah job fair online yang diselenggarakan		0	1	1	1	1	1	Disnaker	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya	lokasi	0	1	1	1	1	1	Disnaker	
			Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab/Kota	KK	4 KK	1	1	1	1	1	Disnaker	
			Jumlah Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB)	WUB							Disnaker	
		Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									Disnaker	
		Job Fair/Bur sa Kerja	jumlah perusahaan yang	perusa haan	0	5	5	5	5	5	Disnaker	

			terfasilitasi dalam pelaksanaan job fair									
			Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab/Kota (IKK Output)	lowongan kerja		100	100	100	100	100	Disnaker	
2		Koperasi dan UMKM										
	1. Program Pengawasan Dan Pemeriksa-an Koperasi		Persentase koperasi yang berkualitas	persentase							Disperindagkop UKM	
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah			9,56	9,56	12	12	14	15	Disperindagkop UKM	

		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya	koperasi	9,56	9,56	12	12	14	15	Disperindagkop UKM	
			Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	13	13	16	16	19	21	Disperindagkop UKM	
	2. Program Pendidikan Dan Latihan		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan	persentase	70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	

	Perkoperasian		wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota								
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi			70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	
		Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota			70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntan berbasis Teknologi Informasi	koperasi	70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	

			Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	koperasi	70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	
			Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi akses pembiayaan bagi koperasi	koperasi	70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	
			Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan koperasi	koperasi	70	125	125	140	140	160	Disperindagkop UKM	
	3. Program Pengembangan UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha	%	15	20	21	21	22	22	Disperindagkop UKM	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan	UMKM	25	26	26	27	28	29	Disperindagkop UKM	

		dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menja di Usaha Kecil	fasilitasi pemasaran									
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	UMKM	25	26	26	27	28	29	Disperindagkop UKM	
			Jumlah event festival kuliner yang dilaksanakan	event	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Disperindagkop UKM	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	UMKM	25	26	26	27	28	29	Disperindagkop UKM	

			Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembang an wirausaha inovatif	UMKM	135	135	135	135	140	150	Disperind agkop UKM	
			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi akses pembiayaan permodalan	UMKM	135	135	135	135	140	150	Disperind agkop UKM	
			Jumlah usaha mikro yang mendapat sosialisasi fasilitasi penguatan kelembagaan sentra	UMKM	135	135	135	135	140	150	Disperind agkop UKM	
			Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi sertifikasi produk usaha	UMKM	25	25	27	28	30	30	Disperind agkop UKM	
		Kegiatan Pembinaan Terhadap	Jumlah Paguyuban Pedagang Pasar	Orang	40	40	41	42	42	44	Disperind agkop UKM	

		Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n Masyarakat di Wilayah Kerjanya	yang diberi pembinaan/sosial isasi									
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan penataan kawasan PK5	orang	76	74	75	75	76	76	Disperind agkop UKM	
3	Penanama n Modal										DPMPTSP	
	1. Program Pengemba ngan Iklim Penanam-an Modal		Penambahan Peraturan Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen							DPMPTSP	

		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota									DPMPTSP	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	dokumen	kajian	1	-	-	-	-	DPMPTSP	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di update	dok	-	1	1	1	1	1	DPMPTSP	
	2. Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%							DPMPTSP	
		Kegiatan Penyelen									DPMPTSP	

		ggaraan Promosi Penanam an Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting (DAK)	kali	3	3	3	3	3	3	DPMPTSP	
			Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Investasi Penanaman Modal	kali	-	3	3	3	3	3	DPMPTSP	
4	Pertanian										Dispaperta	
	1. Program Penyuluhan Pertanian		Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persentase	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Dispaperta	

		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan pelaksanaan penyuluhan		15	15	15	15	15	15	Dispaperta	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian	bulan	12	12	12	12	12	12	Dispaperta	
		Pengembang-an Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikkan kelas	Kelompok tani	0	30	30	30	30	30	Dispaperta	
5	Perdaga ngan										Disperind agkop UKM	
	1. Program Pengem bangan Ekspor		Persentase peningkatan volume ekspor	Volume	59.034.727	60.215.421	61.419.730	62.648.214	63.901.087	65.179.108	Perdaga-ngan	
		Kegiatan Penyelenggara an Promosi Dagang melalui Pameran			Na	Na	Na	Na	Na	Na	Disperind agkop UKM	

		Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota										
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor	UMKM	25	25	25	25	25	25	Disperindagkop UKM	
	2. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%							Disperindagkop UKM	
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan									Disperindagkop UKM	

		Penggunaan Produk Dalam Negeri										
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	UMKM							Disperindagkop UKM	
			Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Dekranasda	UMKM							Disperindagkop UKM	
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace	UMKM							Disperindagkop UKM	

Tabel 6. 7

Rencana Aksi Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan Kabupaten Batang Tahun 2025-2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Bidang Politik											
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan dan Wawasan		Persentase suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	75	80	85	90	95	100	Bakes-bangpol	
a		Jumlah peserta mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi perempuan dan generasi muda	Peserta mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi perempuan dan generasi muda (orang)	orang	25	30	35	40	45	50	Bakes-bangpol	

2	Program Peningkatan Peran Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika serta Budaya Politik		Jumlah parpol dan Lembaga Pendidikan yang mengikuti Pendidikan politik	lembaga	10	11	11	11	11	11	Bakes-bangpol	
a		Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan pertemuan caucus politik perempuan	orang	8	9	9	9	9	9	Bakes-bangpol	
b		Jumlah peserta mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dan peningkatan partisipasi politik	Jumlah peserta Pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik perempuan	orang	1432	1200	1250	1300	1350	1400	Bakes-bangpol	

Tabel 6. 8

Rencana Aksi Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	Program Pengelolaan Dan Pengembang-an Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpi-paan dan buka jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase									
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah revitalisasi sarana dan prasarana air bersih	Lokasi	9	12	17	24	31	40		DPUPR
			Jumlah SR yang terlayani jaringan perpipaan	SR	1249	2665	4112	5590	7098	8641	DPUPR	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi	Lokasi	9	12	17	24	31	40	DPUPR	
		Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota									DPUPR	
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah keikutsertaan peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan								DLH	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan	Jumlah rumah	unit	0	10	20	30	40	50	DPUPR	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	dengan akses sam- bungan rumah untuk pelayanan dasar									

Tabel 6. 9

Rencana Aksi Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Luas Kawasan permukiman tidak kumuh	%								
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota										
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	202	220	240	260	280	300	DPRKP	Perumahan Rakyat dan Permukim-an

		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										

Tabel 6. 10

Rencana Aksi Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayan		Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	%	85	85	87	87	90	90	DP3AP2KB	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase sub kegiatan yang responsif gender	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	Jumlah peserta gender champions yang mendapat penghargaan	Orang	2	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kabupaten/ Kota										
			Jumlah dokumen PPRG yang disusun	Dokumen	51	46	46	46	46	46	DP3AP2 KB	
			Jumlah peserta yang diberikan Bintek penyusunan dokumen yang responsif gender	Orang	46	46	46	46	46	46	DP3AP2 KB	
											DP3AP2 KB	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi /advokasi Pemberdayaan Perempuan	%	80	80	80	80	80	80	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi	orang	28	28	28	28	28	28	DP3AP2 KB	
		Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	PUG								DP3AP2 KB	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	
			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	Orang	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	
			Jumlah peserta gender	Orang	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			champion yang mendapat penghargaan									
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan Produktivitas ekonomi pere mpuan	orang	30	30	30	30	30	30	DP3AP2 KB	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batang	kali	4	4	4	4	4	4	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
2	Program Perlindungan Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DP3AP2 KB	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase korban kekerasan Perempuan yang terlayani (IKK Output)	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan	orang	78	48	48	45	45	45	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan n Kabupaten/ Kota										
			Jumlah pemberian konseling pengasuhan anak dan permasalahan keluarga	kasus	1	4	4	4	4	4	DP3AP2 KB	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	80	70	80	80	80	85	DP3AP2 KB	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mendapatkan pendampingan GSIB	%	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB	Kelom-pok	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	Persentase posyandu yang mengikuti evaluasi posyandu	%	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat	Kelom-pok	0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	
		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penghargaan lomba Posyandu		0	0	0	0	0	0	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
4												
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan kader Ketahanan Keluarga dan kader PATBM tingkat Kelurahan	orang	0	3	3	3	4	4	DP3AP2 KB	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Persentase pendampingan pengaduan pengasuhan anak dan konseling perkawinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Kabupaten/Kota										
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pengaduan pengasuhan anak dan konseling perkawinan yang dilaksanakan	kali	265	250	250	250	250	250	DP3AP2 KB	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase dekela (desa/kelurahan layak anak	%	20	25	30	35	45	50	DP3AP2 KB	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia	Persentase SRA	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dan advokasi Menuju Kab Layak Anak	orang	100	110	120	130	140	150	DP3AP2 KB	
			Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat	sekolah	0	5	10	15	20	25	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas atau rumah sakit yang mendapat penghargaan puskesmas/rumah sakit ramah anak	unit	23	23	23	23	23	23	DP3AP2KB	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang mengikuti pelatihan KHA	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KHA	orang	100	150	200	250	300	350	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Forum Anak	orang	35	40	45	50	55	60	DP3AP2 KB	
			Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan	kali	1	1	1	1	1	1	DP3AP2 KB	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan	Kelurahan	9	9	9	9	9	9	DP3AP2 KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
			Jumlah Lembaga APSAI yang dibentuk	lembaga	0	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	
			Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan	kai	0	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	
			Jumlah dokumen Perwal RAD yang disusun	dokumn	0	1	1	1	1	1	DP3AP2KB	
	Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus ABH yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Kali	57	50	48	45	43	40	DP3AP2KB	
			Jumlah pemberian konseling pengasuhan anak	Kali	1	4	4	4	4	4	DP3AP2KB	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			dan permasalahan keluarga									
			Jumlah pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan yang dilaksanakan	kali	58	54	52	49	47	44	DP3AP2 KB	

Tabel 6. 11

Rencana Aksi Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Tahun 2025 - 2029

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Program Pendaftaran Penduduk		Prosentase identitas Kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	71,51	72	73	74	75	76	Disdukcapil	
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)	%	97,92	98	98,50	98.80	98,90	99	Dukcapil	
		Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)	%	44,72	46	48	50	52	55	Dukcapil	
			Jumlah identitas kependudukan yang telah diterbitkan (KTP + KIA)		714.946	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	Disdukcapil	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah jenis layanan yang ditangani petugas registar	jenis	6	6	6	6	6	6	Disdukcapil	
			Jumlah kepemilikan KTP untuk Penduduk usia 17 th ke atas dan jumlah kepemilikan KIA untuk penduduk usia 17 th ke bawah		714.946	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	Dukcapil	
2	Program Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Sub Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	1. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta KelahiranProsentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran	%	99,49	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Disdukcapil	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome)	%	98,98	99	99	99	99	99	Disdukcapil	
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	2. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Jumlah Penduduk yang telah memiliki akta perkawinan dan penduduk usia 0-18 th yang telah memiliki akta kelahiran		469.425	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	Disdukcapil	
		Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penduduk yang telah memiliki akta perkawinan		234.367	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Disdukcapil	
			Persentase Penerbitan Akta	%	54,20	54,5	54,8	55	55,3	55,5	Disdukcapil	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
			Perkawinan (IKK Output)									
			Persentase Penerbitan Akta Perceraian (IKK Output)	%	56,15	56,5	56,8	57	57,2	57,5	Disdukcapil	
			Persentase Penerbitan Akta Kematian (IKK Output)	%	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil	
		Sub Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Sub Kegiatan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kalahiran		235.058	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Disdukcapil	
3	Program Pengelolaan Informasi		1. Cakupan Penerbitan KTP	%	98,30	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	Disdukcapil	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	Administrasi Kependudukan		Prosentase Penyajian data Kependudukan yang Valid									
			Cakupan jumlah penduduk yang terdaftar dalam database kependudukan	%			100	100	100	100	Disdukcapil	
		Kegiatan Pengumpulan data kependuduk-an dan pemanfaatan penyajian database kependuduk-an	Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (IKK Outcome)	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	Disdukcapil	
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian data kependuduk-an	Jumlah lembaga yang mengakses data kependudukan	angka	7	7	7	7	7	7	Disdukcapil	
			Penyajian data kependudukan (IKK Output)	kali	2	2	2	2	2	2	Disdukcapil	
		Kegiatan Penyelenggaraa	Prosentase data base kependudukan yang	%	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		n Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	di update secara berkala									
		Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk-an	3. Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk Terlaksananya capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Unit/bulan	12	12	12	12	12	12	Disdukcapil	
	Program Administrasi Pemerintah-an Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang dibina dan diawsi penyelenggaran Administrasinya	Desa	40	40	40	40	40	40	Disperma-des	Pemerintah an
	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Banyuputih	
	Program Penyelenggaraa	Koordinasi Penyelenggaraa	Layanan kepada masyarakt di	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Pecalungan	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan yang memiliki SOP									
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakt di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Bandar	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberian Paket Bantuan Kepada Balita Gizi Buruk sebagai Wujud Intervensi Penurunan Stunting	Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/kota Dalam hal ini adanya kegiatan Dislutkan yang anggarannya Digunakan untuk pemberian Bantuan Kepada Balita Gizi Buruk berupa paket yang berisi susu,telur dan daging sebagai bentuk Intervensi penurunan Stunting	Paket	1000	1000	1000	1000	1000	1000	DISLUTKANNAK	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Layanan kepada masyarakat di	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Blado	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Pelayanan Publik	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan yang memiliki SOP									
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Wonotunggal	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Kandeman	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan warungasem	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali/ Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Reban	
	Program Penyelenggaraa	Koordinasi Penyelenggaraa	Layanan kepada masyarakat di	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Limpung	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
	n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan yang memiliki SOP									
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Gringsing	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Bawang	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Layanan kepada masyarakat di Kecamatan yang memiliki SOP	Kali	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Subah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	Tepat waktu/	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD	Penunjang

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
				Tidak tepat waktu								
			Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	Tepat waktu/ Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD	
			Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	90	90	90	90	90	90	BPKPAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah rancangan APBD yang tersusun	Dok	2	2	2	2	2	2	BPKPAD	

No	Rencana Aksi		Indikator	Satuan	Kondisi Awal tahun 2024	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					OPD	Urusan
	Program	Kegiatan				2025	2026	2027	2028	2029		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi penerbitan SP2D	%	95	95	95	95	95	95	BPKPAD	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah yang tersusun	Dok	1	1	1	1	1	1	BPKPAD	

BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN PUG KABUPATEN BATANG TAHUN 2025-2029

Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Batang Tahun 2025-2029 ini masa berlakunya adalah lima tahun. Pentahapan ini dikaitkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang, agar terintegrasi dan pelaksanaannya terkonsolidasi. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat program dan kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Batang.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) agar kembali memfungsikan lembaga-lembaga PUG untuk memperkuat konsolidasi program dan kegiatan guna pencapaian kesetaraan dan keadilan gender lebih cepat;
2. Sekretaris Pokja PUG mengkoordinasikan percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai upaya yang terstruktur, terintegrasi dan terkoordinasi;
3. Semua Perangkat Daerah agar membentuk kelembagaan PUG berupa Focal Point Perangkat Daerah, dan mensinkronkan program dan kegiatan dalam perspektif gender guna mendukung pencapaian target-target dalam Rencana Aksi Daerah;
4. Diharapkan seluruh aparatur Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam PUG dapat tercapai;
5. Rencana Aksi Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan PUG serta memastikan pencapaian pentahapan dalam *Road Map*/Peta Jalan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil implementasi secara berkala.